

RILIS SURVEI NASIONAL DAN PEMUKA OPINI

Persepsi Masyarakat dan Pemuka Opini terhadap Rencana Amandemen UUD 1945

Temuan:
September 2021

The logo for INDIKATOR features the word "INDIKATOR" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is stylized as a circle with a red triangle pointing upwards and to the right, and a teal circle in the center. Above the logo is a thick red horizontal bar, and below it is a red graphic element consisting of two overlapping triangles pointing towards each other.

Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Jakarta Pusat

Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867

Website: www.indikator.co.id

LATAR BELAKANG

- Dalam perjalanan Republik Indonesia sejak era Reformasi 1998 pasca Orde Baru, Amandemen UUD 1945 telah terjadi sebanyak empat kali.
- Amandemen UUD 1945 terjadi pertamakali pada sidang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 14-21 Oktober 1999. Ketua MPR kala itu adalah Amien Rais. Ada 9 dari 37 pasal di dalam UUD yang berubah.
- Perubahan kedua terjadi pada sidang umum MPR 7-18 Agustus 2000 yang juga masih diketuai Amien Rais. Di masa sidang ini perubahan yang paling kentara adalah soal desentralisasi pemerintahan. Pasal 18 UUD 1945 dalam amandemen kedua ini lebih mengakomodir bagaimana provinsi, kota, dan kabupaten bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri.
- Kemudian, UUD 1945 mengalami perubahan ketiga dalam sidang umum MPR pada 1-9 November 2001. Hasilnya menghilangkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Amandemen UUD 1945 keempat yang terjadi pada masa sidang 1-11 Agustus 2002. Perubahan terakhir ini hanya menyempurnakan beberapa pasal saja. Misalnya, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD.

LATAR BELAKANG

- Cukup banyak isu yang berkembang dalam wacana amandemen ke-5 UUD 1945 belakangan ini. Sayangnya, selain belum dipaparkan secara sistematis, isu-isu tersebut juga belum diuji oleh kalangan yang kompeten. Di antara isu yang sering mengemuka adalah soal penyusunan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), masa jabatan presiden, aturan pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden, kedudukan MRP serta kewenangan DPD.
- Sampai saat ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan amandemen UUD 1945 masih terbatas. Sejumlah tokoh nasional sudah bersuara, tetapi kebanyakan tidak mewakili institusi di mana mereka berada. Pandangan dan sikap mereka lebih merupakan pendapat pribadi walaupun cukup sering dilontarkan.
- Amandemen UUD 1945 merupakan peristiwa penting karena menyangkut landasan berbangsa dan bernegara. Perubahan apapun yang dilakukan akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Maka sudah seharusnya proses amandemen menyertakan partisipasi masyarakat seluas mungkin. Atas pertimbangan inilah Indikator Politik Indonesia bekerjasama dengan Partai NasDem melakukan penelitian tentang persepsi publik dan tokoh terhadap rencana amandemen UUD 1945.

TUJUAN

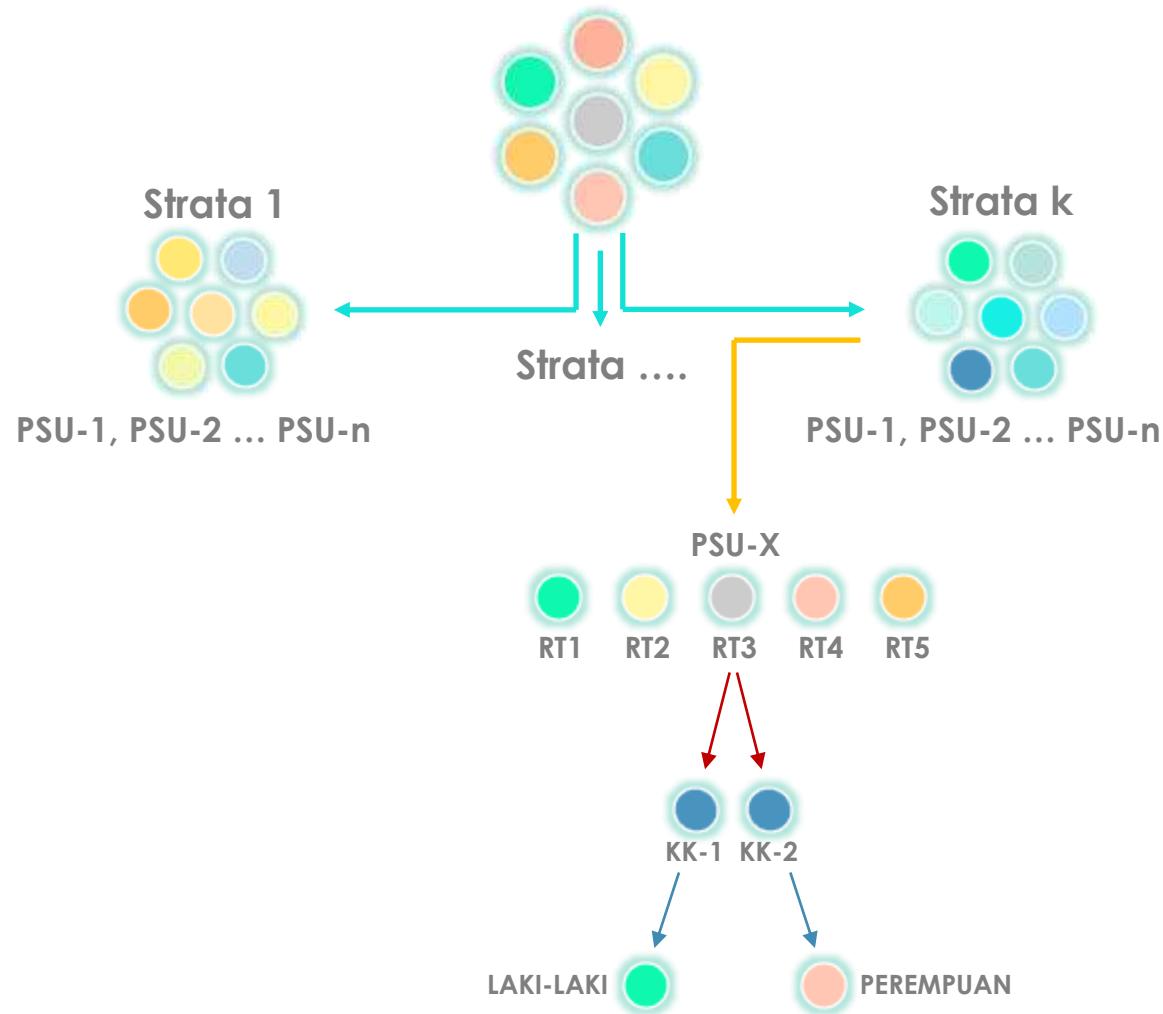
- Penelitian tentang “Amandemen UUD 1945” ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pandangan dan sikap masyarakat tentang amandemen UUD 1945. Di antara aspek penting yang digali adalah apakah saat ini sudah waktunya dilakukan amandemen UUD 1945. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menggali informasi lebih dalam mengenai sikap masyarakat terhadap sejumlah pasal/aturan yang menjadi perdebatan publik belakangan ini. Mulai dari kedudukan MPR sampai masa jabatan presiden.
- Penelitian “Amandemen UUD 1945” juga berusaha menghadirkan informasi yang lebih komprehensif tentang pandangan dan sikap masyarakat mengenai amandemen UUD 1945. Untuk itu, dua jenis penelitian dilakukan secara bersamaan. Pertama, survei opini publik yang dimaksudkan untuk menggali informasi dari masyarakat umum. Kedua, penelitian kualitatif terhadap pemuka opini yang ditujukan untuk mendengar pandangan para *opinion-maker* yang memiliki pengaruh dan kompetensi keilmuan lebih mendalam. Hasil dari kedua jenis penelitian ini saling melengkapi dan dapat dijadikan masukan bagi para pembuat keputusan. Survei opini publik menghadirkan informasi dari seluruh lapisan masyarakat, sedangkan wawancara mendalam terhadap pemuka opini menghadirkan pandangan para ahli yang bersifat lebih mendalam.



METODOLOGI SURVEI NASIONAL

- Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
- Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
- Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dengan memakai protokol kesehatan yang ketat.
- Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
- Wawancara di lapangan pada 2 – 7 September 2021

FLOWCHART PENARIKAN SAMPEL



Populasi desa/kelurahan (PSU).

Desa/kelurahan (PSU) di tiap Strata dipilih secara random dengan jumlah proporsional.

Di setiap PSU terpilih, dipilih sebanyak 5 RT (satuan lingkungan terkecil di atas KK) dengan cara random.

Di masing-masing RT/Lingkungan terpilih, dipilih secara random dua KK.

Di tiap KK terpilih, dipilih secara random satu orang yang punya hak pilih, laki-laki/perempuan.

PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

| KATEGORI | SAMPEL | POPULASI |
|------------------|--------|----------|
| GENDER | | |
| Laki-laki | 50.2 | 50.3 |
| Perempuan | 49.8 | 49.7 |
| DESA-KOTA | | |
| Pedesaan | 49.6 | 50.2 |
| Perkotaan | 50.4 | 49.8 |
| USIA | | |
| <= 21 tahun | 12.5 | 12.7 |
| 22 - 25 tahun | 10.1 | 10.1 |
| 26 - 40 tahun | 36.9 | 37.0 |
| 41 - 55 tahun | 25.2 | 25.0 |
| > 55 tahun | 15.3 | 15.2 |

| KATEGORI | SAMPEL | POPULASI |
|--------------|--------|----------|
| AGAMA | | |
| Islam | 88.9 | 87.2 |
| Lainnya | 11.1 | 12.8 |
| ETNIS | | |
| Jawa | 41.6 | 40.2 |
| Sunda | 15.5 | 15.5 |
| Batak | 3.5 | 3.6 |
| Madura | 3.3 | 3.0 |
| Betawi | 3.1 | 2.9 |
| Minang | 3.0 | 2.7 |
| Bugis | 3.1 | 2.7 |
| Melayu | 2.5 | 2.3 |
| Lainnya | 24.6 | 27.1 |

PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

| KATEGORI | SAMPEL | POPULASI |
|------------------|--------|----------|
| PROVINSI | | |
| ACEH | 1.8 | 1.8 |
| SUMATERA UTARA | 5.1 | 5.1 |
| SUMATERA BARAT | 1.9 | 1.9 |
| RIAU | 2.0 | 2.0 |
| JAMBI | 1.3 | 1.3 |
| SUMATERA SELATAN | 3.1 | 3.1 |
| BENGKULU | 0.7 | 0.7 |
| LAMPUNG | 3.2 | 3.2 |
| BANGKA BELITUNG | 0.5 | 0.5 |
| KEPULAUAN RIAU | 0.6 | 0.6 |
| DKI JAKARTA | 4.1 | 4.1 |
| JAWA BARAT | 17.4 | 17.4 |
| JAWA TENGAH | 14.6 | 14.6 |
| DI YOGYAKARTA | 1.4 | 1.4 |
| JAWA TIMUR | 16.2 | 16.2 |
| BANTEN | 4.3 | 4.3 |
| BALI | 1.6 | 1.6 |

| KATEGORI | SAMPEL | POPULASI |
|---------------------|--------|----------|
| PROVINSI | | |
| NUSA TENGGARA BARAT | 1.9 | 1.9 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 1.8 | 1.8 |
| KALIMANTAN BARAT | 1.9 | 1.9 |
| KALIMANTAN TENGAH | 0.9 | 0.9 |
| KALIMANTAN SELATAN | 1.5 | 1.5 |
| KALIMANTAN TIMUR | 1.3 | 1.3 |
| KALIMANTAN UTARA | 0.2 | 0.2 |
| SULAWESI UTARA | 1.0 | 1.0 |
| SULAWESI TENGAH | 1.0 | 1.0 |
| SULAWESI SELATAN | 3.2 | 3.2 |
| SULAWESI TENGGARA | 0.9 | 0.9 |
| GORONTALO | 0.4 | 0.4 |
| SULAWESI BARAT | 0.5 | 0.5 |
| MALUKU | 0.7 | 0.7 |
| MALUKU UTARA | 0.4 | 0.4 |
| PAPUA BARAT | 0.4 | 0.4 |
| PAPUA | 1.9 | 1.9 |

METODOLOGI SURVEI ELIT

- Responden survei ini adalah Pemuka Opini nasional dan daerah (provinsi), sebanyak 313 orang dari 16 Wilayah di Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang Amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Di antara mereka adalah akademisi yang menjadi rujukan media, redaktur media, organisasi masyarakat, tokoh agama, budayawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO, dan pusat studi kebijakan.
- Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah. Oleh karena itu, hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia.
- Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak, dan terdiri dari pemuka opini yang sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya.
- Wawancara dilakukan baik secara tatap muka dengan proses yang ketat maupun via zoom pada 1– 30 September 2021.

JUMLAH NARASUMBER MENURUT WILAYAH SURVEI ELITE

- Survei elit tentang “Amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945” dilakukan di wilayah berikut:

| WILAYAH | JUMLAH NARASUMBER |
|------------------------|-------------------|
| 1. KOTA MEDAN | 20 |
| 2. KOTA PADANG | 13 |
| 3. KOTA PALEMBANG | 10 |
| 4. WILAYAH JABODETABEK | 79 |
| 5. KOTA BANDUNG | 18 |
| 6. KOTA SEMARANG | 23 |
| 7. KOTA JOGJAKARTA | 22 |
| 8. KOTA MALANG | 10 |
| 9. KOTA SURABAYA | 31 |
| 10. KOTA DENPASAR | 10 |
| 11. KOTA KUPANG | 10 |
| 12. KOTA SAMARINDA | 10 |
| 13. KOTA BANJARMASIN | 10 |
| 14. KOTA MANADO | 12 |
| 15. KOTA MAKASSAR | 25 |
| 16. KOTA JAYAPURA | 10 |
| TOTAL | 313 |

DISTRIBUSI SAMPLE NARASUMBER ELITE

| WILAYAH | | AKADEMISI | LSM/NGO | MEDIA MASSA | THINK TANK / PUSAT STUDI | TOKOH ORMAS/AGAMA/ BUDAYAWAN | TOTAL |
|---------------------|---------------------|------------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 |
| SUMATERA BARAT | KOTA PADANG | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| JABODETABEK | WILAYAH JABODETABEK | 28 | 14 | 11 | 13 | 13 | 79 |
| JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 |
| DIY JOGJAKARTA | KOTA JOGJAKARTA | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| JAWA TIMUR | KOTA MALANG | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 31 |
| BALI | KOTA DENPASAR | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 25 |
| PAPUA | KOTA JAYAPURA | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| TOTAL | | 104 | 59 | 57 | 35 | 58 | 313 |

DAFTAR NARASUMBER ELITE

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|----|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|
| 1 | AKADEMISI | DR.MARZUKI SH, MHUM | DEKAN FAK HUKUM UISU ANGGOTA ASOSIASI PENGAJAR KONSTITUSI SUMUT | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 2 | AKADEMISI | DR. MAHMUL SIREGAR, SH, MHUM | DEKAN HUKUM USU | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 3 | AKADEMISI | DR. MIRZA NASUTION, SH, MH | DOSEN HUKUM USU STAF AHLI WALI AMANAT | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 4 | AKADEMISI | DR.BUDIMAN N.P.D SINAGA, SH, MH | KETUA PRODI PPKN UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN MEDAN | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 5 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 6 | AKADEMISI | DR. EKA SIHOMBING, SH, MH | DOSEN LEKTOR UTAMA PUSAT STUDI KONSTITUSI | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 7 | MEDIA MASSA | ANTON PANGGABEAN, S.E., M.SI | WAKIL PEMIMPIN REDAKSI HARIAN SIB | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 8 | MEDIA MASSA | NURLELI, M.KOM | PRODUSER INEWS SUMUT | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 9 | MEDIA MASSA | IIN SHOLIHIN SH | PEMRED TRIBUN MEDAN | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 10 | MEDIA MASSA | DR. DEDI SYAHPUTRA, SSOS, MA | REDPEL HARIAN WASPADA | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 11 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DR. H.DEDI ISKANDAR BATU BARA, SSOS., S. | DOSEN, ANGGOTA DPD | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 12 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | CHOCING SUSILO SAKEH | BUDAYAWAN KETUA MAJELIS KESENIAN KOTA MEDAN, JURNALIS, MANTAN KETUA AJI. | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 13 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DR.RE.NAINGGOLAN | SEKRETARIS KAWASAN PROVINSI SUMATERA UTARA | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 14 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DR H HASAN MATSUM, M AG | DOSEN UINSU | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 15 | LSM/NGO | ISWAN KAPUTRA,SSOS M.SI | WAKIL DIREKTUR BITRA INDONESIA (NGO) | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 16 | LSM/NGO | TONGAM PANGGABEAN, M.H | PENGACARA | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 17 | LSM/NGO | ISMAIL LUBIS SH, MH | ADVOKAT (LBH MEDAN) | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 18 | LSM/NGO | DADANG DARMAWAN, S.SOS., M.SI | DOSEN FISIP UMA | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 19 | THINK TANK / PUSAT STUDI | DRS. GANDI PARAPAT | WIRASWASTA | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 20 | THINK TANK / PUSAT STUDI | BENITO ASHDIE KODIYAT, SH. MH | DOSEN UMSU | YA | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
| 21 | AKADEMISI | PROF. DR. BUSYRA AZHERI SH, MH | DOSEN, DEKAN FH UNAND | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 22 | AKADEMISI | PROF. DRS. GANEFRI, M.PD, PH.D | DOSEN, REKTOR UNP, KETUA PW NU SUMBAR | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 23 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 24 | MEDIA MASSA | NASHRIAN BAHZEIN, S.PT | WARTAWAN, PEMRED PADANG TV | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 25 | MEDIA MASSA | ZUL EFENDI, SH | WARTAWAN, PEMRED HARIAN HALUAN | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 26 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | KI JAL ATRI TANJUNG, SH, MH | ADVOKAT, DOSEN UNIV. TAMSIS, TOKOH MUHAMMADIYAH | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 27 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DR. RIKI SAPUTRA | DOSEN, REKTOR UMSB | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 28 | LSM/NGO | INDIRA SURYANI SH, MH | PENGACARA PUBLIK, DIREKTUR LBH PADANG | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |

LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 29 | LSM/NGO | USLAINI,SP | DIREKTUR WALHI SUMBAR | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 30 | THINK TANK / PUSAT STUDI | OKTAVIANUS RIZWA, SH | ADV OKAT, KONSULTAN HUKUM DPRD SUMBAR | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 31 | AKADEMISI | DR. TARECH RASYID | REKTOR UIBA | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 32 | AKADEMISI | DR. FEBRIAN S.H MS | DEKAN HUKUM UNSRI | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 33 | AKADEMISI | DR. H MARSAID UMAR MA | DEKAN HUKUM UIN RADEN FATTAH | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 34 | MEDIA MASSA | SUZAN OCTARIA, S.PD | PEMIMPIN REDAKSI PAL TV | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 35 | MEDIA MASSA | NURSERI, ST | GM SUMATERA EKSPRESS | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 36 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | ANDRAS T WONG, S.E | PERANCANG ACARA BUDAYA | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 37 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | HERNOE ROESPRIJADJI, S.IP., M.H., M.SI | DIREKTUR CHR | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 38 | LSM/NGO | BAGINDO TOGAR, S.IP | WIRASWASTA | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 39 | LSM/NGO | PRAWIRA MAULANA ST | KETUA AJI PALEMBANG | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 40 | THINK TANK / PUSAT STUDI | DR. M HUSNI THAMRIN | DIREKTUR KKR MHT ASSOCIATES | YA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
| 41 | AKADEMISI | DR. YENTI GARNASIH, S.H., M.H. | DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 42 | AKADEMISI | DRS. YANTO SUPRIYATNO, M.SI. | DOSEN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 43 | AKADEMISI | DR. DWI PUTRI CAHYAWATI, S.H. M.H. | DOSEN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 44 | AKADEMISI | DR. HERMANTO DRS. M.PD MM | REKTOR UNISMA BEKASI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 45 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 46 | AKADEMISI | AGIL OKTARYAL, S.H., M.H. | DOSEN/ PENELITI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 47 | AKADEMISI | DR. UJANG KOMARUDIN, S.SOS., M.SI | DOSEN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 48 | AKADEMISI | PROF. DR. IR. ASEP SAEFUDDIN, MSC. | REKTOR UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA/DOSEN TETAP IPB | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 49 | AKADEMISI | DR. AGUS RIEWANTO | DIREKTUR LKBH FH UNS | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 50 | AKADEMISI | ANDI SYAFRANI, SH., MCCL | DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN JAKARTA/SEKJEN APSI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 51 | AKADEMISI | DR. FIRMAN WIJAYA SH MH | KAPRODI S2 ILMU HUKUM UNKRISNA DWIPAYANA/PRAKTIKI HUKUN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 52 | AKADEMISI | PROF. ALI MUNHANIF, PH.D | DEKAN FISIP UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 53 | AKADEMISI | PROF. DR. MUHAMMAD FAUZAN., SH, M.HUM | GURU BESAR UNIV JENDRAL SOEDIRMAN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 54 | AKADEMISI | DR. MA'MUN MUROD, M.SI | DOSEN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 55 | AKADEMISI | YOES CHANDRA KENAWAS, S.IP, M.A., M.SI. | PENELITI POLITIK NORTHWESTERN UNIVERSITY | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 56 | AKADEMISI | DR. ADE ARMANDO, M.SC. | DOSEN/ PENELITI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 57 | AKADEMISI | PROF. SAIFUL MUJANI ,PH.D | GURU BESAR ILMU POLITIK UIN JAKARTA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 58 | AKADEMISI | DR. IDING ROSIDIN, S.A.G., M.SI | KETUA PRODI ILMU POLITIK UIN JAKARTA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 59 | AKADEMISI | DIMAS RAMADHAN, S.IP., M.IP | PENELITI DAN DOSEN DI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |

LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|----|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| 60 | AKADEMISI | DR. H. ADI SURYADI CULLA, MA. | DOSEN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 61 | AKADEMISI | DR. TRUBUS RAHADIANSYAH., MS.SH | PENGAMAT PUBLIK DAN DOSEN UNIVERSITAS TRISAKTI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 62 | AKADEMISI | DR. HULMAN PANJAITAN, SH., MH | DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 63 | AKADEMISI | DR. H. AHMAD AMARULLAH, M.P.D | REKTOR UNIVERSITAS MUHAMADIYAH TANGERANG | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 64 | AKADEMISI | DR. AULIYA KHASANNOFA, SH. M.H. | WAKIL DEKAN 1 FAKULTAS HUKUM UMT | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 65 | MEDIA MASSA | MUKHLISON | KARYAWAN SWASTA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 66 | MEDIA MASSA | INDRA SUBAGJA, S.IP | JURNALIS | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 67 | MEDIA MASSA | IQBAL MUHAMMAD, S.SOS | PEMIMPIN REDAKSI RADAR DEPOK | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 68 | MEDIA MASSA | TITIN ROSMASARI, S.SOS | PEMRED CNN INDONESIA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 69 | MEDIA MASSA | MUHAMMAD BUDI SANTOSA, S.SOS., M.IKOM. | PEMIMPIN REDAKSI OKEZONE.COM | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 70 | MEDIA MASSA | ALFITTO DEANOVA | PEMRED DETIK,.COM | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 71 | MEDIA MASSA | ANDI AHMADI | PIMRED RADAR BEKASI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 72 | MEDIA MASSA | ERMAN DAULAY, S.SOS | PEMRED TRIAS POLITICA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 73 | MEDIA MASSA | ISMOKO WIDJAYA | PEMRED VIVA .CO.ID | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 74 | MEDIA MASSA | AGUS SUPRIYANTO, S.S | DIREKTUR PENGEMBANGAN BISNIS DAN BERITA RADAR TANGSEL.COM | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 75 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 76 | AKADEMISI | LUKI DJANI, PH.D | DOSEN ILMU POLITIK UPN V J/ PENELITI INSTITUTE FOR STRATEGIC INITIATIVE | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 77 | AKADEMISI | DJAYADI HANAN, PH.D. | DOSEN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PARAMADINA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 78 | AKADEMISI | PROF. DR. ARIF SATRIA, S.P., M.SI. | REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 79 | MEDIA MASSA | XXX | XXX | TIDAK | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 80 | THINK TANK / PUSAT STUDI | HADAR GUMAY NAFIS | PENELITI SENIOR NETGRID (NETWORK FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL INTEGRITY)/ MANTAN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 81 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | XXX | XXX | TIDAK | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 82 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DRA. SOLICHA AHMAD, M.SI. | DOSEN UIN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 83 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | KH. SUYATMAN | KETUA PDM KABUPATEN BEKASI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 84 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | KH. SOEKANDAR GHOZALI | KETUA PDM KOTA BEKASI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 85 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | RUDI HM SAMIN, SE.,SH. | PENGUSAHA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 86 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | ARIES BUDIMAN (BANG IYES) | KETUA PEMUDA PANCASILA KOTA BEKASI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |



LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| 87 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | XXX | XXX | TIDAK | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 88 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | M. BENNINU ARGOEBIE, S.H. | WIRASWSTA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 89 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | HARIS PERTAMA, S.H. | KETUA DPP KNPI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 90 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | XXX | XXX | TIDAK | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 91 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | ANDY YENTRIYANI, S.SOS, M.A. | KETUA KOMNAS PEREMPUAN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 92 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | H. ADUNG ABDUL ROHMAN | SEKRETARIS JENDRAL PP GP ANSOR | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 93 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | PDT HENREK LOKRA, M.SI | SEKRETARIS EKSEKUTIF BIDANG KEADILAN DAN PERDAMAIAAN PGI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 94 | THINK TANK / PUSAT STUDI | SAIDIMAN AHMAD, MPP | PENELITI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 95 | THINK TANK / PUSAT STUDI | ABDUL ROHIM GOZALI, M.SI | DIREKTUR EKSEKUTIF MAARIF INSTITUTE | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 96 | LSM/NGO | MUHAMMAD ISNUR, S.H. | DIREKTUR ADVOKASI YLBHI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 97 | LSM/NGO | BOYAMIN SAIMAN | KOORDINATOR MAKI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 98 | LSM/NGO | HARIS AZHAR, S.H.,M.A | DIREKTUR EKSEKUTIF LOKATARU (FOUNDER) | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 99 | LSM/NGO | MIKE VERA WATI, S.PSI | MEMIMPIN ORGANISASI MASA PEREMPUAN DI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 100 | LSM/NGO | ADNAN TOPAN HUSODO | KOORDINATOR ICW | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 101 | LSM/NGO | HENDRIK ROSDINAR | MANAGER PROGRAM YAPPIKA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 102 | LSM/NGO | FEBRI DIANSYAH, S.H | MANAGING PARTNER VISI INTEGRITAS LAW OFFICE | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 103 | LSM/NGO | LA LOLA EASTER KABAN, SH. | PEGAWAI SWASTA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 104 | LSM/NGO | ALAMSYAH SARAGIH | DOSEN/ANGGOTA OMBUDSMAN RI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 105 | LSM/NGO | ROZI BRILIAN SODIK, S.H | STAF DIVISI RISET KONTRAS | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 106 | LSM/NGO | DAHLIAH UMAR, M.A. | KETUA NETRID INDONESIA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 107 | LSM/NGO | AHMAD MISBAHUL HASAN, S.E. | SEKJEND SEKNAS FITRA | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 108 | LSM/NGO | J DANANG WIDOYOKO | SEKJEN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA (TII) | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 109 | AKADEMISI | DR. STEPI ANRIANI, S.IP., M.SI | DOSEN, PENELITI, STAFSUS PANGLIMA TNI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 110 | THINK TANK / PUSAT STUDI | SUTAN SORIK, SH | PENELITI PADA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 111 | THINK TANK / PUSAT STUDI | PROF. DR. LILI ROMLI, M.SI. | PENELITI BIDANG PERKEMBANGAN POLITIK NASIONAL LIPI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 112 | THINK TANK / PUSAT STUDI | BA WONO KUMORO, S.SOS., M.IKOM | PENELITI POLITIK DI HABIBIE CENTER | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |

LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|-----|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| 113 | THINK TANK / PUSAT STUDI | DR. LUHUT MARIHOT PARULIAN PANGARIBUAN, | ADVOKAT/DOSEN | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 114 | THINK TANK / PUSAT STUDI | GITA PUTRI DAMAYANA, S.H. LL.,M. | PENELITI DAN PENGAJAR | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 115 | THINK TANK / PUSAT STUDI | ADINDA TENRIANGKE MUCHTAR, PH.D. | DIREKTUR EKSEKUTIF TII | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 116 | THINK TANK / PUSAT STUDI | RAY RANGKUTI | DIREKTUR EKSEKUTIF LINGKAR MADANI | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 117 | THINK TANK / PUSAT STUDI | TITI ANGGRAINI, S.H., M.H. | DEWAN PENASEHAT PERLUDEM | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 118 | THINK TANK / PUSAT STUDI | XXX | XXX | TIDAK | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 119 | THINK TANK / PUSAT STUDI | HASANUDIN ALI | DIREKTUR EKSEKUTIF ALVARA RESEARCH | YA | WILAYAH JABODETABEK | JABODETABEK |
| 120 | AKADEMISI | PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUSF, S.H., M.H | DOSEN UNPAR | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 121 | AKADEMISI | PROF. DR. DR. H. SAM'UN JAJA RAHARJA, M | DOSEN (GURU BESAR FISIP UNPAD) | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 122 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 123 | AKADEMISI | PROF. DR. H. AGUS SALIM MANSYUR, M.PD. | GURU BESAR UIN BANDUNG | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 124 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 125 | AKADEMISI | DR. H. ASEP A. SAHID GATAR, SH., M.SI. | DOSEN (KAJUR ILMU POLITIK UIN BANDUNG) | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 126 | MEDIA MASSA | H. NOE FIRMAN RACHMAT | PEMRED HARIAN PR | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 127 | MEDIA MASSA | H. US TIARSA | WARTAWAN | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 128 | MEDIA MASSA | NICO AQUARESTA | KABIRO ELSHINTA BANDUNG | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 129 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYA WAN | DR. H. ZULKARNAEN S.H, M.H | DOSEN | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 130 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYA WAN | ASEP ANDRIANA | WIRASWASTA | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 131 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYA WAN | KH. HASAN NURI HIDAYATULLAH | GURU | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 132 | LSM/NGO | MEIKI PAENDONG | DIREKTUR WALHI JAWA BARAT | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 133 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 134 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 135 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 136 | THINK TANK / PUSAT STUDI | SAEFUL ANWAR M.AG | GURU | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 137 | THINK TANK / PUSAT STUDI | BUDHI PRASETYA, S.SI. | DIREKTUR PUPUK | YA | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
| 138 | AKADEMISI | PROF DR.F. RIDWAN SANJAYA SE, S KOM M SI | REKTOR UNIKA SOEGIJA PRANATA | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 139 | AKADEMISI | DR. NUR HIDAYAT SARDINI | DOSEN FISIPOL UNIP | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 140 | AKADEMISI | DR UMBU RAUTA SH. MHUM | DOSEN UKSW SALATIGA | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 141 | AKADEMISI | DR. TEGUH YUWONO, M. POL. ADMIN | DIREKTUR MAP UNIP SEMARANG | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 142 | AKADEMISI | DR HJ MISBAH ZULFA ELISABETH M. HUM | DEKAN FISIP UIN WALISONGO SEMARANG | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 143 | AKADEMISI | PROF. DR. H. MUDZAKKIR ALI M.A | REKTOR UNNIVERSITAS WAHID HASYIM | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 144 | MEDIA MASSA | DRS GUNAWAN PERMADI | PIMRED SUARA MERDEKA | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |

LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 145 | MEDIA MASSA | ERWIN ARDIAN, S. T. | PIMRED TRIBUN JATENG | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 146 | MEDIA MASSA | IDA NOOR LAYLA, S. AG | PIMRED RADAR SEMARANG | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 147 | MEDIA MASSA | ABDUL MUIZ, S.SOS | PIMRED JATENG POS | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 148 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | PROF. DR. H. MUHIBBIN, M. AG | SYURIAH PWNU JATENG/ DOSEN UIN SEMARANG | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 149 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | ALOYSIUS BUDI PURNOMO | BUDAYAWAN AGAMA KATOLIK. (KETUA HAK KAS) | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 150 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DRS. H. TAFSIR, M.AG | KETUA PW MUHAMMADIYAH JATENG | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 151 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DR. KH NURIL ARIFIN HUSEIN MBA (GUS NURI) | PENDAKWAH | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 152 | LSM/NGO | ETI OKTAVIANI, SH | DIREKTUR LBH SEMARANG | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 153 | LSM/NGO | ISMAIL AL HABIB | DIREKTUR WALHI JATENG | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 154 | LSM/NGO | RONNY MARYANTO R. ST | SEKJEN KP2KKN JATENG | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 155 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 156 | THINK TANK / PUSAT STUDI | RES FOBIA SH MIDS | WAKIL DEKAN FH UKSW SALATIGA | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 157 | THINK TANK / PUSAT STUDI | PROF. DR. MARTITAH, M. HUM | KETUA PUSAT STUDI KONSTITUSI/WAKIL DEKAN FH UNNES | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 158 | AKADEMISI | PROF DR EDY SUANDI HAMID, M.EC | REKTOR UWM | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 159 | AKADEMISI | PROF. DR. SIGIT RIYANTO, S.H., LL.M | DEKAN FAKULTAS HUKUM UGM | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 160 | AKADEMISI | DR. WAWAN MAS'UDI S.IP., M.A.P | DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UGM | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 161 | AKADEMISI | KUSKRIDHO AMBARDI, PH. D | DOSEN KOMUNIKASI UGM | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 162 | AKADEMISI | DR. TAKDIR ALI UKTI, S.SOS., M.SI | DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 163 | AKADEMISI | ABDUL GAFFAR KARIM, PH. D | DOSEN DPP FISIPOL UGM | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 164 | MEDIA MASSA | XXX | XXX | TIDAK | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 165 | MEDIA MASSA | DRS.H. HUDONO,S.H | WAKIL PIMPINAN REDAKSI KORAN MERAPI/KETUA PWI DIY | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 166 | MEDIA MASSA | DRS. OCTO LAMPITO, M. PD | PIMRED KORAN KEDAULATAN RAKYAT | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 167 | MEDIA MASSA | ANTON WAHYU PRIHARTONO | PIMRED HARIAN JOGJA | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 168 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | KH. AHMAD MUWAFIQ (GUS MUWAFIQ) | PENCERAMAH | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 169 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | M BUSYRO MUQODDAS | KETUA PP MUHAMMADIYAH BID. HUKUM | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 170 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 171 | AKADEMISI | DR. RER.POL. MADA SUKMAJATI, MPP | KETUA PRODI POLITIK & PEMERINTAHAN FISIPOL UGM | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 172 | LSM/NGO | TRI WAHYU | DIREKTUR ICM (INDONESIA COURT MONITORING) | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |

LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 173 | LSM/NGO | TITOK HARIYANTO | DIREKTUR ALTERASI | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 174 | LSM/NGO | ISTIATUN | DIREKTUR MITRA WACANA | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 175 | LSM/NGO | YOGI ZUL FADHLI, S.H., M.H | DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 176 | THINK TANK / PUSAT STUDI | YURIS REZHA KURNIAWAN | PENELITI PUKAT UGM | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 177 | THINK TANK / PUSAT STUDI | DINA MARIANA | SENIOR RESEARCH IRE | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 178 | THINK TANK / PUSAT STUDI | DIAN NOESWANTARI, S.PI., M.P.A.A. | PENELITI PUSAT STUDI HAM UNIVERSITAS SURABAYA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 179 | THINK TANK / PUSAT STUDI | DR. AGUS MACHFUD FAUZI, S.A.G., M.SI. | AKADEMISI/PENGAMAT POLITIK SEKALIGUS KETUA PUSAT KAJIAN PERUBAHAN SOSIAL DAN MED | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 180 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 181 | AKADEMISI | DR. YUDI WIDAGDO HARIMURTI, S.H., M.H. | AKADEMISI/DOSEN HTN DI FH UNIV. TRUNOJOYO | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 182 | AKADEMISI | DR. RADIAN SALMAN, S.H., LL.M. | AKADEMISI HTN FH UNAIR | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 183 | THINK TANK / PUSAT STUDI | DR. HANANTO WIDODO, S.H., M.H. | KETUA PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 184 | AKADEMISI | DR. HUFRON, SH., MH | AKADEMISI/ DOSEN HTN SEKALIGUS KETUA PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FH UNTAG 1945 SURAB | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 185 | AKADEMISI | DR. VIETA IMELDA CORNELIS, S.H., M.HUM. | AKADEMISI/DOSEN HTN DI UNIV DR SUTOMO SURABAYA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 186 | AKADEMISI | PROF. RAMLAN SURBAKTI, MA., PH.D | GURU BESAR DEPARTEMEN POLITIK FISIP UNAIR | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 187 | MEDIA MASSA | NOVILA WATI ANNISA S.S | PIMPINAN REDAKSI RADAR SURABAYA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 188 | MEDIA MASSA | YASIN AL RAVIRI | PRODUSER NEWS DI JAWA POS TV | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 189 | MEDIA MASSA | ABDUL ROKHIM | PEMRED JAWA POS TV | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 190 | MEDIA MASSA | IBNU YUNIANTO | PEMRED JAWA POS | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 191 | MEDIA MASSA | M. LUTFIL HAKIM | PEMRED KANALSATU.COM SEKALIGUS WAKIL KETUA PWI JATIM | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 192 | MEDIA MASSA | EBEN HAEZER PANCA PRASETYAWAN | JURNALIS HARIAN SURYA SEKALIGUS KETUA AJI SURABAYA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 193 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | MOH. ANSHORI, S.H., M.H. | KOORDINATOR JARINGAN ISLAM ANTI DISKRIMINASI | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 194 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | NATAEL HERMAWAN PRIANTO | TOKOH AGAMA SEKALIGUS KOORDINATOR JARINGAN ISLAM ANTIDISKRIMINASI SEKALIGUS KETU | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 195 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 196 | AKADEMISI | DR. ROSA RISTAWATI, S.H., LL.M. | AKADEMISI/DOSEN HTN FH UNAIR | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 197 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | IRYANTO SUSILO | TOKOH LINTAS AGAMA/GUSDURIAN/KETUA ROEMAH BHINEKA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 198 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | MEIMURA | BUDAYAWAN/ KETUA TEATER RAGIL SURABAYA/ SANGGAR ANAK MERDEKA INDONESIA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |

LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| 199 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | TAUFIK HIDAYAT/CAK MONYONG | BUDAYAWAN SEKALIGUS KETUA DKJ JATIM | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 200 | LSM/NGO | IMADOEDDIN, S.SOS, M.SI | KETUA KOMISI INFORMASI JAWA TIMUR | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 201 | LSM/NGO | UMAR SOLAHUDDIN | KETUA PARLIAMENT WATCH JATIM SEKALIGUS AKADEMISI/DOSEN UWKS | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 202 | LSM/NGO | ABDUL WAHID HABIBULLAH, S.H., M.HUM. | DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SURABAYA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 203 | AKADEMISI | PROF. DR. M. NOOR HARISUDIN, M.FIL.I | DEKAN FAKULTAS UIN KH. AHMAD SIDDIQ JEMBER | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 204 | AKADEMISI | DR. SUKARDI SH., MH. | AKADEMISI/DOSEN HTN DI FH UNAIR | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 205 | AKADEMISI | AIRLANGGA PRIBADI KUSMAN, S.IP., M.SI | DOSEN (PENGAMAT POLITIK) UNIVERSITAS AIRLANGGA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 206 | AKADEMISI | PROF. DR. KACUNG MARIJAN, M.A., PH.D. | GURU BESAR FISIP UNAIR | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 207 | AKADEMISI | HAIDAR ADAM, SH., LL.M. | DOSEN PAKAR HTN UNIVERSITAS AIRLANGGA | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 208 | AKADEMISI | DR. CATUR WIDO HARUNI, SH., M.SI., M.HUM | AKADEMISI HTN/ WADEK BIDANG 1 AKADEMIK UMM | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 209 | AKADEMISI | DR. MUHAMMAD ALI SAFA'AT, SH., MH. | DEKAN FH UNIV BRAWIJAYA | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 210 | AKADEMISI | DR. AAN EKO WIDIARTO, SH., M.HUM. | DOSEN TETAP/WAKIL DEKAN UMUM DAN KEUANGAN FH UB | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 211 | MEDIA MASSA | MAHMUDAN | WAPEMRED RADAR MALANG | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 212 | MEDIA MASSA | YATIMULAINUN | PEMRED INDONESIA TIMES MALANG | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 213 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DR. SIHABUDIN, SH., MH. | TOKOH AGAMA/WAKIL KETUA PDM MALANG | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 214 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DRS. IMRON ROSYADI HAMID, S.E., M.SI. | TOKOH ISLAM SEKALIGUS REKTOR UNIRA | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 215 | THINK TANK / PUSAT STUDI | SUTOMO | KETUA AVEROUS | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 216 | LSM/NGO | JANWAN TARIGAN | KEPALA DIVISI RISET DAN INFORMASI MCW | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 217 | LSM/NGO | FAHASA | KETUA PATTIRO | YA | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
| 218 | AKADEMISI | DR. MAHENDRA PUTRA KURNIA, SH, MH | DEKAN FH UNMUL/DOSEN | YA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 219 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 220 | AKADEMISI | DR.H.MUHAMMAD NOOR, M.SI | DOSEN/DEKAN FISIP UNMUL | YA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 221 | MEDIA MASSA | JAHRUNI | JURNALIS/PEMRED TEPIAN TV | YA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 222 | MEDIA MASSA | DESMAN MINANG ENDIANTO, S.HI, MH | DIREKTUR/ PEMRED KORAN KALTIM | YA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 223 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | MUHADI SUCIPTO, ST | WIRASWASTA (PLT.KETUA PEMUDA MUHAMMADIYAH KALTIM) | YA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 224 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | ABRAHAM INGAN | WIRASWASTA (KETUA UMUM GEPAK KALIMANTAN) | YA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |



LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------|
| 225 | LSM/NGO | TRI RAHARJO, MM | ASN/GURU (KETUA/GUBERNUR LIRA KALTIM) | YA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 226 | LSM/NGO | PRADARMA RUPANG | WIRASWASTA (KETUA JATAM KALTIM) | YA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 227 | THINK TANK / PUSAT STUDI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 228 | AKADEMISI | PROF.DR. H. MUJIBURRAHMAN. M.A | REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 229 | AKADEMISI | PROF. DR. H. M. HADIN MUHJAD, S.H, M. HU | DOSEN | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 230 | AKADEMISI | DR. TAUFIK ARBAIN. S.SOS.M.SI | DOSEN FISIP ULM | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 231 | MEDIA MASSA | BUDI ISMANTO. S.H | JURNALIS PIMPINAN REDAKSI APAHABAR.COM | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 232 | MEDIA MASSA | RASIDI S.SOS A.M.P | REDAKTUR | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 233 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DRS. DARUI QUTHNI M,H | KETUA PENGELOLA MASJID SABILAL MUHTADIN | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 234 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | IRWAN SYAHRUJI | WIRASWASTA | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 235 | LSM/NGO | ABDANI SOLIHIN, SP.D | DIRTEKTUR LK3 BANJARMASIN | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 236 | LSM/NGO | M. FIRHANSYAH S.H. | KEPALA KEASISTENAN PEMERIKSA | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 237 | THINK TANK / PUSAT STUDI | AHMAD FIKRI HADIN, S.H.LLM | DOSEN | YA | KOTA BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 238 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA DENPASAR | BALI |
| 239 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA DENPASAR | BALI |
| 240 | AKADEMISI | GEDE INDRA PRAMANA, S. IP, M. A | DOSEN FISIP PRODI ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDA YANA | YA | KOTA DENPASAR | BALI |
| 241 | MEDIA MASSA | MOHAMAD RIDWAN, S. PD. | JURNALIS REDAKSI PELAKSANA | YA | KOTA DENPASAR | BALI |
| 242 | MEDIA MASSA | SYAM KELILAUW, SH | PEMIMPIN REDAKSI SANUR POST BALI | YA | KOTA DENPASAR | BALI |
| 243 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | XXX | XXX | TIDAK | KOTA DENPASAR | BALI |
| 244 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | A. A. S. MIRAH MAHASWARI, S. IP., M. SC | DOSEN FISIP PRODI ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDA YANA BALI | YA | KOTA DENPASAR | BALI |
| 245 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | KOTA DENPASAR | BALI |
| 246 | LSM/NGO | A. A. G. A. NGURAH WIDNYANA, S. ST | DOSEN JURUSAN ELEKTRO DI POLITEKNIK NEGERI BALI | YA | KOTA DENPASAR | BALI |
| 247 | THINK TANK / PUSAT STUDI | SANG GEDE PURNAMA S. KM., M. SC | DOSEN UNIVERSITAS UDA YANA BALI | YA | KOTA DENPASAR | BALI |
| 248 | AKADEMISI | DR.HJ.SALMA.M.HI | DOSEN IAIN | YA | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 249 | AKADEMISI | PROF. DR. RONALD MAWUNTU, SH, MH, MTH | DOSEN FAK . HUKUM, KETUA UMUM LEMBAGA ADAT MINAHASA UTARA DAN KETUA MKGR SULUT | YA | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 250 | AKADEMISI | TOAR PALLILINGAN, SH, MH | WAKIL DEKAN III FAKULTAS HUKUM USRAT | YA | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 251 | MEDIA MASSA | IRFAN SEMBENG SH | WARTAWAN | YA | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 252 | MEDIA MASSA | XXX | XXX | TIDAK | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 253 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DRS.H.ANWAR SANDIA | PENSIUNAN | YA | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |



LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| 254 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | PDT. DR.S. JOHAN MANAMPING, S.TH | PENDETA GMIM | YA | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 255 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 256 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 257 | THINK TANK / PUSAT STUDI | DR. FERRY LIANDO, S.IP, M.SI | DOSEN FISIP UNSRAT, WASEKJEN PP AIPI | YA | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA |
| 258 | AKADEMISI | ARIEF WICAKSONO, MA | DEKAN FISIPOL UNIBOS MAKASSAR | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 259 | AKADEMISI | ANDI LUHUR PRIANTO, S.IP, M.SI | DOSEN FISIPOL UNISMUH MAKASSAR | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 260 | AKADEMISI | PROF. DR. AMINUDIN ILMAR, S.H., M.H | KETUA DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 261 | AKADEMISI | DR.FIRDAUS MUHAMMAD, M.A | DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI IAIN MAKASSAR | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 262 | AKADEMISI | DR. RAHMAT MUHAMMAD, M.SI | KETUA PRODI S2 SOSIOLOGI UNHAS | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 263 | AKADEMISI | PROF.DR.ARMIN, M.SI | DEKAN FISIPOL UNHAS MAKASSAR | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 264 | MEDIA MASSA | SUBHAN YUSUF, S.SOS., M.SI | JURNALIS RAKYATKU | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 265 | MEDIA MASSA | LUKMAN, S.K.M | PIMRED HARIAN RAKYAT SULSEL | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 266 | MEDIA MASSA | AHMAD SUDIRMAN KAMBI (A.S.KAMBI) | WAKIL PEMIMPIN REDAKSI TRIBUN TIMUR | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 267 | MEDIA MASSA | MUH.YUSUF A.R, S.A.G, M.IKOM | DIREKTUR FAJAR TV | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 268 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | ELLI OSCAR, S.PD.I, M.PD.I | KETUA PEMUDA MUHAMMADIYAH SULSEL | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 269 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DRG. ARDIANSYAH PAWINRU, SP.ORT (K) | KETUA MASICA ICMI SUL-SEL | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 270 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | H.A.FAHRY MAKKASAU, S.IP | PROFESIONAL/AHLI CAGAR BUDAYA | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 271 | LSM/NGO | SOEMITRO EMIN PRAJA, S.T., M.SI | WAKIL KETUA KNPI SUL-SEL | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 272 | LSM/NGO | SLAMET RIADI, S.S., MA | DIREKTUR ADVOKASI WALHI SULSEL | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 273 | LSM/NGO | SYAMSUL BAHRI S.SOS, M.SI | DIREKTUR INSTING INSTITUTE | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 274 | LSM/NGO | ARIANTO BURHAN MAKKA | KETUA GARDA NUSANTARA SULSEL | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 275 | LSM/NGO | HUSAENI, S.H., M.H., M.HUM. | PRESIDIUM NASIONAL KOALISI PEREMPUAN | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 276 | THINK TANK / PUSAT STUDI | ANDI AHMAD YANI, M.SI, MPA, M.SC | DIREKTUR LEMBAGA STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LSKP) | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 277 | THINK TANK / PUSAT STUDI | SANSANG, S.SI | DIREKTUR MASAGENA CENTER | YA | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 278 | AKADEMISI | DR. RUDI ROHI, S.H M.HUM | DOSEN FIFPOL UNDANA KUPANG | YA | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 279 | AKADEMISI | MIKAEL FEKA, SH, M.HUM | DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIKA KUPANG | YA | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 280 | AKADEMISI | PATER DR.PHILIPUS TULE, SVD | REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG | YA | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 281 | MEDIA MASSA | XXX | XXX | TIDAK | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 282 | MEDIA MASSA | MARTHEN BANA | WARTAWAN TIMOR EXPRESS KUPANG | YA | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 283 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | ROMO DR. VIDENTUS ATAWOLO, PR | PASTOR/TOGA | YA | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 284 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | PENDETA DR. YUDA D. HAWU HABA, S.TH, M. | PENDETA/TOGA | YA | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |

LANJUTAN...

| NO | KATEGORI | NARASUMBER | PROFESI | PUBLIKAS | KOTA | PROVINSI |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 285 | LSM/NGO | VINSEN BURENI, S.SOS | AKTIVIS LSM/ DIREKTUR BENGKEL APPEK NIT | YA | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 286 | LSM/NGO | VERONIKA ATA, SH, M.HUM | AKTIVIS LSM/KETUA LPA ANAK NTTDAN DIREKTRIS JUSTITIA KUPANG | YA | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 287 | THINK TANK / PUSAT STUDI | FRANS W. MUSKANAN, S.IP.M.SI | PENELITI | YA | KOTA KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 288 | AKADEMISI | DR. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.H. | DOSEN TATA NEGARA | YA | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 289 | AKADEMISI | DR. MARUDUD HASUGIAN, SH,MH | DOSEN FAKULTAS HUKUM UNCEN PAPUA | YA | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 290 | AKADEMISI | DR. SUPARTO IRIBARAM, S.SOS., M.A | DOSEN IAIN PAPUA | YA | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 291 | MEDIA MASSA | XXX | XXX | TIDAK | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 292 | MEDIA MASSA | SYAHRIANTO RUMAGIA | DIREKTUR MEDIA ONLINE HARIAN PAGI PAPUA | YA | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 293 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | SUDIN RETTOB | KETUA GPI PAPUA | YA | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 294 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | LATIFAH ANUM SIREGAR, SH,MH | DIREKTUR ALDP | YA | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 295 | LSM/NGO | FRITS B RAMANDAI, S.H., M.H | KEPALA KOMNAS HAM PAPUA | YA | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 296 | LSM/NGO | ABDUL MAJID RADA | KETUA LSM PMPRI PAPUA | YA | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 297 | THINK TANK / PUSAT STUDI | SEPTER MANUFANDU,S.PT, MH | KETUA JERAT PAPUA | YA | KOTA JAYAPURA | PAPUA |
| 298 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | AIDIL ICHLAS, SS | WARTAWAN/KETUA AJI PADANG | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 299 | MEDIA MASSA | HERANOF FIRDAUS, S.SOS | WARTAWAN/KETUA PWI SUMBAR | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 300 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DRS. H. JAPERI JARAB, MM | KETUA MUI KOTA PADANG, PENSIUNAN DEPAG, DOSEN | YA | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
| 301 | AKADEMISI | XXX | XXX | TIDAK | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 302 | AKADEMISI | WIJAYANTO PHD | DOSEN MAGISTER ILMU POLITIK | YA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 303 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | XXX | XXX | TIDAK | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 304 | AKADEMISI | DR. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, SH, MH, LLM | DOSEN HUKUM TATA NEGARA UGM | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 305 | AKADEMISI | DR.ABDUL JAMIL S.H.,M.H. | DEKAN FH UII | YA | KOTA JOGJAKARTA | DIY JOGJAKARTA |
| 306 | AKADEMISI | DR. ANDI MARYAM., M.KES | REKTOR UIT | YA | KOTA MAKASSAR | SULA WESI SELATAN |
| 307 | MEDIA MASSA | IMAM DZULKIFLI, S.KSI | PIMRED MATA MAROS. COM | YA | KOTA MAKASSAR | SULA WESI SELATAN |
| 308 | MEDIA MASSA | XXX | XXX | TIDAK | KOTA MAKASSAR | SULA WESI SELATAN |
| 309 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | SURATMAN KAYANO, S.KEP., M.SI | PENGURUS PW NU SUL-SEL | YA | KOTA MAKASSAR | SULA WESI SELATAN |
| 310 | LSM/NGO | XXX | XXX | TIDAK | KOTA MAKASSAR | SULA WESI SELATAN |
| 311 | LSM/NGO | NURYANTO, SH. | KETUA DPD JATIM SERIKAT PEKERJA NASIONAL | YA | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 312 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | PDT. MICHAEL WAHIDO, S.TH., M.TH | PENDETA | YA | KOTA MANADO | SULA WESI UTARA |
| 313 | TOKOH ORMAS/AGAMA/BUDAYAWAN | DRS.H ULYAS TAHA MPD | PNS | YA | KOTA MANADO | SULA WESI UTARA |

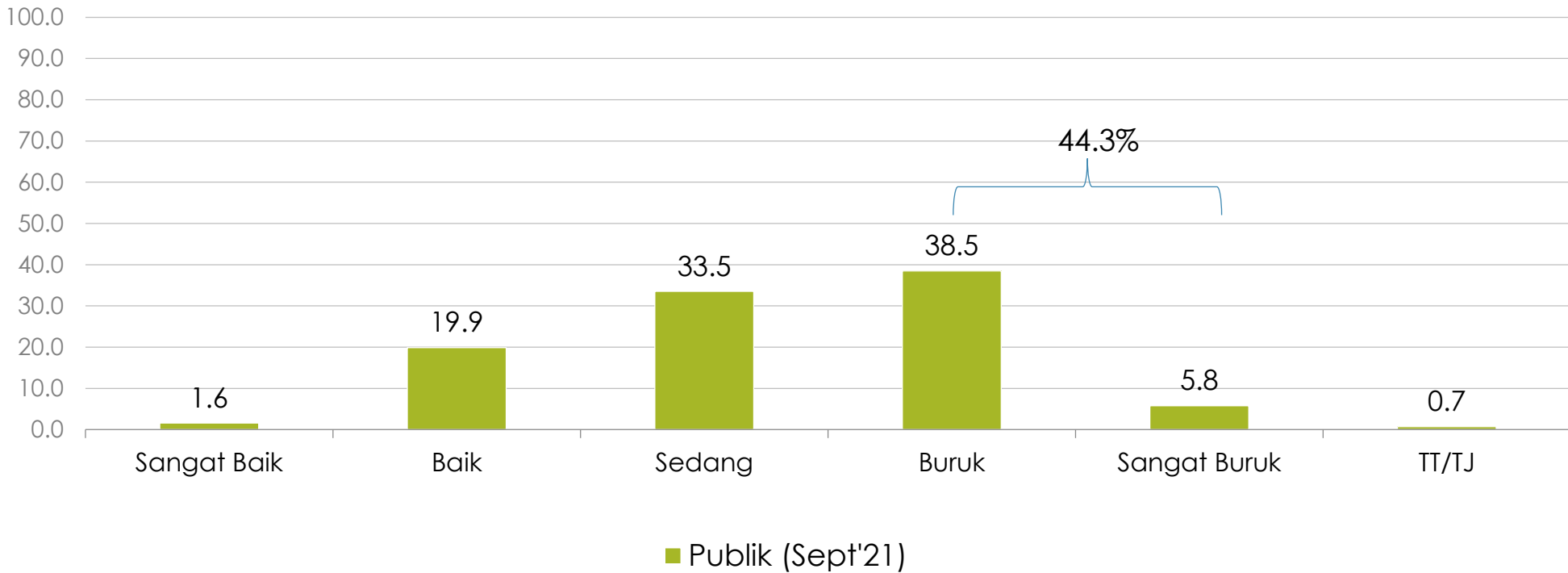


KONDISI UMUM



KONDISI EKONOMI NASIONAL

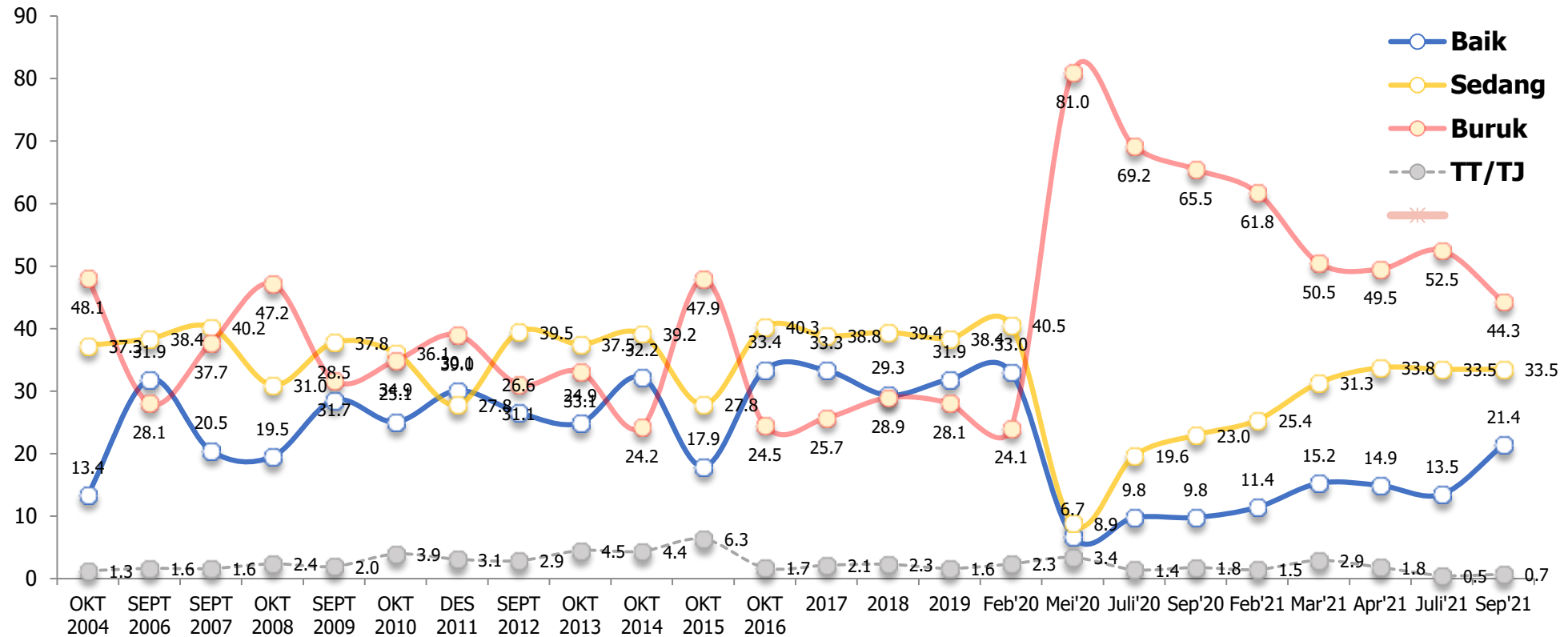
Bagaimana Ibu / Bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?... (%)



Kebanyakan publik menilai buruk/sangat buruk, 44.3%, keadaan ekonomi nasional.



TREN KONDISI EKONOMI NASIONAL

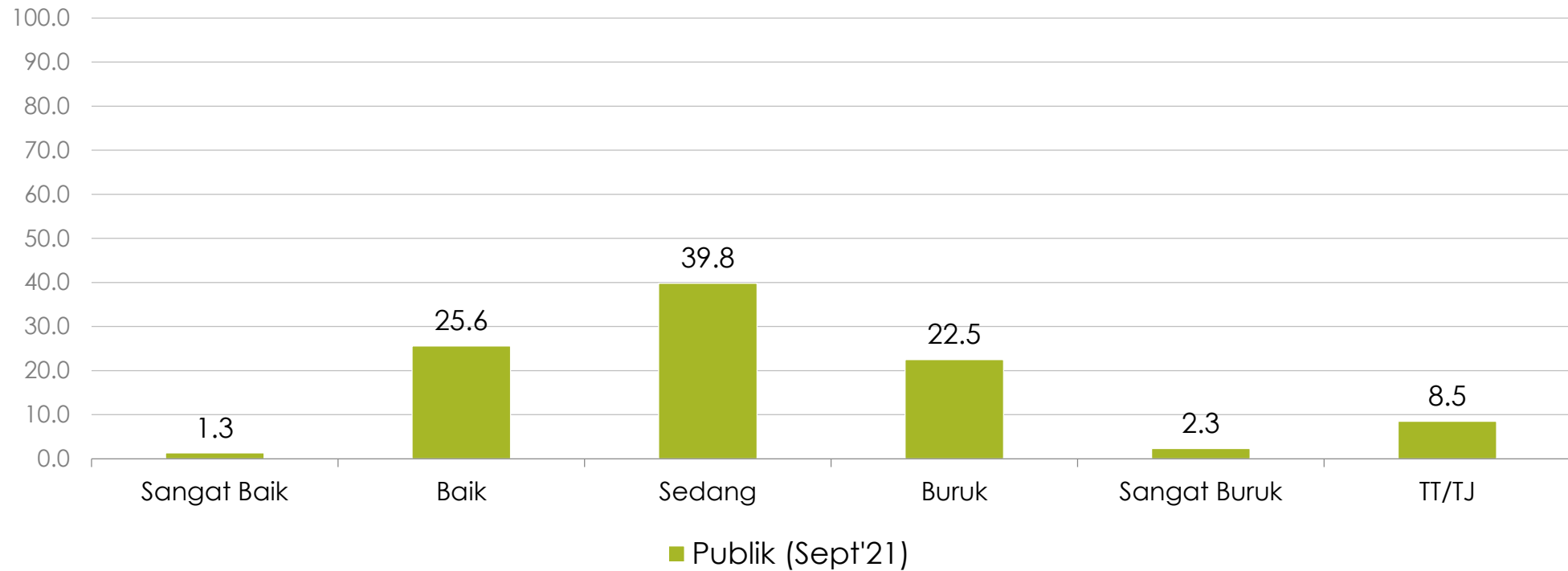


Persepsi terhadap kondisi ekonomi terburuk sejak tahun 2004. Namun dalam dua bulan terakhir, penilaian atas kondisi ekonomi nasional cenderung membaik, mereka yang menilai membaik naik.



KONDISI POLITIK NASIONAL

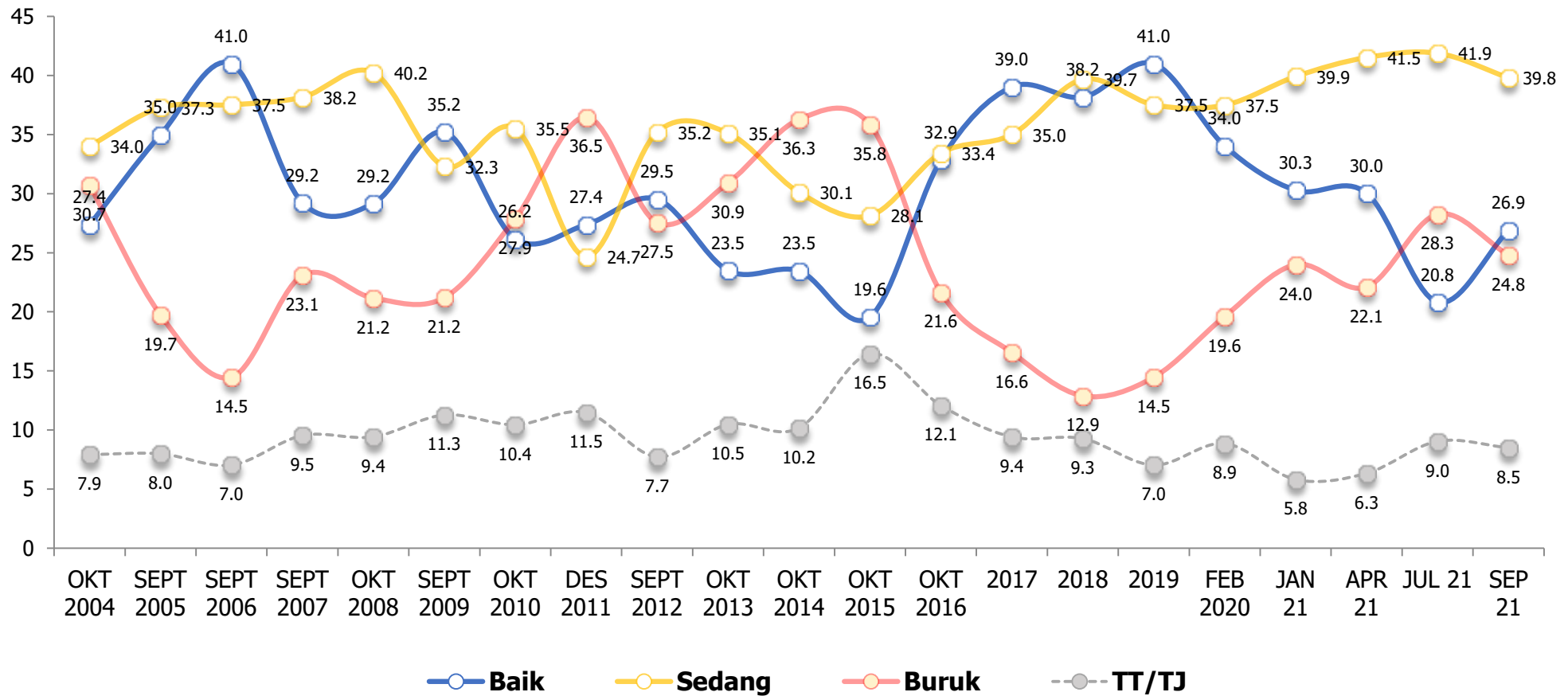
Bagaimana Ibu / Bapak melihat keadaan politik nasional pada umumnya sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?... (%)



Kebanyakan publik menilai sedang, 39.8%, keadaan politik nasional.



TREN KONDISI POLITIK NASIONAL

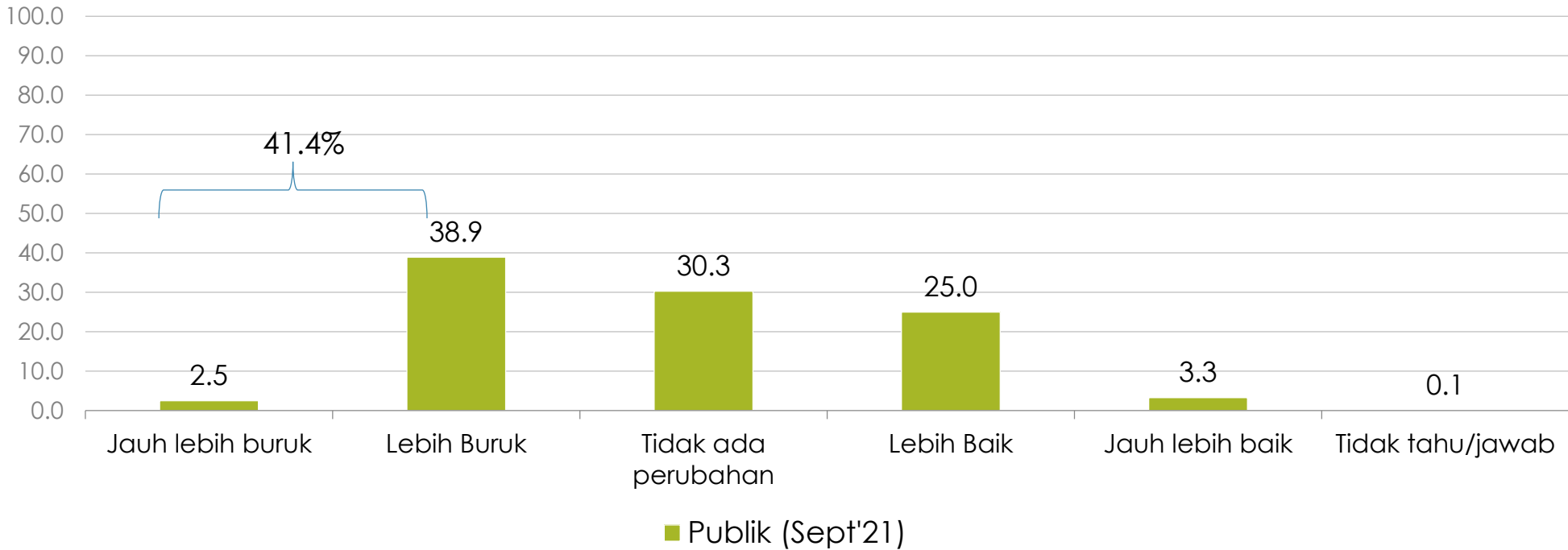


Kondisi politik membaik.



KONDISI EKONOMI RUMAH TANGGA DIBANDING TAHUN LALU

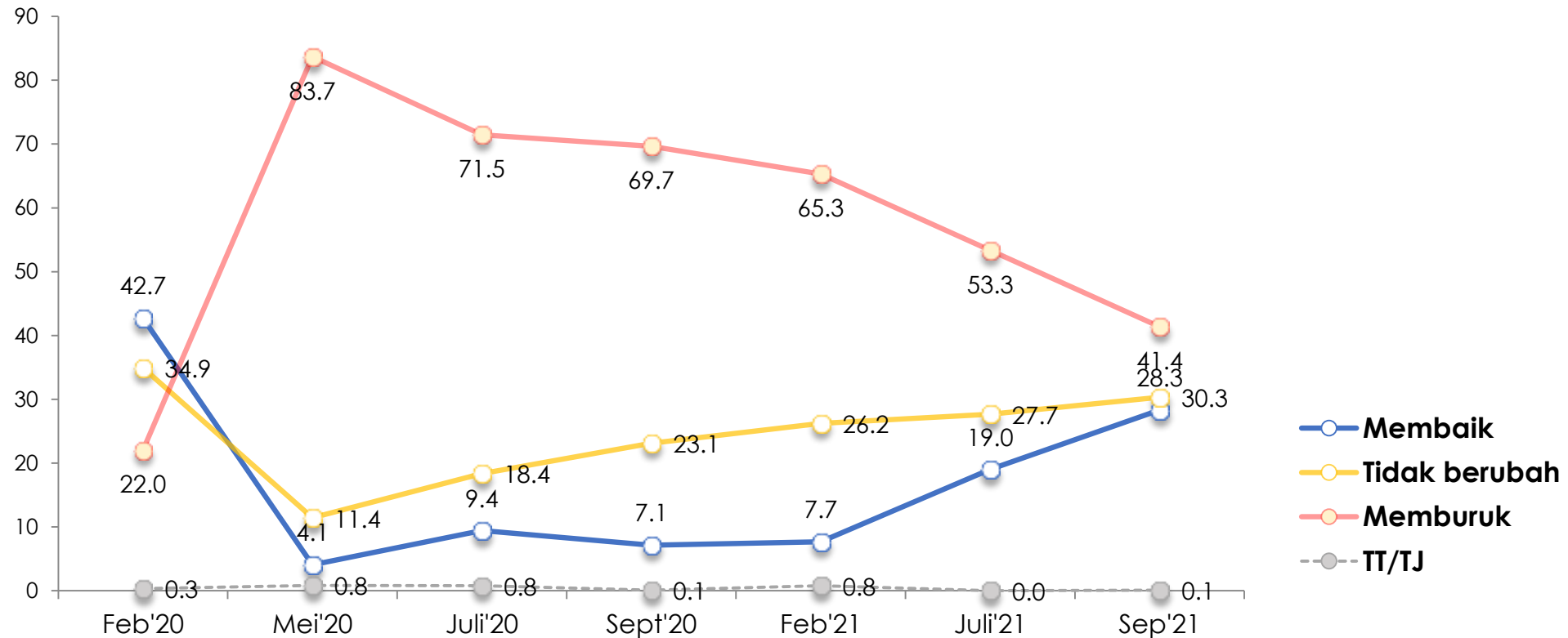
Apakah Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi RUMAH TANGGA Ibu/Bapak sendiri pada umumnya SEKARANG INI menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding TAHUN LALU?... (%)



Kebanyakan publik, 41,4%, menilai kondisi ekonomi rumah tangganya jauh lebih buruk/lebih buruk dibanding tahun lalu



TREN KONDISI EKONOMI RUMAH TANGGA SAAT INI



Kebanyakan publik masih merasa memburuk, tapi semakin menurun, yang menilai membaik meningkat.

TEMUAN

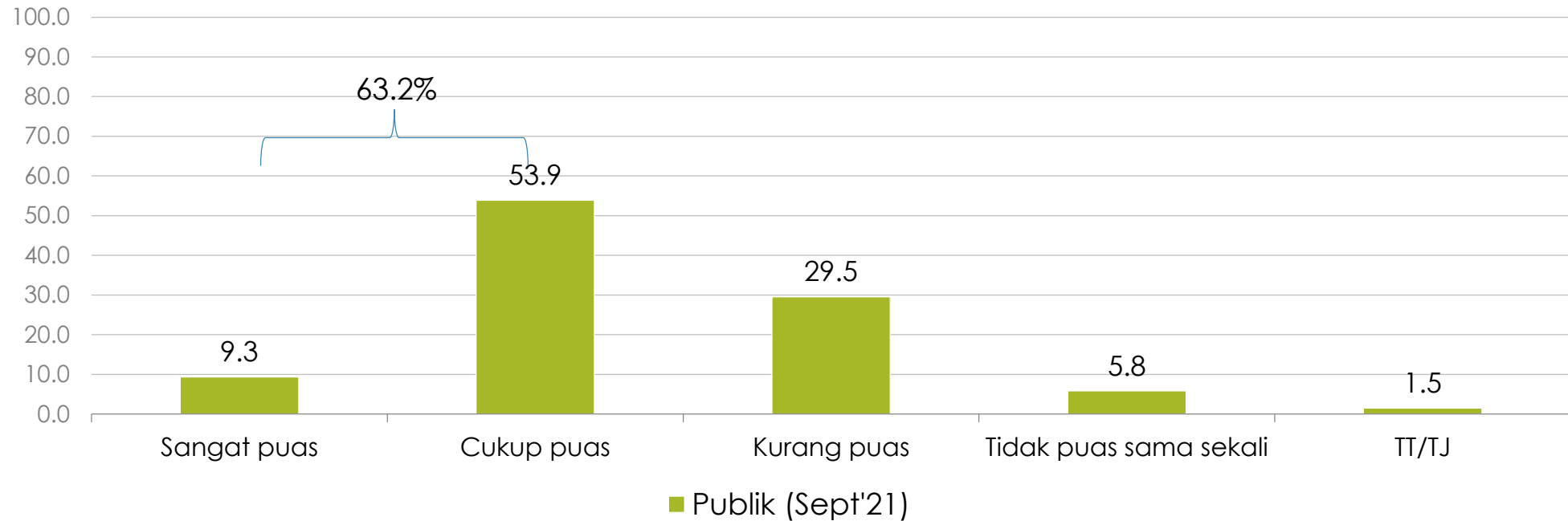
- Saat ini kebanyakan warga masih menilai buruk/sangat buruk, 44.3%, keadaan ekonomi nasional. Namun dalam dua bulan terakhir, penilaian atas kondisi ekonomi nasional cenderung membaik.
- Kebanyakan kondisi ekonomi rumah tangga juga masih dinilai jauh lebih buruk/lebih buruk dibanding tahun lalu. Namun dalam setahun terakhir yang menilai kondisi ekonomi rumah tangganya membaik cenderung meningkat.
- Sementara kondisi politik saat ini cenderung dinilai sedang.

EVALUASI KINERJA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

INDIKATOR

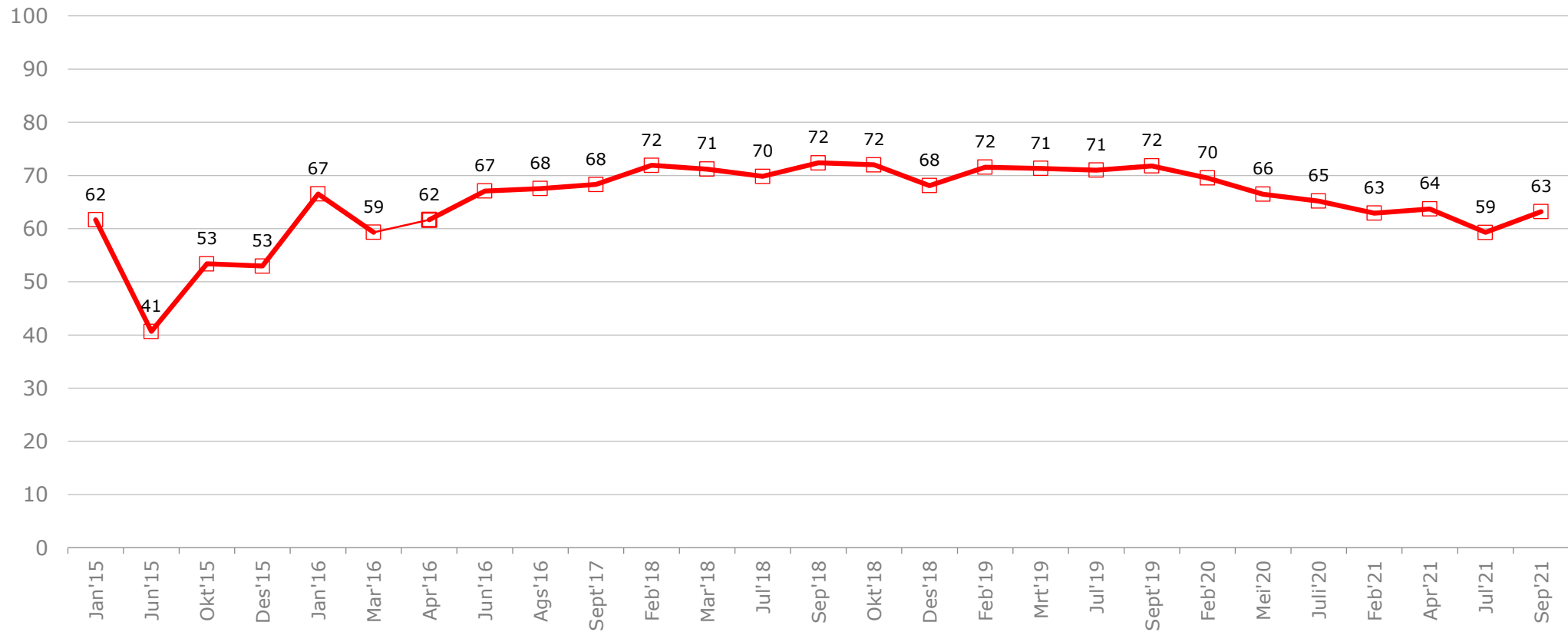
KINERJA PRESIDEN

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)?... (%)



Mayoritas publik, 63.2%, merasa sangat/cukup puas dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TREN KEPUASAN TERHADAP KINERJA PRESIDEN

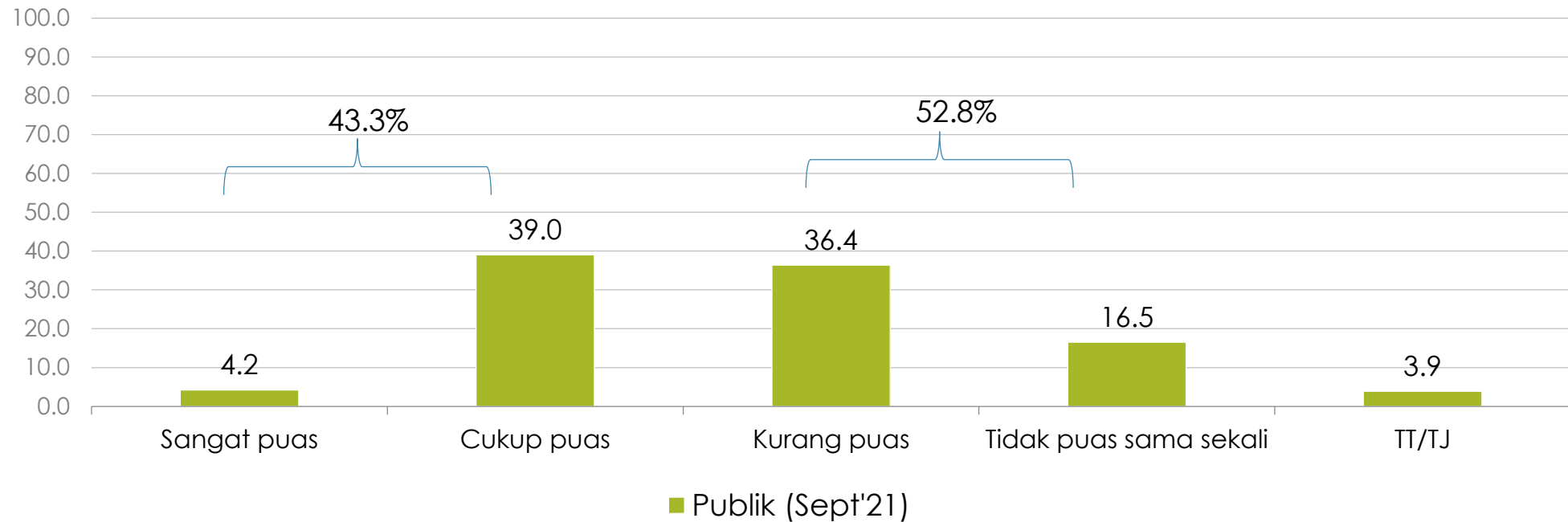


Ada sedikit peningkatan pada kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).



KINERJA WAKIL PRESIDEN

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin?... (%)



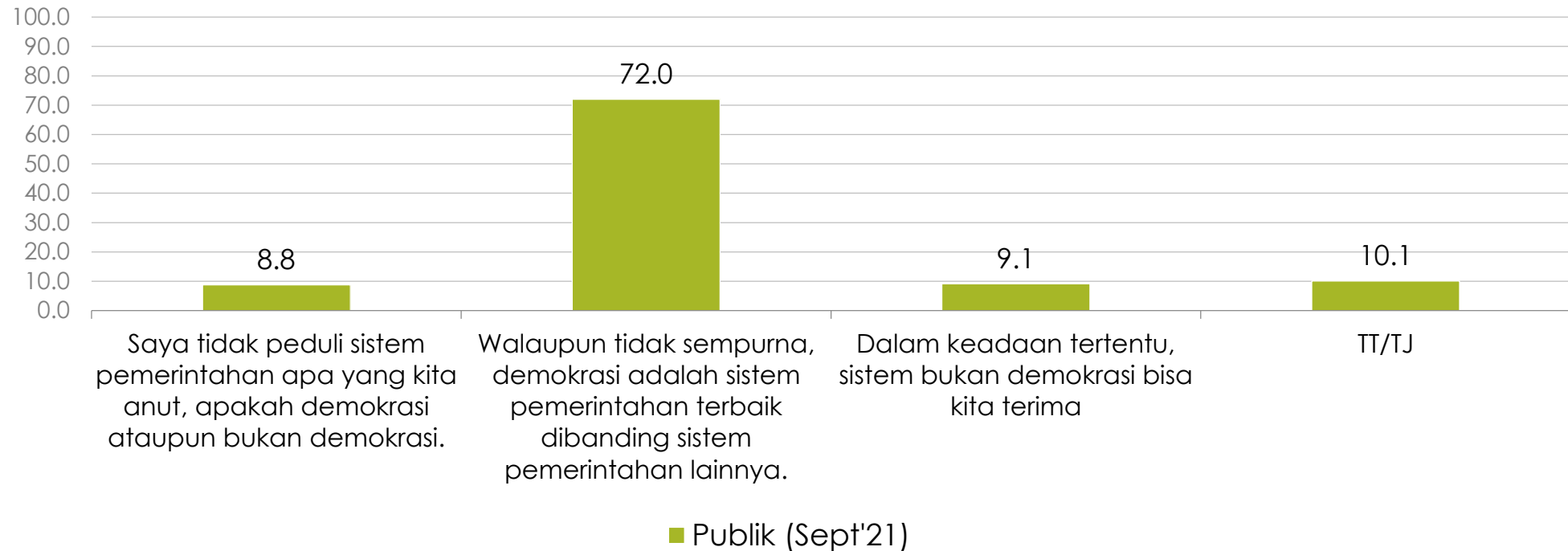
Mayoritas publik, 52.8%, kurang/tidak puas sama sekali dengan kerja Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.

SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI

INDIKATOR

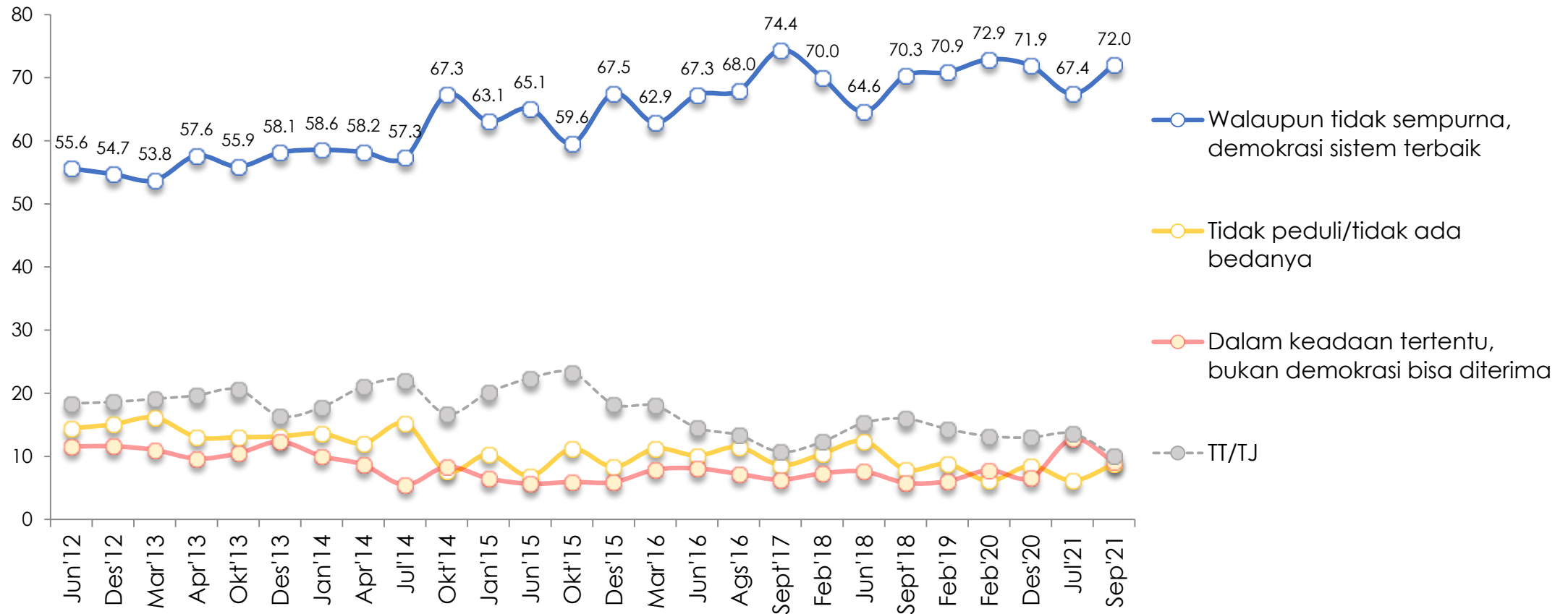
SISTEM PEMERINTAHAN

Menurut Ibu/Bapak mana di antara tiga pernyataan berikut yang paling mendekati pendapat Ibu/Bapak sendiri tentang sistem pemerintahan.... (%)



Mayoritas publik, 72%, menilai Walaupun tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dibanding sistem pemerintahan lainnya.

TREN DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN



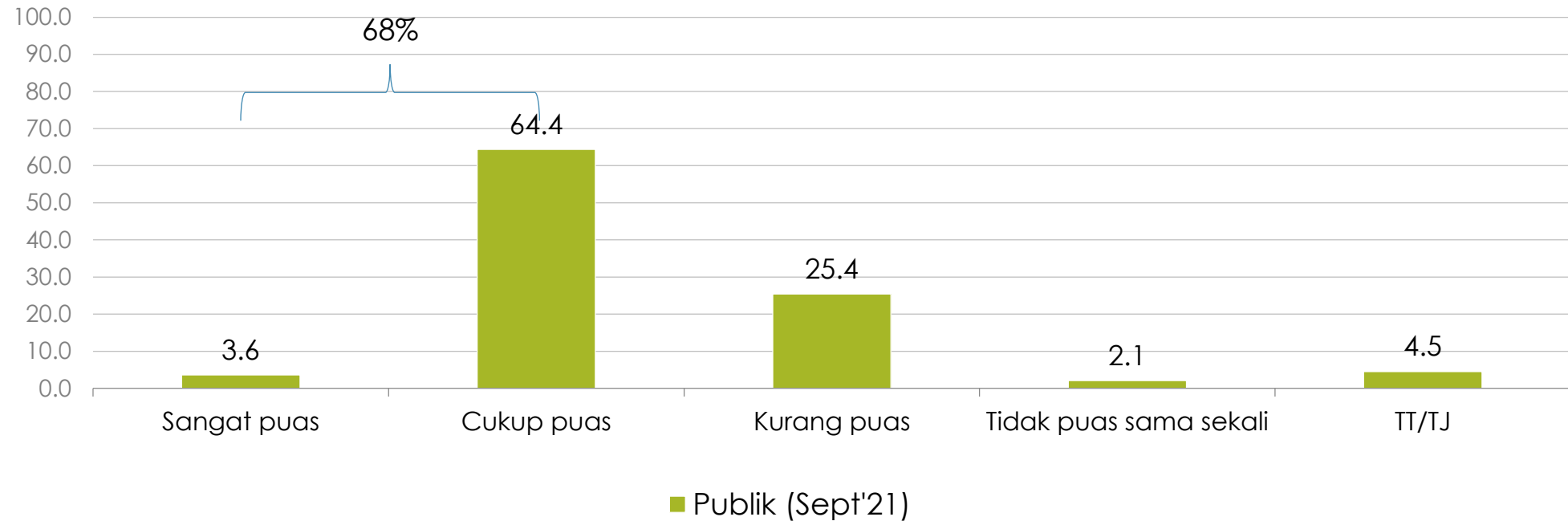
Sumber: Indikator, LSI, SMRC

Ada sedikit peningkatan dibanding dua bulan lalu.



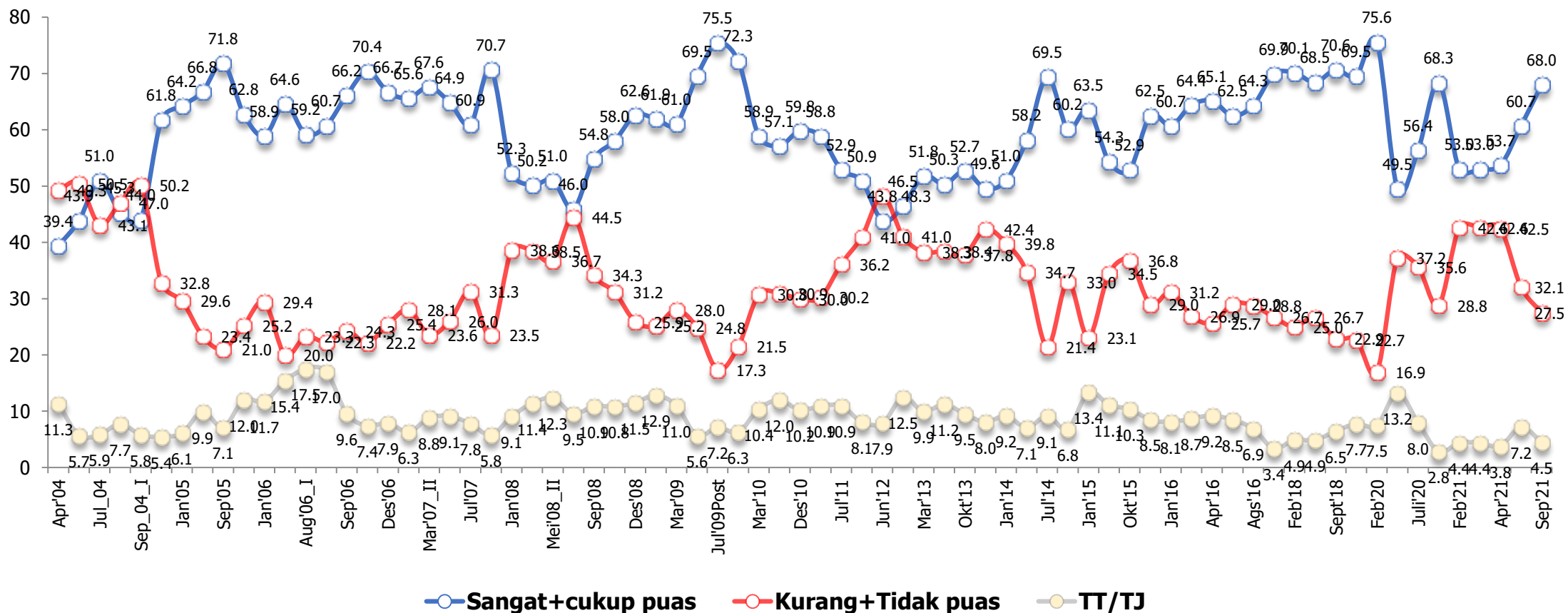
PELAKSANAAN PRAKTIK DEMOKRASI

Seberapa puas atau tidak puaskah Ibu/Bapak terhadap pelaksanaan atau praktik demokrasi di negara kita sejauh ini?... (%)



Mayoritas publik, 68%, merasa sangat/cukup puas terhadap pelaksanaan atau praktik demokrasi di negara kita.

TREN KEPUASAN ATAS KINERJA DEMOKRASI



Sumber: Indikator, LSI, SMRC

Ada kenaikan tingkat kepuasan, dan sebaliknya, penurunan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan demokrasi dalam setahun terakhir.



RENCANA AMANDEMEN UUD 1945

INDIKATOR

KESESUAIAN UUD 1945 UNTUK INDONESIA

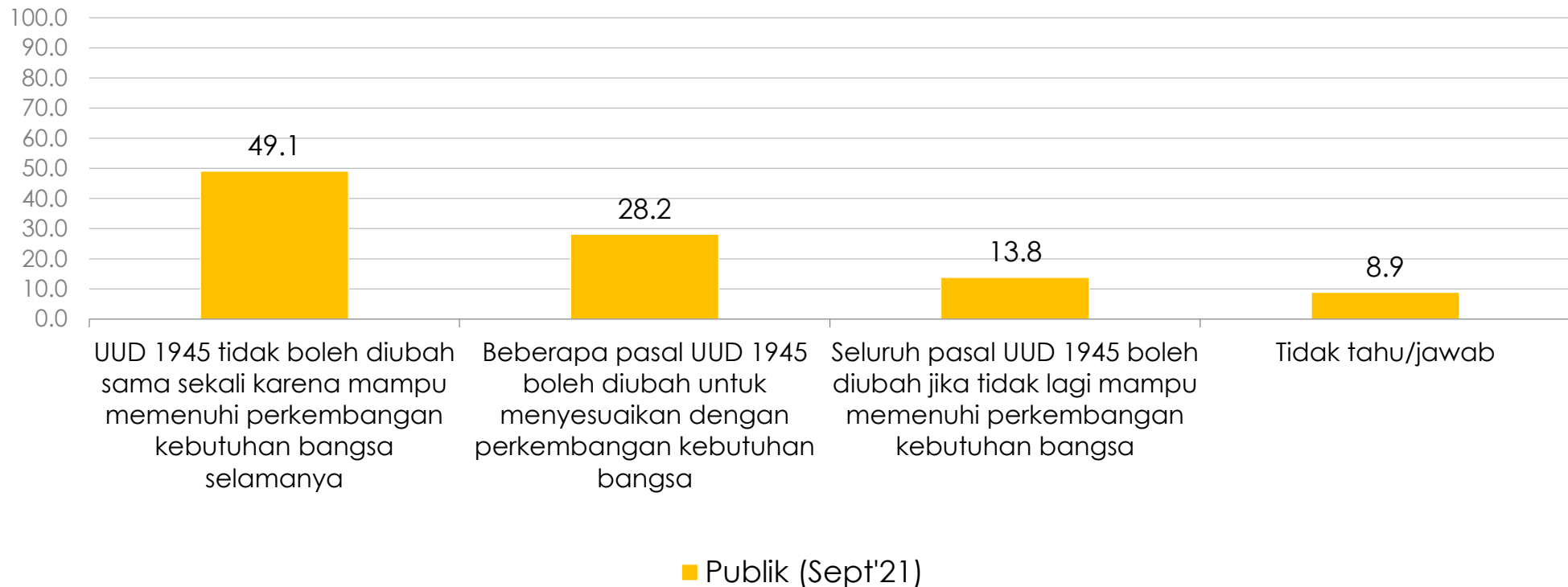
Ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 merupakan dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 tidak sesuai untuk Indonesia dan perlu diganti dengan dasar negara lain. Di antara pendapat tersebut, mana yang paling sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas publik, 88%, merasa UUD 1945 merupakan dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia.

UUD 1945 BOLEH DIUBAH?

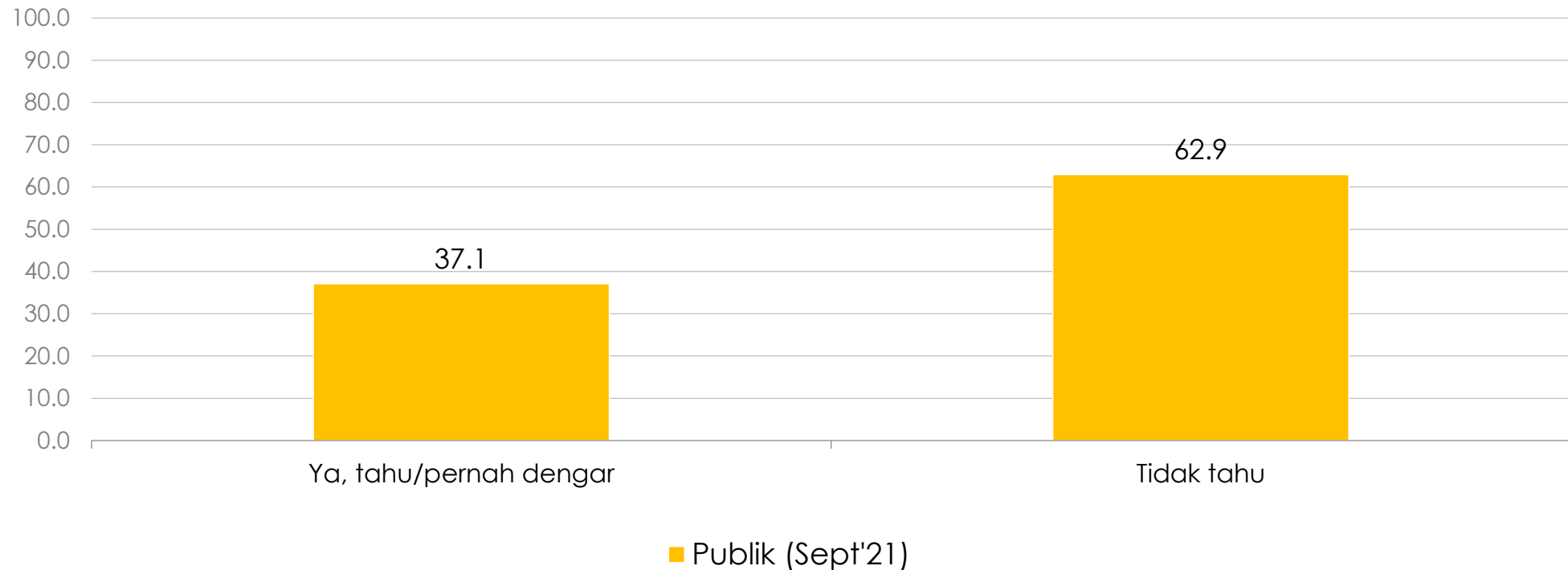
Di antara pendapat berikut, mana yang paling sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Kebanyakan publik, 49.1%, merasa UUD 1945 tidak boleh diubah sama sekali karena mampu memenuhi perkembangan kebutuhan bangsa selamanya. Dan sekitar 42% UUD 1945 boleh diubah untuk memenuhi kebutuhan bangsa, baik beberapa pasal saja (28.2%), maupun seluruhnya (13.8%).

UUD 1945 TELAH DIAMANDEMEN SEBANYAK 4 KALI

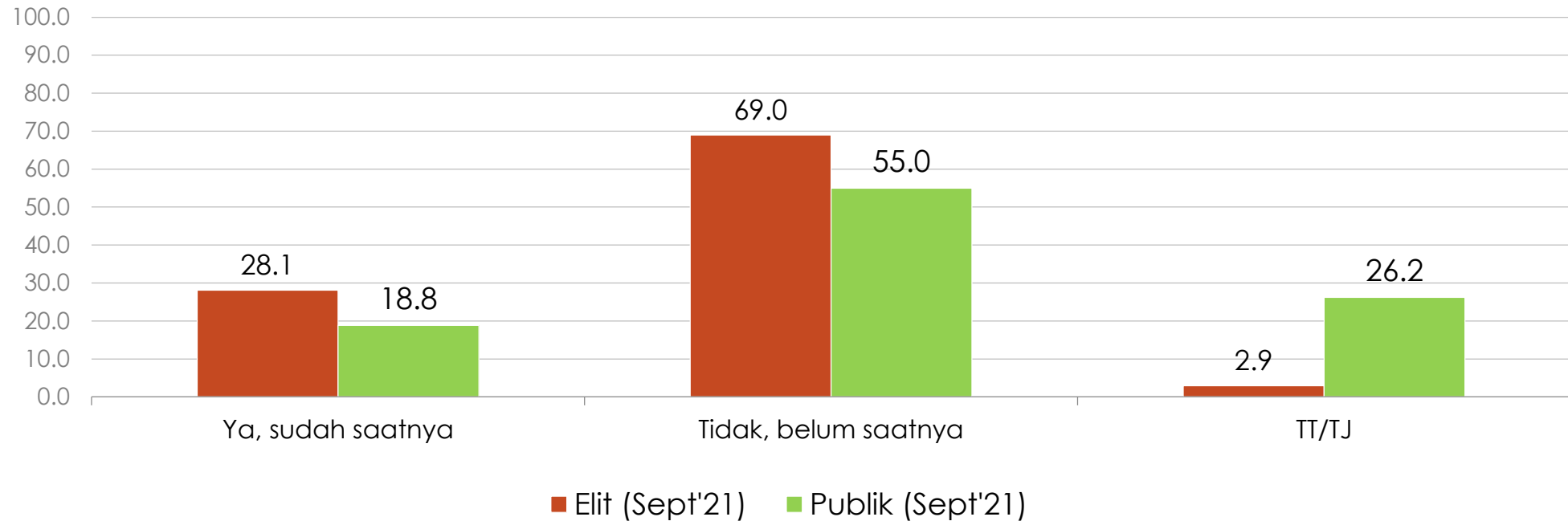
Sampai sekarang UUD 1945 telah diubah (diamandemen) sebanyak 4 kali. Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar tentang berita tersebut?... (%)



Sekitar 37.1% publik pernah mendengar/tahu bahwa Sampai sekarang UUD 1945 telah diubah (diamandemen) sebanyak 4 kali.

SEKARANG SUDAH SAATNYA MELAKUKAN AMANDEMEN UUD 1945

Menurut Ibu/Bapak, apakah sekarang sudah saatnya dilakukan kembali perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945?... (%)

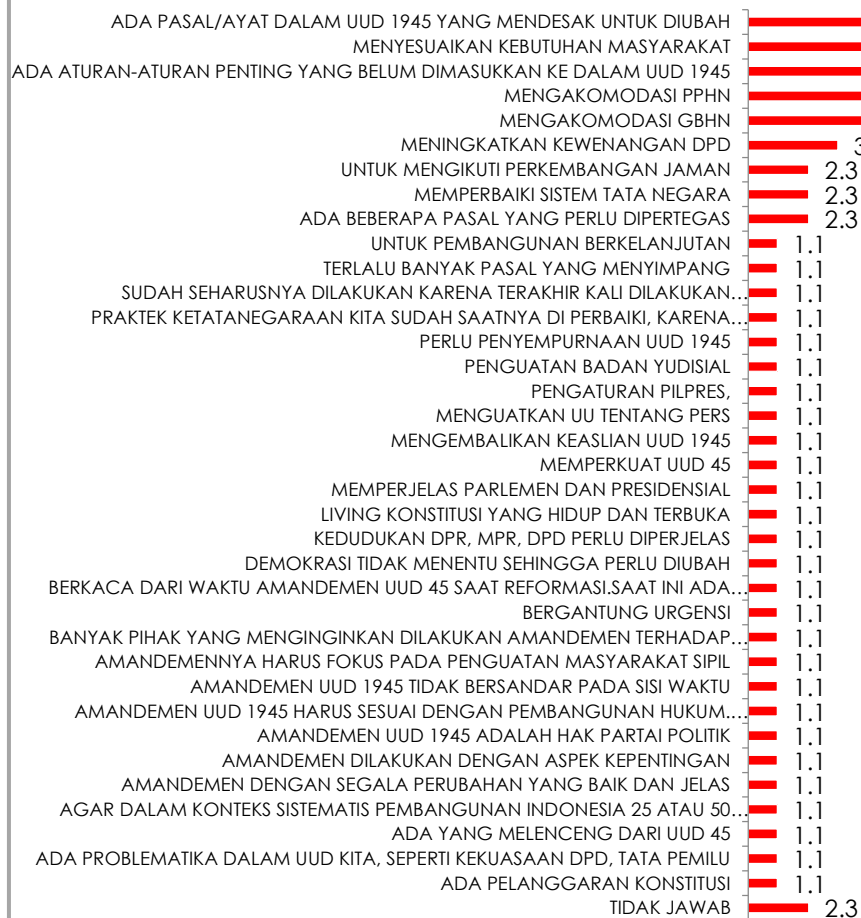


Mayoritas, 69%, elit menilai belum saatnya dilakukan kembali perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Di kalangan Publik mayoritas juga menilai belum saatnya, namun lebih rendah.

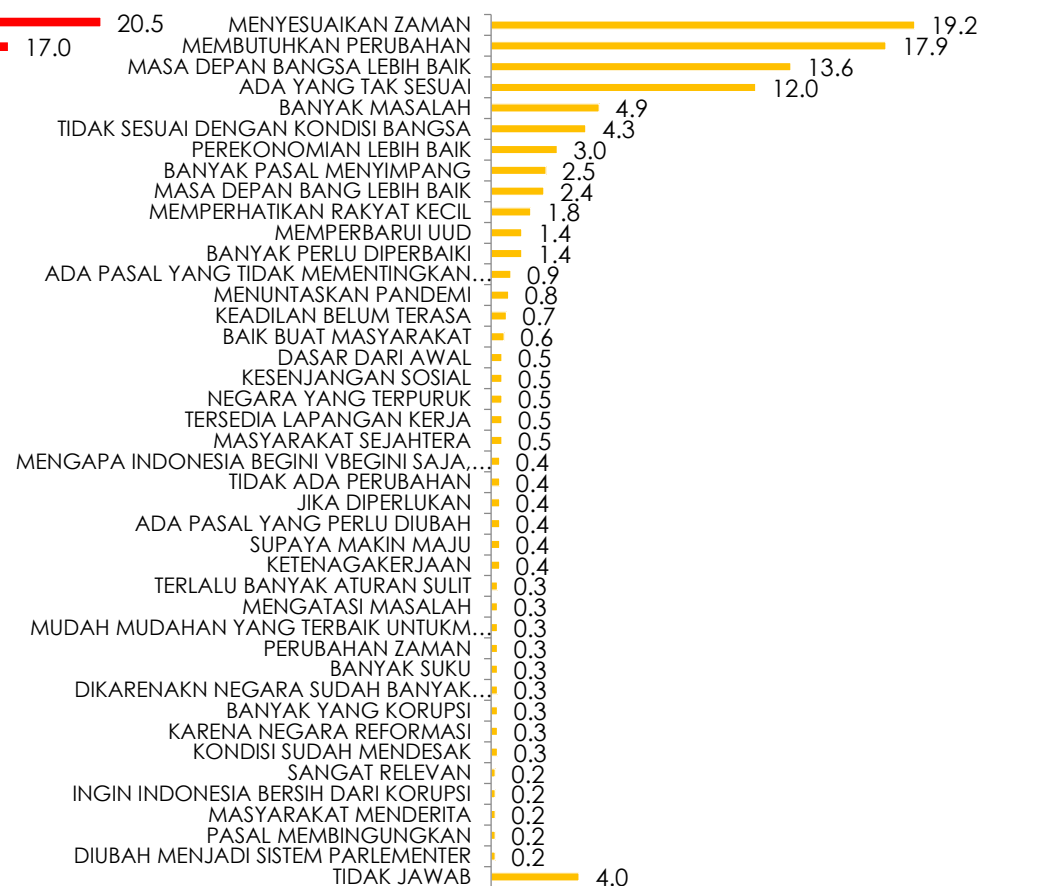
ALASAN SUDAH SAATNYA MELAKUKAN AMANDEMEN UUD 1945

Jika SUDAH saatnya, apa alasannya?... (%)

Elite



Publik

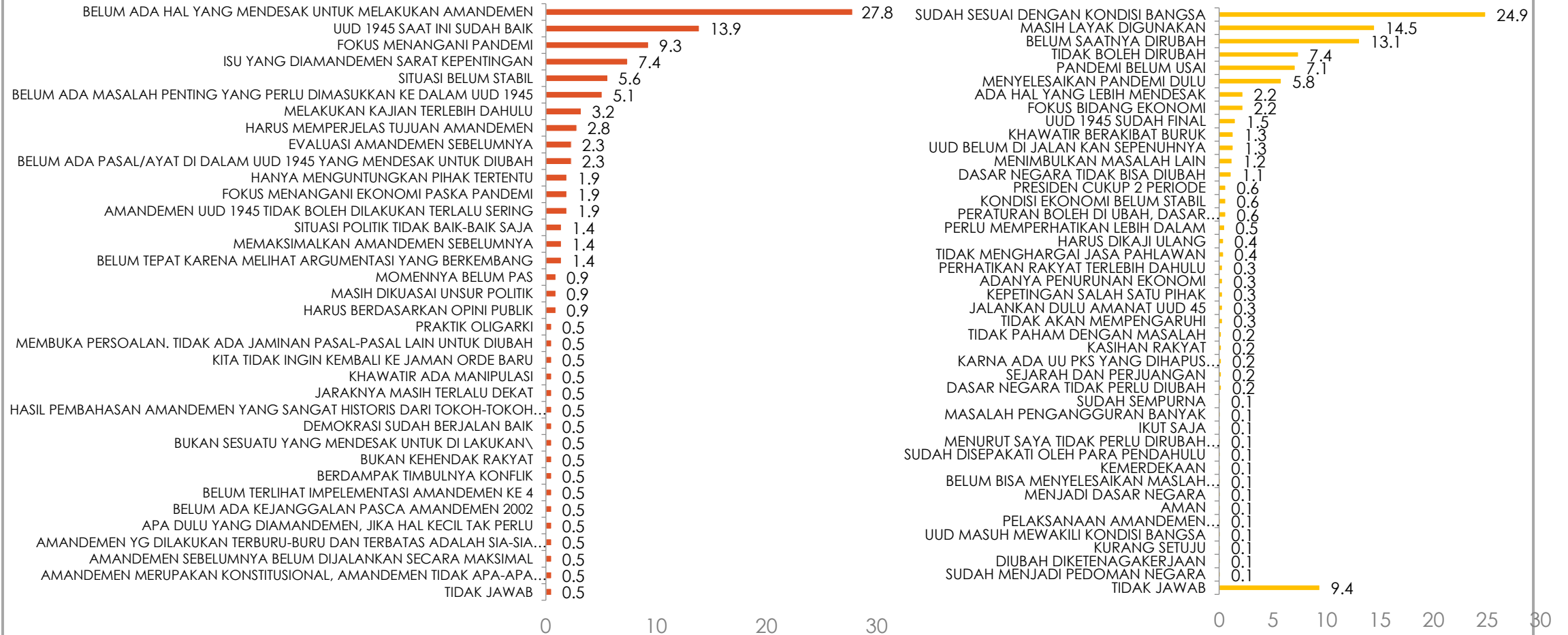


ALASAN BELUM SAATNYA MELAKUKAN AMANDEMEN UUD 1945

Elit

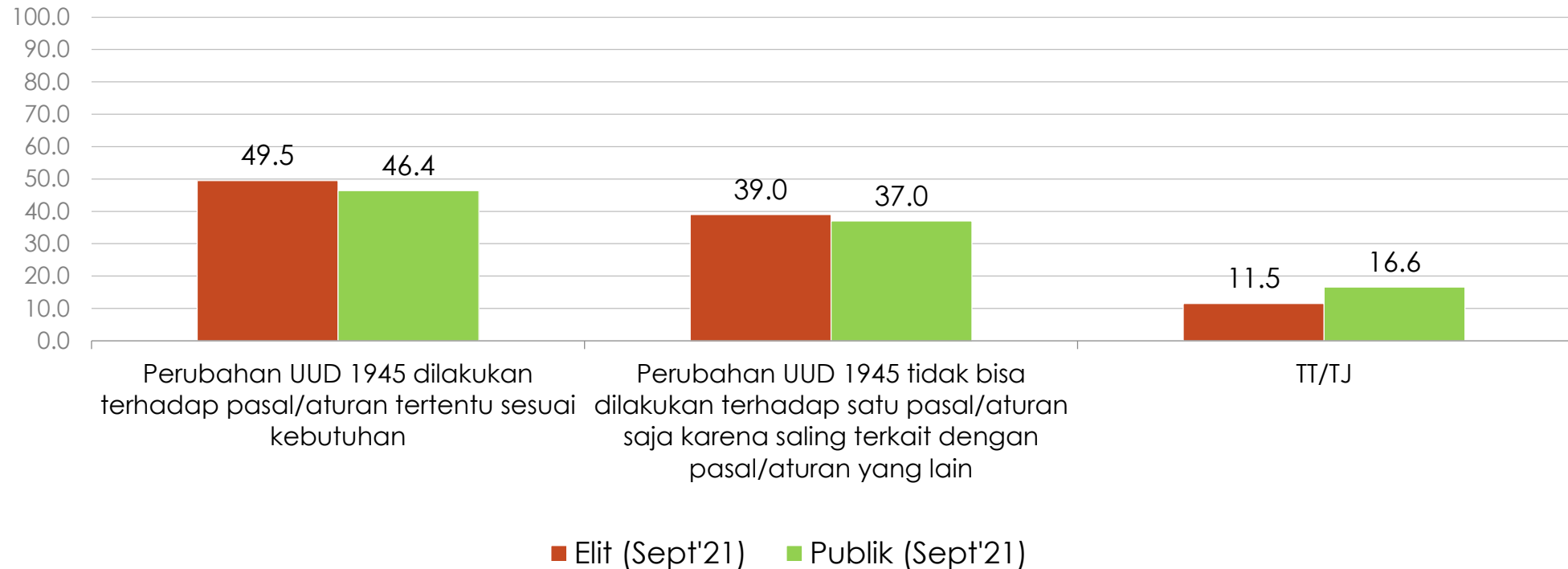
Jika BELUM saatnya, apa alasannya?... (%)

Publik



PERUBAHAN UUD 1945 DILAKUKAN TERHADAP PASAL/ATURAN TERTENTU SESUAI KEBUTUHAN TIDAK BISA DILAKUKAN TERHADAP SATU PASAL/ATURAN SAJA

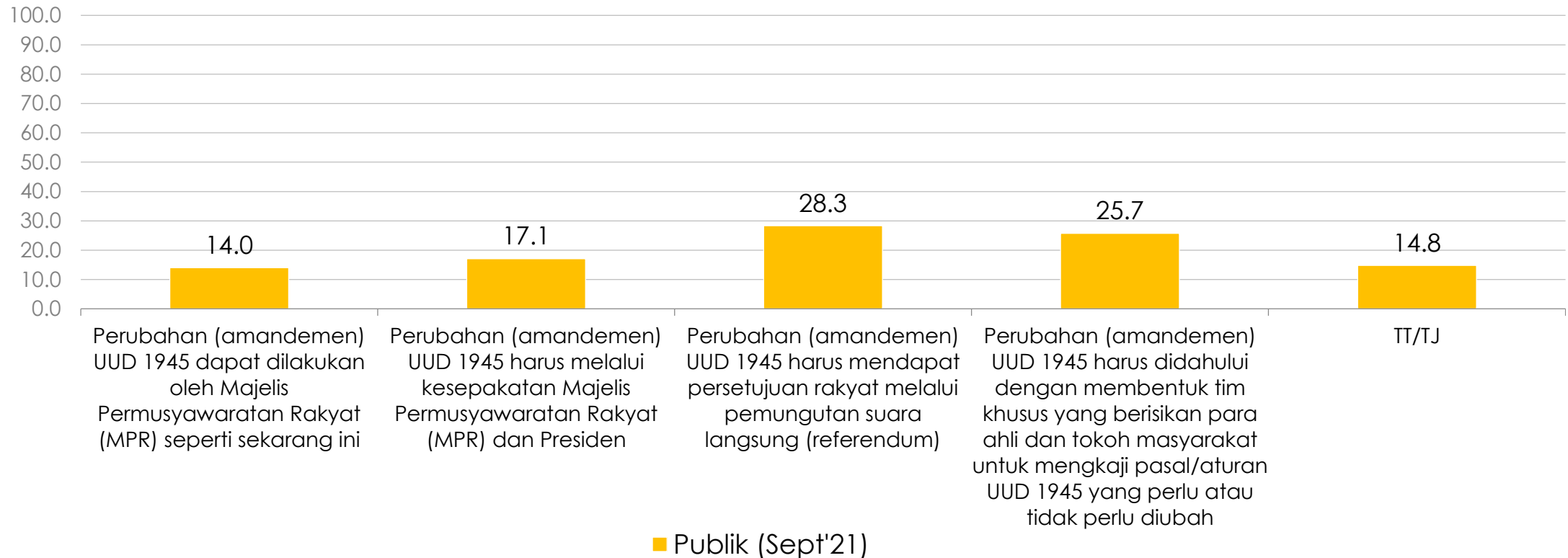
Jika perlu dilakukan kembali perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945, di antara dua pendapat berikut ini, mana yang paling sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Kebanyakan, 49.5%, elit menilai jika perlu dilakukan kembali perubahan (amandemen) maka perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap pasal/aturan tertentu sesuai kebutuhan. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun sedikit lebih rendah.

PROSES MELAKUKAN AMANDEMEN

Jika perlu dilakukan kembali perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945, di antara pendapat berikut mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)

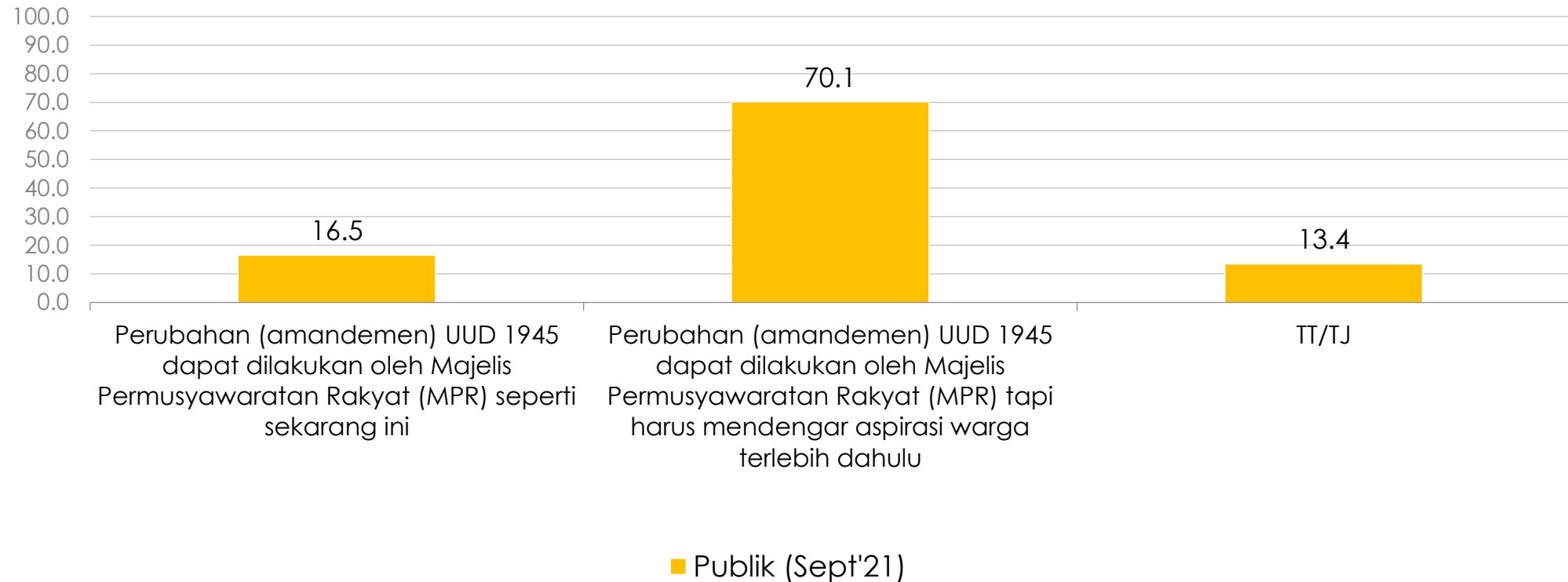


Tidak nampak kecenderungan yang solid terkait bagaimana UUD diamandemen, tapi sebagian besar publik lebih setuju jika amandemen harus mendapat persetujuan rakyat (28.3%) dan membentuk tim khusus yang berisikan para ahli dan tokoh masyarakat untuk mengkaji apa yang perlu diamandemen (25.7%).



AMANDEMEN UUD 1945 DAPAT DILAKUKAN MPR SEKERTI SEKARANG INI VS HARUS MENDENGAR ASPIRASI WARGA TERLEBIH DAHULU

Jika perlu dilakukan kembali perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945, di antara pendapat berikut mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas publik, 70.1%, menilai Perubahan (amandemen) UUD 1945 dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tapi harus mendengar aspirasi warga terlebih dahulu.



TEMUAN

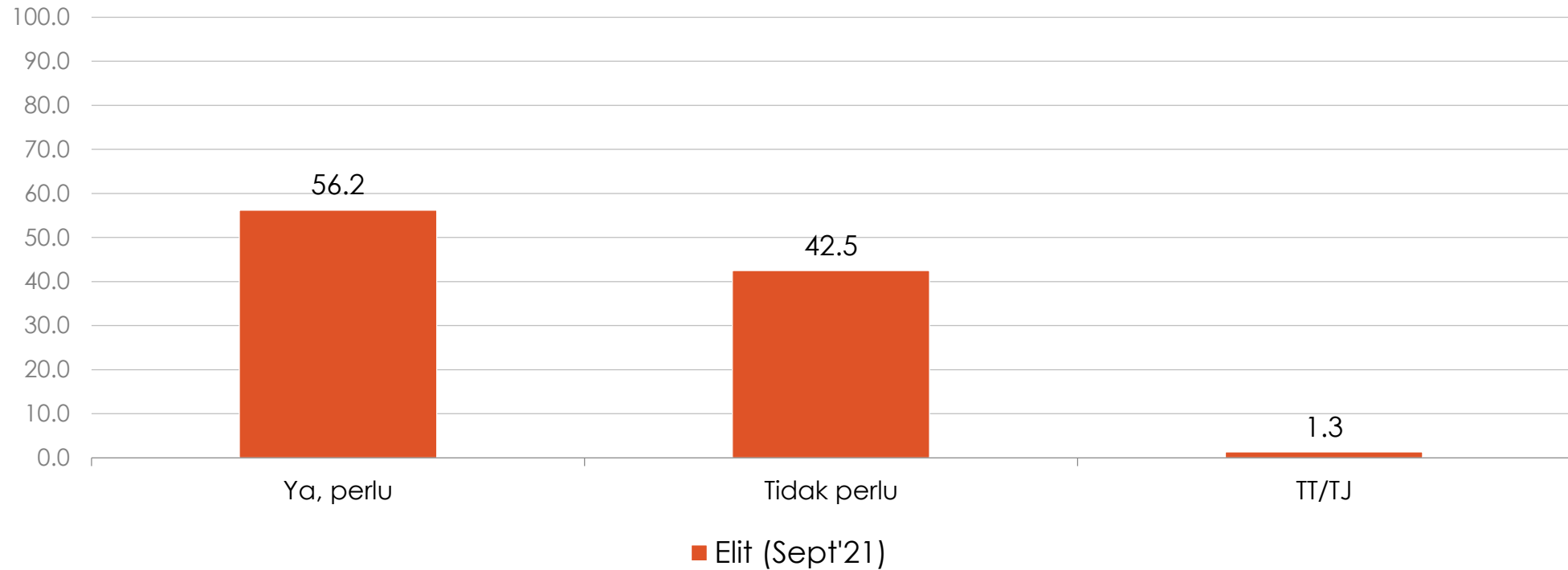
- Mayoritas publik, merasa UUD 1945 merupakan dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia.
- Kebanyakan juga menilai bahwa UUD 1945 tidak boleh diubah sama sekali karena mampu memenuhi perkembangan kebutuhan bangsa selamanya.
- Mayoritas publik tidak tahu bahwa UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 kali.
- Mayoritas elit menilai belum saatnya dilakukan kembali perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Di kalangan Publik mayoritas juga menilai belum saatnya, namun lebih rendah.
- Kebanyakan elit dan publik menilai jika perlu dilakukan kembali perubahan (amandemen) maka perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap pasal/aturan tertentu sesuai kebutuhan. Namun cukup banyak juga yang menilai tidak bisa dilakukan terhadap satu pasal saja karena saling terkait dengan pasal yang lain.
- Mayoritas publik, 70.1%, menilai Perubahan (amandemen) UUD 1945 dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tapi harus mendengar aspirasi warga terlebih dahulu.



POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN)

PERLUKAH DIBUAT PPHN?

Apakah perlu dibuat Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)?... (%)

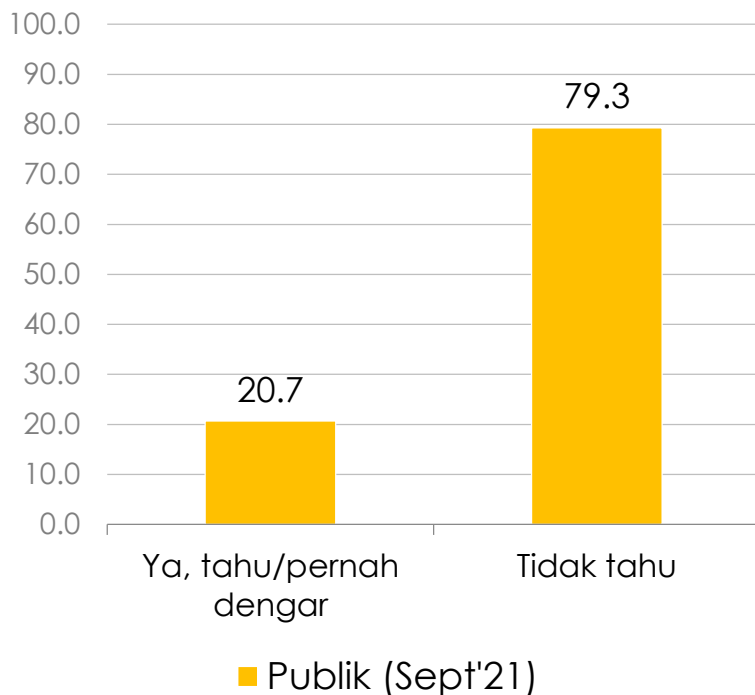


Mayoritas elit, 56.2%, merasa perlu dibuat Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

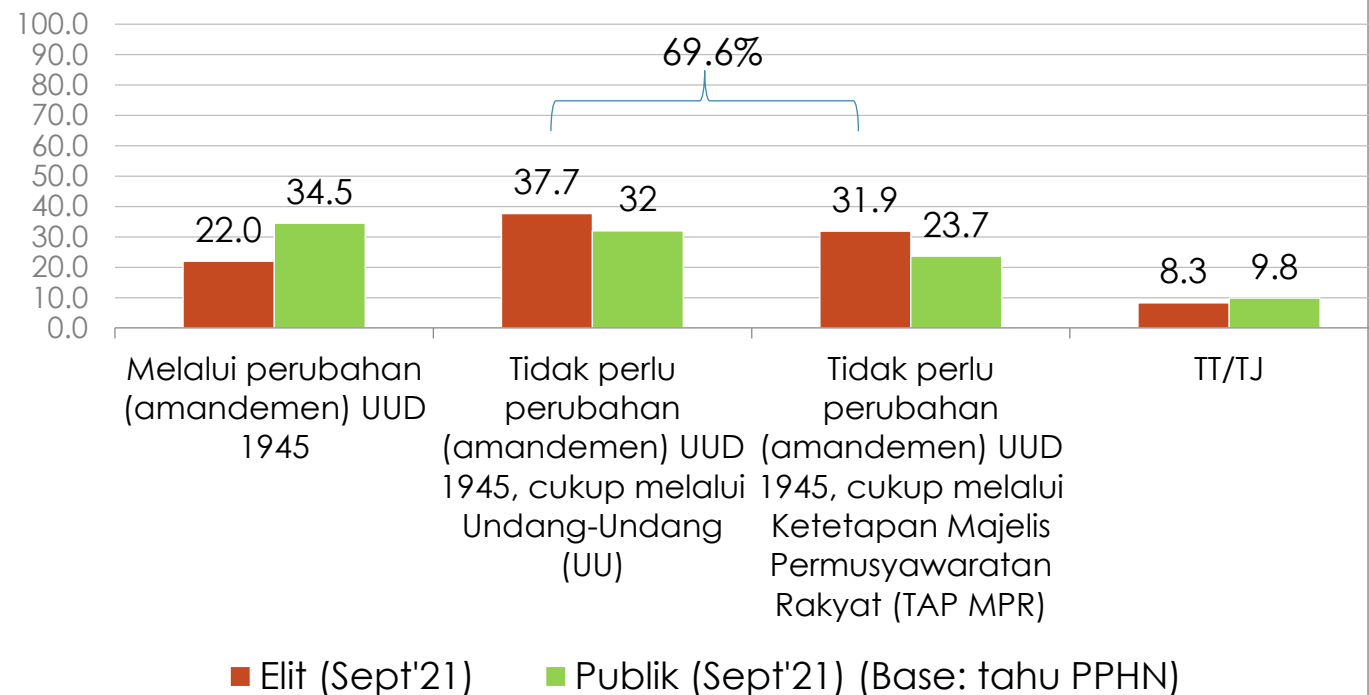


PROSES PENETAPAN PPHN

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)?... (%)



Menurut Ibu/ Bapak, bagaimana sebaiknya proses penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)?... (%)

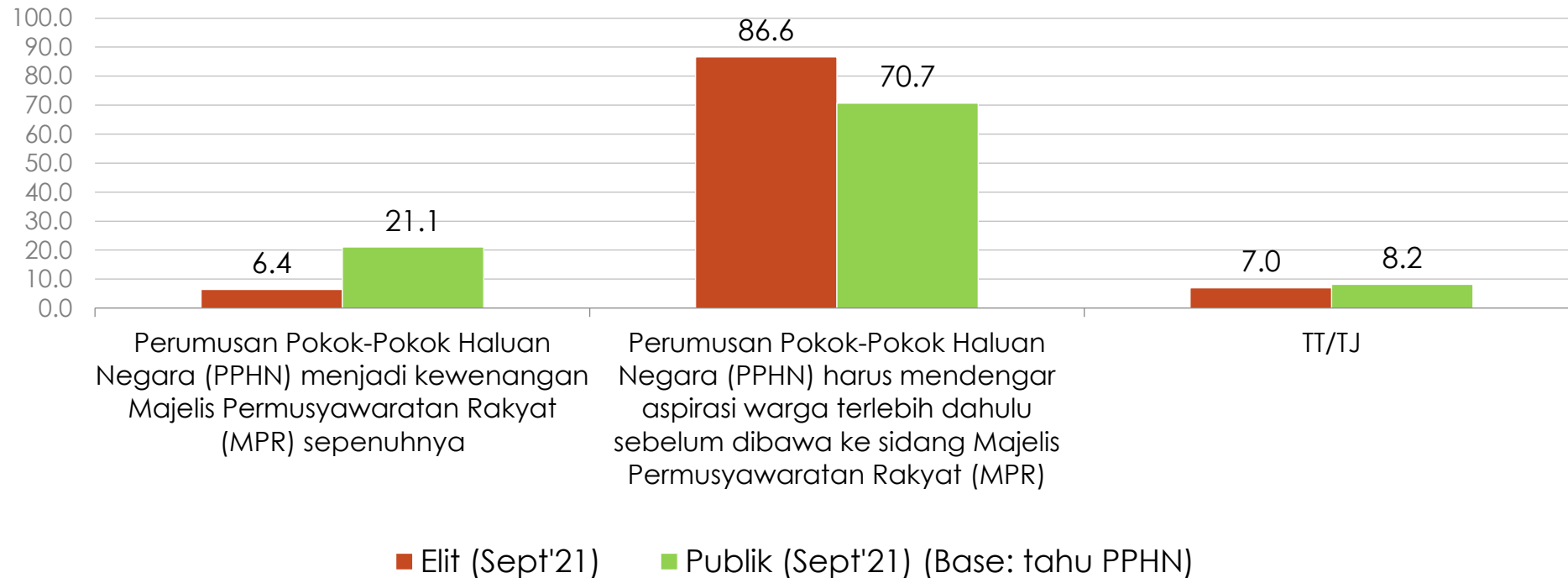


Mayoritas, 69.6%, elit menilai tidak perlu perubahan amandemen UUD 1945, cukup melalui UU (37.7%) atau TAP MPR (31.9%). Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.



PROSES PERUMUSAN PPHN

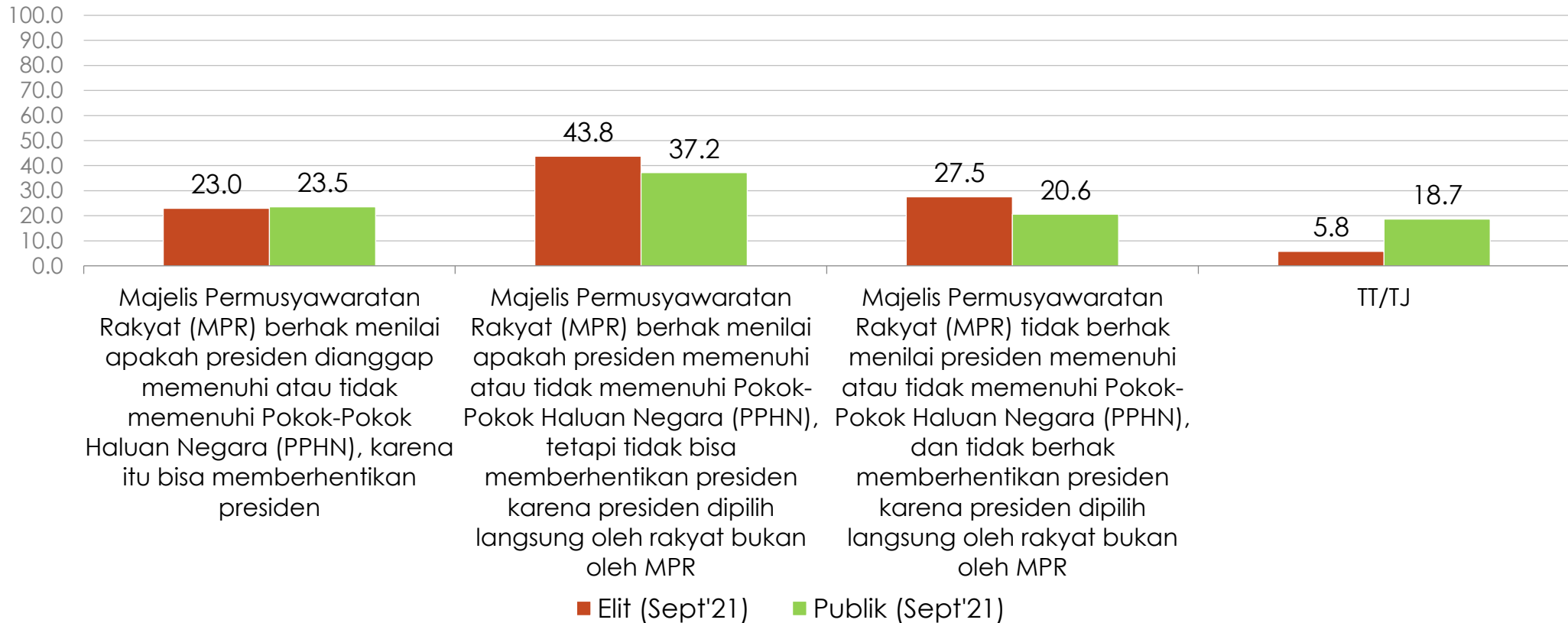
Menurut Ibu/ Bapak, bagaimana sebaiknya proses pembuatan atau perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)?... (%)



Mayoritas, 86.6%, elit menilai Perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus mendengar aspirasi warga terlebih dahulu sebelum dibawa ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.

KEWENANGAN MPR DALAM MENILAI APAKAH PRESIDEN MEMENUHI ATAU TIDAK MEMENUHI PPHN

Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)

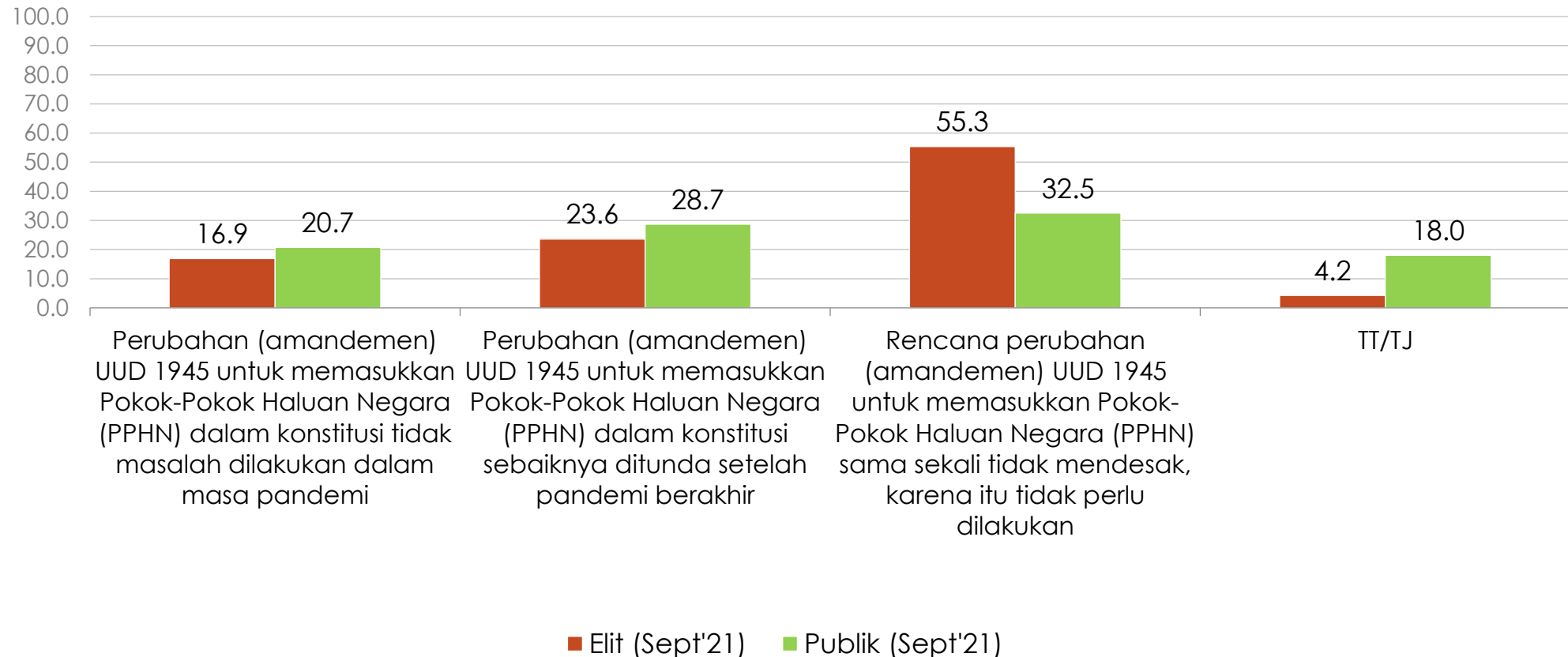


Kebanyakan, 43.8%, elit menilai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berhak menilai apakah presiden memenuhi atau tidak memenuhi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tetapi tidak bisa memberhentikan presiden karena presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh MPR. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.



AMANDEMEN UUD 1945 UNTUK MEMASUKKAN PPHN

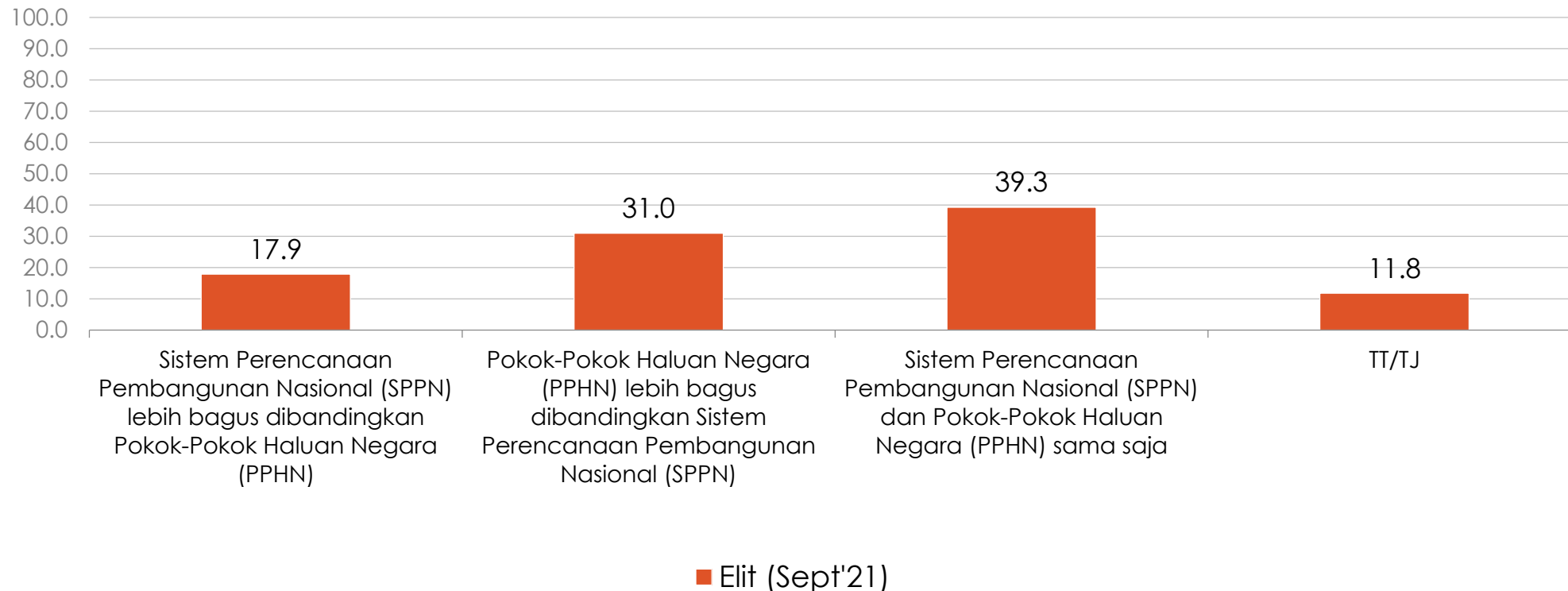
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas, 55.3%, elit menilai perubahan (amandemen) UUD 1945 untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak mendesak sehingga tidak perlu dilakukan. Sementara di kalangan Publik kebanyakan menilai sama, namun jauh lebih rendah, 32.5%.

SPPN DIBANDING PPHN

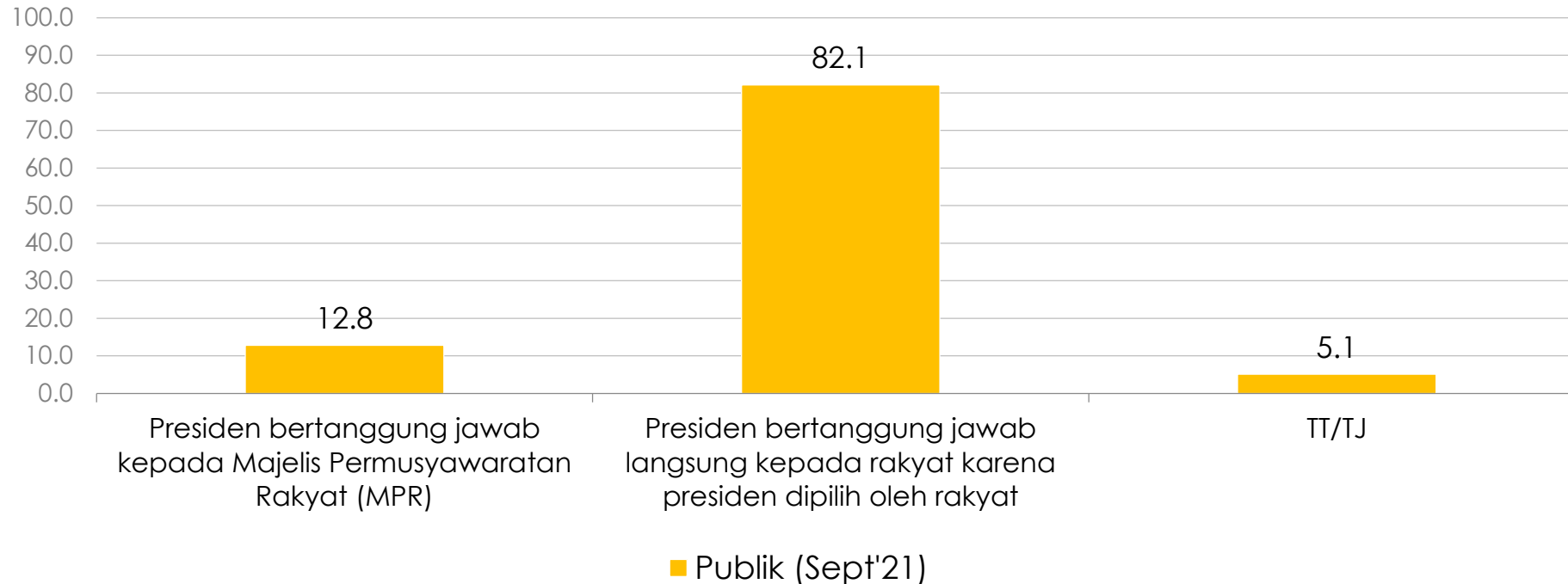
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Kebanyakan elit, 39.3%, menilai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sama saja, sementara yang menilai PPHN lebih bagus dari SPPN sekitar 31%, dan hanya 17.9% yang menilai SPPN lebih bagus dibanding PPHN.

PRESIDEN BERTANGGUNG JAWAB PADA MPR VS RAKYAT

Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas publik, 82.1%, menilai Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.

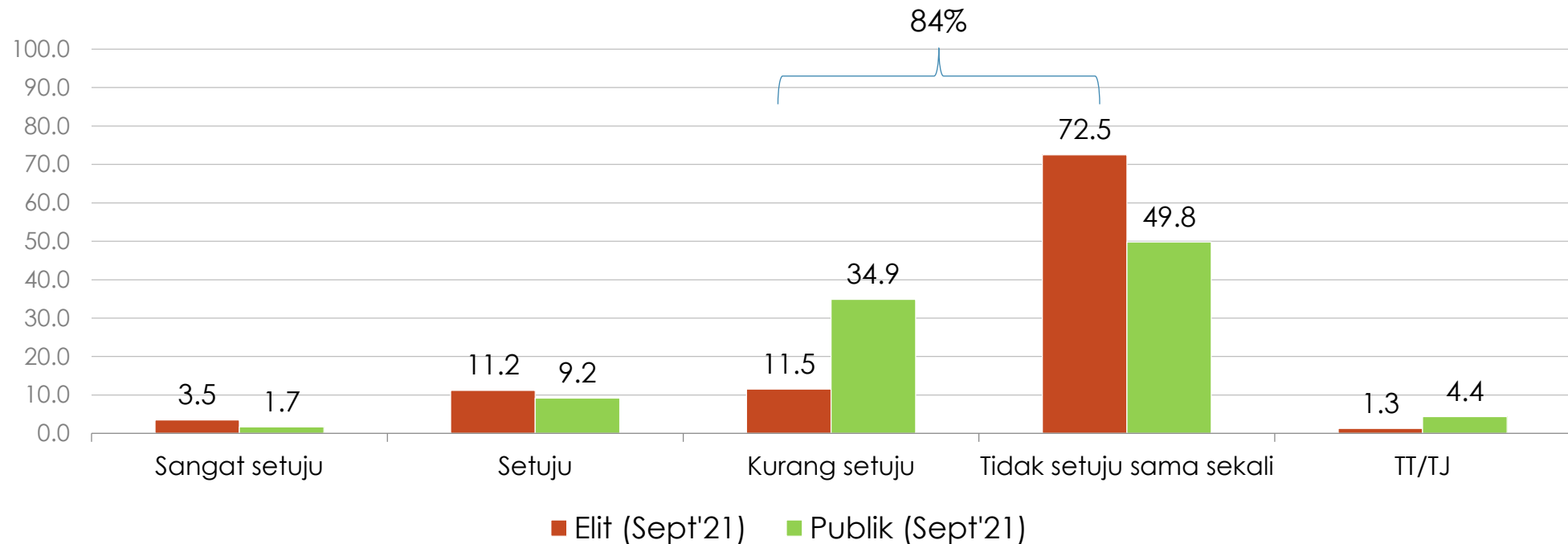
TEMUAN

- Kelompok Elit maupun Publik mayoritas menilai dalam proses penetapan PPHN tidak perlu perubahan amandemen UUD 1945, cukup melalui UU atau TAP MPR. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.
- Mayoritas elit dan publik juga menilai Perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) harus mendengar aspirasi warga terlebih dahulu sebelum dibawa ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Mayoritas, 55.3%, narasumber menilai perubahan (amandemen) UUD 1945 untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak mendesak sehingga tidak perlu dilakukan. Sementara di kalangan Publik kebanyakan menilai sama, namun jauh lebih rendah, 32.5%.
- Mayoritas publik, 82.1%, menilai Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.

PEMILIHAN EKSEKUTIF & KEDUDUKAN MPR

PEMILIHAN PRESIDEN DILAKUKAN MELALUI MPR

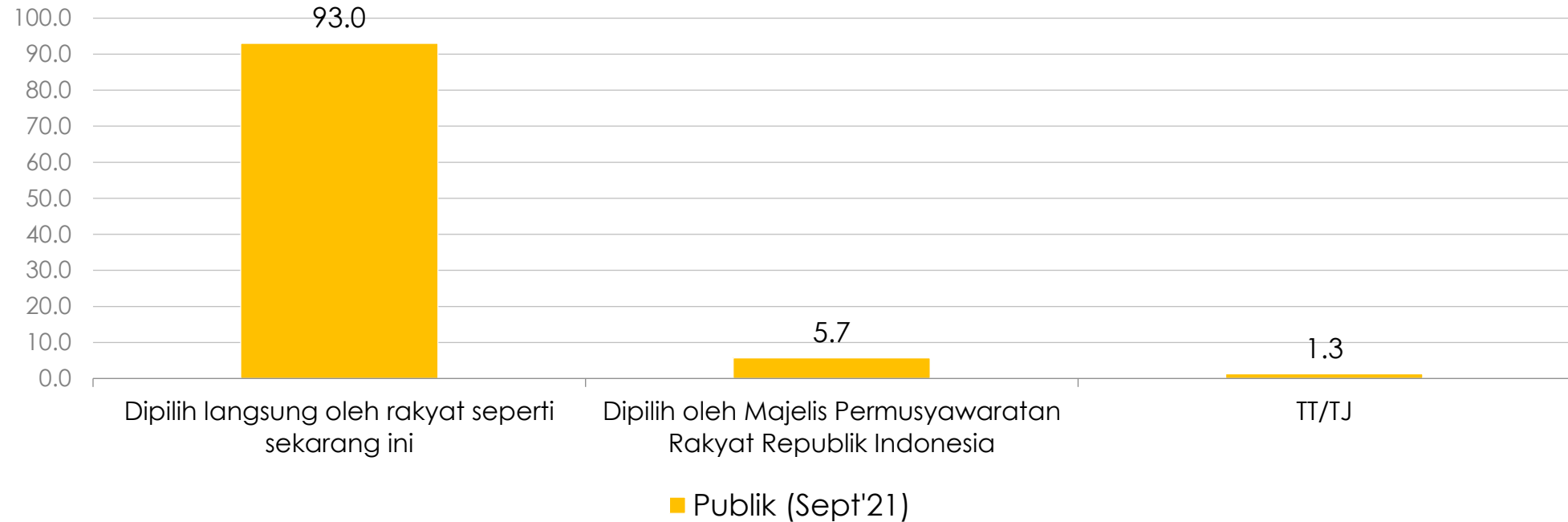
Ada pendapat yang mengusulkan pemilihan presiden dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan pemilihan secara langsung oleh rakyat seperti sekarang ini. Seberapa setuju Ibu/Bapak terhadap pendapat pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)?... (%)



Mayoritas, 84%, elit kurang/tidak setuju sama sekali dengan pendapat yang mengusulkan pemilihan presiden dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan pemilihan secara langsung oleh rakyat seperti sekarang ini. Sementara di kalangan Publik kebanyakan juga menilai sama, namun lebih rendah.

PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT VS MPR

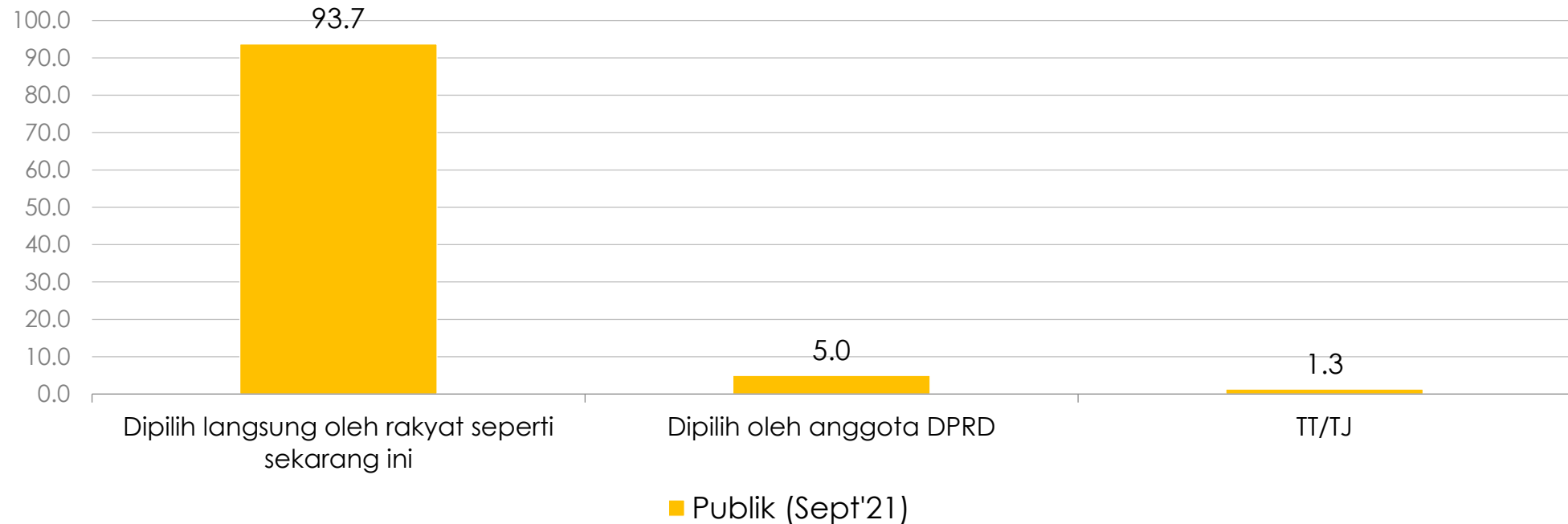
Menurut Ibu/Bapak, apakah sebaiknya Presiden dipilih langsung oleh rakyat seperti sekarang ini, atau dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)?... (%)



Mayoritas publik, 93%, menilai sebaiknya Presiden dipilih langsung oleh rakyat seperti sekarang ini.

GUBERNUR DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT VS DPRD PROVINSI

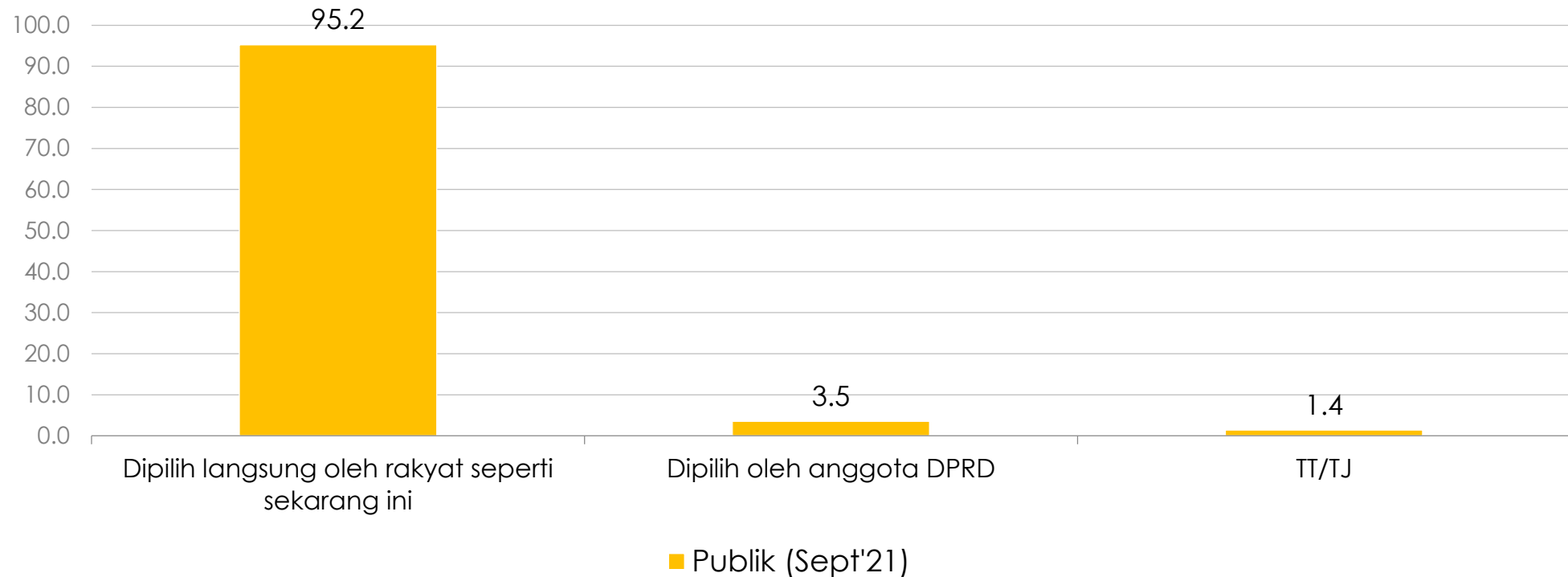
Menurut Ibu/Bapak, apakah sebaiknya Gubernur dipilih langsung oleh rakyat seperti sekarang ini, atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi?... (%)



Mayoritas publik, 93.7%, menilai sebaiknya Gubernur dipilih langsung oleh rakyat seperti sekarang ini.

BUPATI/WALIKOTA DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT VS DPRD KABUPATEN/KOTA

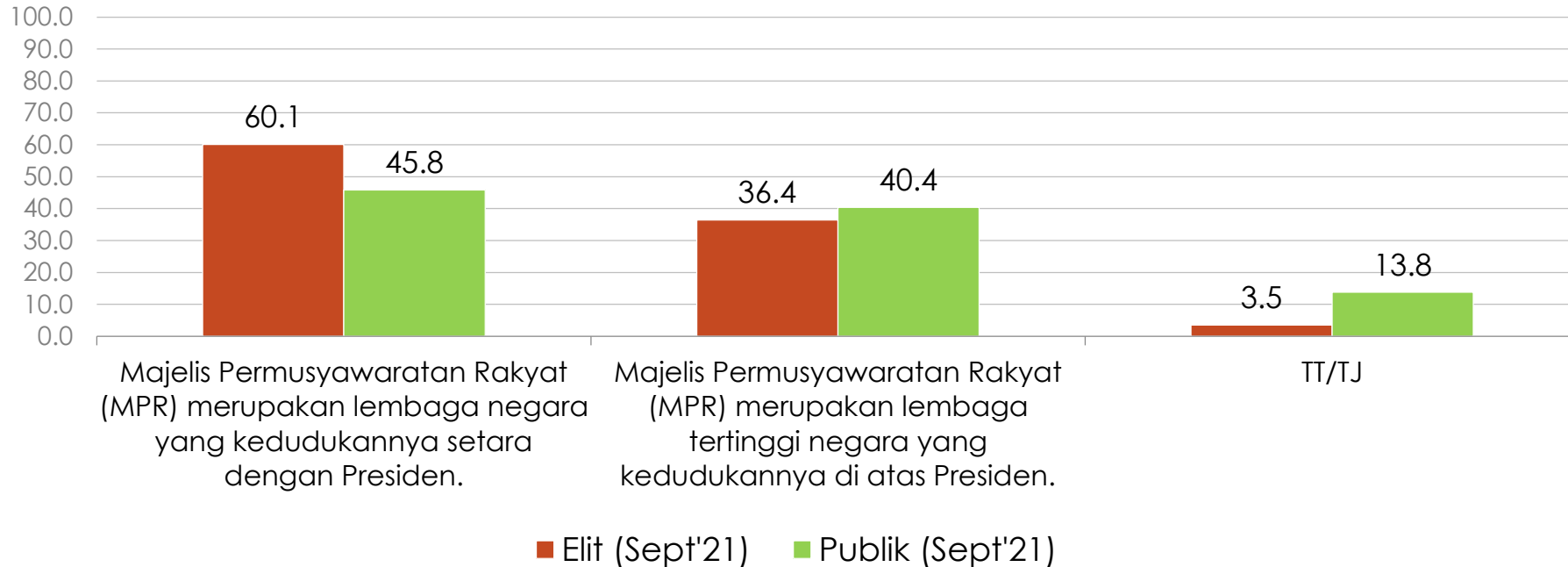
Menurut Ibu/Bapak, apakah sebaiknya Bupati/Walikota dipilih langsung oleh rakyat seperti sekarang ini, atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota?... (%)



Mayoritas publik, 95.2%, menilai sebaiknya Bupati/Walikota dipilih langsung oleh rakyat seperti sekarang ini.

MPR SETARA DENGAN PRESIDEN DAN DPR VS MPR KEDUDUKANNYA DIATAS PRESIDEN DAN DPR

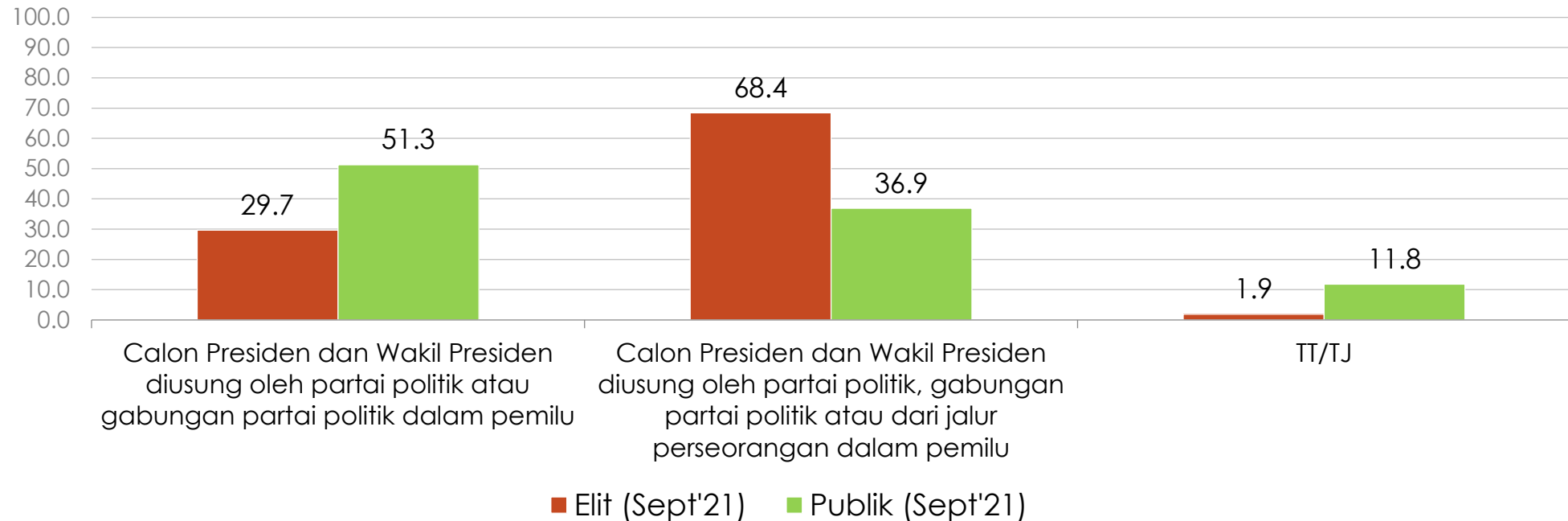
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas, 60%, elit menilai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang kedudukannya setara dengan Presiden. Sementara di kalangan Publik terlihat lebih terbelah, sekitar 45.8% menilai MPR setara dengan presiden dan 40.4% menilai MPR kedudukannya di atas Presiden.

PENGUSUNG CAPRES DAN CAWAPRES

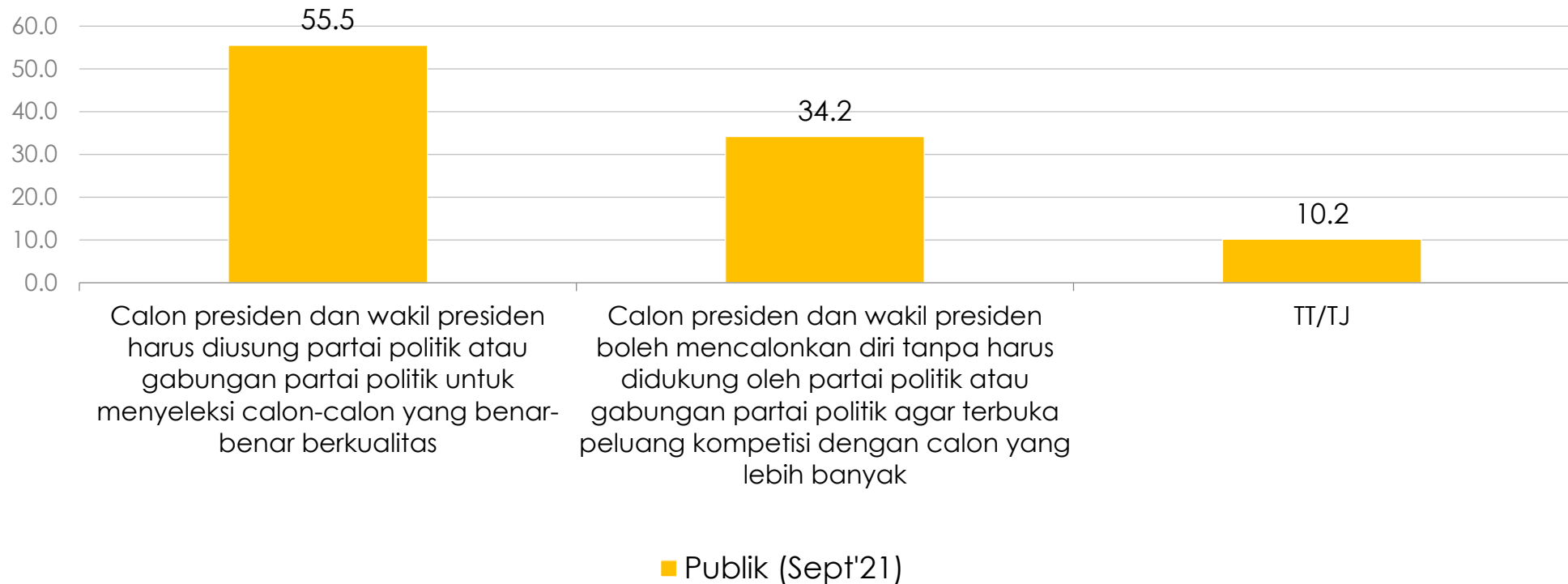
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Di kelompok elit terlihat mayoritas, 68.4%, lebih sesuai dengan pendapat bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik, gabungan partai politik atau dari jalur perseorangan dalam pemilu, sementara mayoritas publik, 51.3%, menilai bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu.

PENGUSUNG CAPRES DAN CAWAPRES ARGUMEN #1

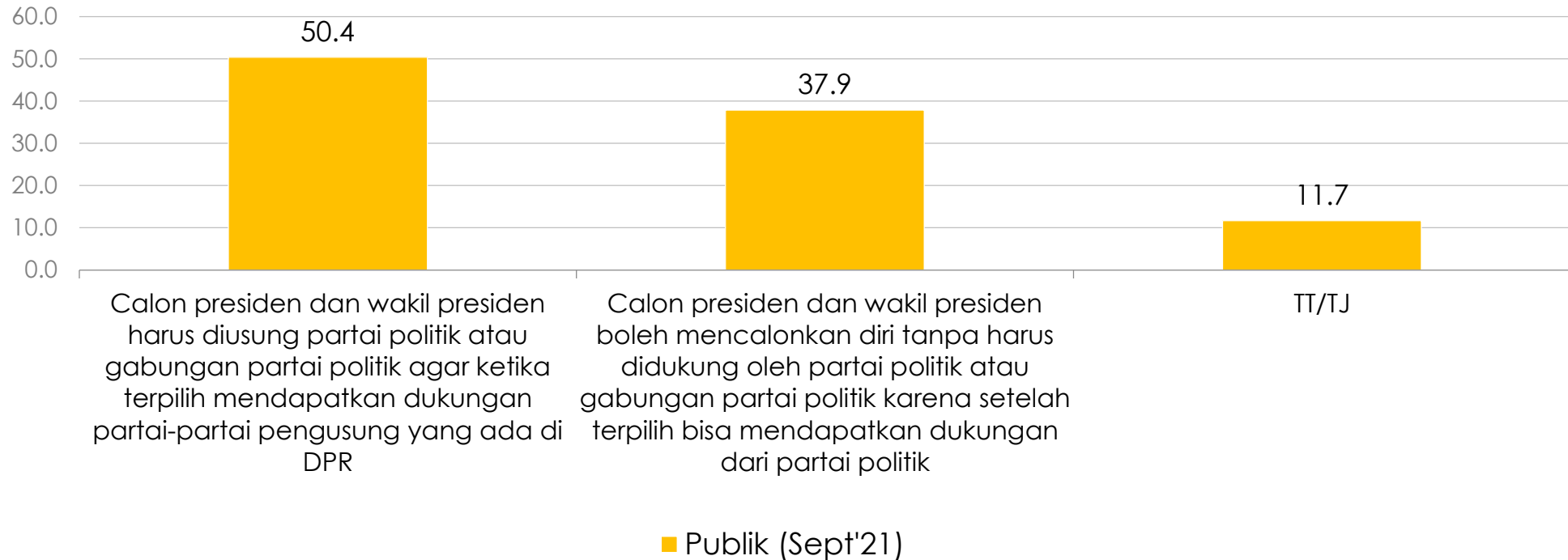
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas publik, 55.5%, menilai calon presiden dan wakil presiden harus diusung partai politik atau gabungan partai politik untuk menyeleksi calon-calon yang benar-benar berkualitas

PENGUSUNG CAPRES DAN CAWAPRES ARGUMEN #2

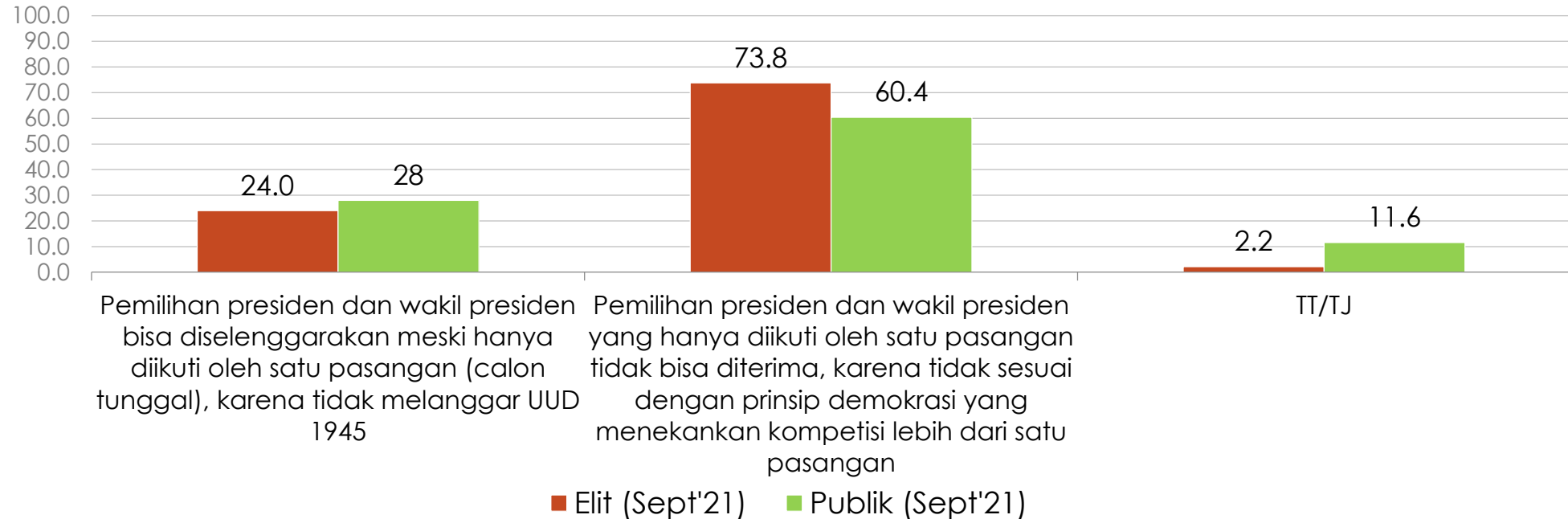
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas publik, 50.4%, menilai Calon presiden dan wakil presiden harus diusung partai politik atau gabungan partai politik agar ketika terpilih mendapatkan dukungan partai-partai pengusung yang ada di DPR.

PEMILIHAN PRESIDEN BISA DISELENGGARAKAN MESKI HANYA SATU PASANGAN VS TIDAK BISA KARENA TIDAK SESUAI PRINSIP DEMOKRASI

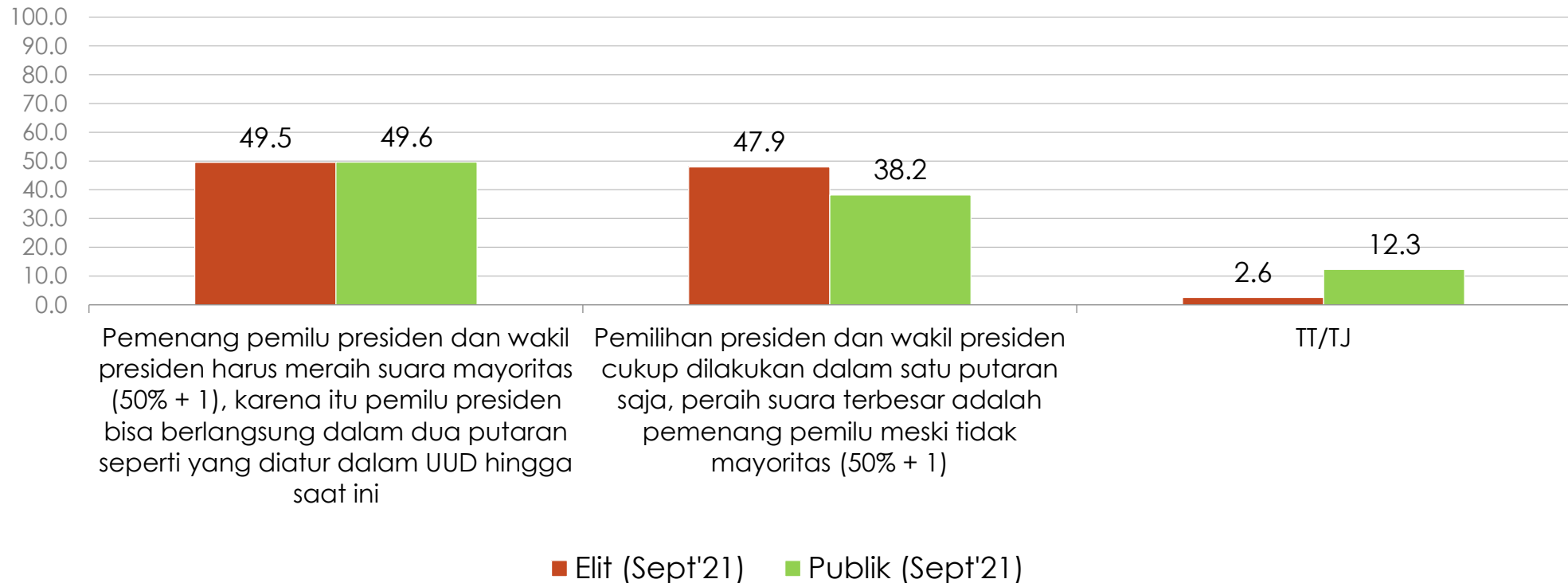
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas, 73.8%, elit menilai Pemilihan presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti oleh satu pasangan tidak bisa diterima, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menekankan kompetisi lebih dari satu pasangan. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.

PEMENANG PEMILIHAN PRESIDEN HARUS MERAIH SUARA MAYORITAS (50%+1) VS CUKUP PERAIH SUARA TERBANYAK MESKI TIDAK MAYORITAS

Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



elit terbelah, sekitar 49.5% menilai pemenang pilpres harus meraih suara mayoritas sehingga pilpres bisa berlangsung dua putaran, sementara 47.9% menilai pemenang pilpres cukup dilakukan satu putaran saja. Sementara di kalangan publik kebanyakan menilai pemenang pilpres harus meraih suara mayoritas, sehingga bisa berlangsung dua putaran.

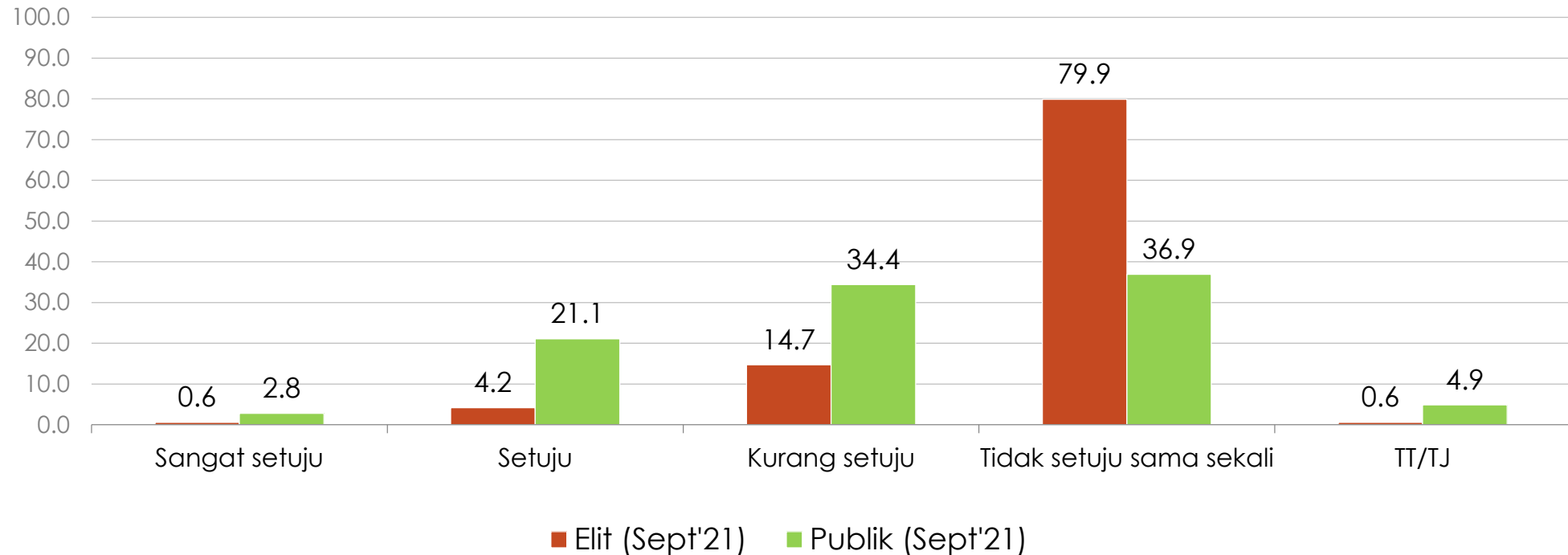
TEMUAN

- Saat ini, mayoritas baik elit maupun publik kurang/tidak setuju sama sekali dengan pendapat yang mengusulkan pemilihan presiden dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan pemilihan secara langsung oleh rakyat seperti sekarang ini.
- Mayoritas elit menilai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang kedudukannya setara dengan Presiden. Sementara di kalangan Publik terlihat lebih terbelah, sekitar 45.8% menilai MPR setara dengan presiden dan 40.4% menilai MPR kedudukannya di atas Presiden.
- Di kelompok elit terlihat mayoritas, 68.4%, lebih sesuai dengan pendapat bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik, gabungan partai politik atau dari jalur perseorangan dalam pemilu, sementara mayoritas publik, 51.3%, menilai bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu.
- Mayoritas elit dan publik menilai Pemilihan presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti oleh satu pasangan tidak bisa diterima, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menekankan kompetisi lebih dari satu pasangan.
- Narasumber elit terbelah, sekitar 49.5% menilai pemenang pilpres harus meraih suara mayoritas sehingga pilpres bisa berlangsung dua putaran, sementara 47.9% menilai pemenang pilpres cukup dilakukan satu putaran saja. Sementara di kalangan publik kebanyakan menilai pemenang pilpres harus meraih suara mayoritas, sehingga bisa berlangsung dua putaran.

MASA JABATAN PRESIDEN

JABATAN PRESIDEN MENJADI TIGA PERIODE

Seberapa setuju Ibu/Bapak jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode?... (%)



Mayoritas di kalangan elit maupun kalangan publik kurang/tidak setuju sama sekali jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun penolakan di kalangan elit terlihat lebih keras dibanding publik.

JABATAN PRESIDEN MENJADI TIGA PERIODE BERDASARKAN LATAR BELAKANG ELIT (SURVEI ELIT)

| | BASE | Sangat setuju+setuju | Kurang+Tidak setuju sama sekali | TJ |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----|
| Gender | | | | |
| Laki-laki | 89.8 | 5.3 | 94.0 | 0.7 |
| Perempuan | 10.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Usia | | | | |
| <= 40 tahun | 23.3 | 4.1 | 94.5 | 1.4 |
| > 40 tahun | 76.7 | 5.0 | 94.6 | 0.4 |
| Kepemilikan Media Sosial | | | | |
| Punya | 85.3 | 4.9 | 94.8 | 0.4 |
| Tidak | 14.7 | 4.3 | 93.5 | 2.2 |
| Latar belakang | | | | |
| AKADEMISI | 33.2 | 1.0 | 99.0 | 0.0 |
| LSM/NGO | 18.8 | 1.7 | 96.6 | 1.7 |
| MEDIA MASSA | 18.2 | 12.3 | 86.0 | 1.8 |
| THINK TANK / PUSAT STUDI | 11.2 | 2.9 | 97.1 | 0.0 |
| TOKOH | | | | |
| ORMAS/AGAMA/BUDAYA | 18.5 | 8.6 | 91.4 | 0.0 |
| WAN | | | | |
| Jabodetabek Vs Lainnya | | | | |
| Jabodetabek | 25.2 | 1.3 | 98.7 | 0.0 |
| Lainnya | 74.8 | 6.0 | 93.2 | 0.9 |

| | BASE | Sangat setuju+setuju | Kurang+Tidak setuju sama sekali | TJ |
|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----|
| Kota | | | | |
| 01. KOTA MEDAN | 6.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 02. KOTA PADANG | 4.2 | 7.7 | 92.3 | 0.0 |
| 03. KOTA PALEMBANG | 3.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 04. WILAYAH JABODETABEK | 25.2 | 1.3 | 98.7 | 0.0 |
| 05. KOTA BANDUNG | 5.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 06. KOTA SEMARANG | 7.3 | 13.0 | 87.0 | 0.0 |
| 07. KOTA JOGJAKARTA | 7.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 08. KOTA MALANG | 3.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 09. KOTA SURABAYA | 9.9 | 6.5 | 90.3 | 3.2 |
| 10. KOTA DENPASAR | 3.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 11. KOTA KUPANG | 3.2 | 10.0 | 90.0 | 0.0 |
| 12. KOTA SAMARINDA | 3.2 | 10.0 | 90.0 | 0.0 |
| 13. KOTA BANJARMASIN | 3.2 | 20.0 | 80.0 | 0.0 |
| 14. KOTA MANADO | 3.8 | 8.3 | 83.3 | 8.3 |
| 15. KOTA MAKASSAR | 8.0 | 8.0 | 92.0 | 0.0 |
| 16. KOTA JAYAPURA | 3.2 | 10.0 | 90.0 | 0.0 |

Mayoritas elit disemua kelompok demografi dan latar belakang kurang setuju jabatan presiden tiga periode.

JABATAN PRESIDEN MENJADI TIGA PERIODE MENURUT SOSIO-DEMOGRAFI (SURVEI NASIONAL)

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar berita tentang usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode?

Seberapa setuju Ibu/Bapak jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode?

| | BASE | Ya | Tidak | Sangat setuju+Setuju | Kurang setuju+Tidak setuju sama sekali | TT/TJ |
|---------------|-------------|------|-------|----------------------|----------------------------------------|-------|
| GENDER | | | | | | |
| Laki-laki | 50.2 | 60.9 | 39.1 | 22.6 | 73.5 | 3.9 |
| Perempuan | 49.8 | 42.8 | 57.2 | 25.1 | 69.0 | 5.9 |
| USIA | | | | | | |
| <= 21 tahun | 12.5 | 44.6 | 55.4 | 26.2 | 73.8 | 0.0 |
| 22 - 25 tahun | 10.1 | 43.0 | 57.0 | 22.3 | 74.3 | 3.3 |
| 26 - 40 tahun | 36.9 | 57.6 | 42.4 | 23.2 | 73.2 | 3.7 |
| 41 - 55 tahun | 25.2 | 53.4 | 46.6 | 21.5 | 72.6 | 6.0 |
| > 55 tahun | 15.3 | 47.4 | 52.6 | 28.7 | 60.2 | 11.1 |
| ETNIS | | | | | | |
| Jawa | 41.6 | 50.6 | 49.4 | 24.4 | 71.8 | 3.8 |
| Sunda | 15.5 | 57.4 | 42.6 | 21.8 | 74.2 | 4.1 |
| Batak | 3.5 | 69.0 | 31.0 | 26.6 | 66.7 | 6.7 |
| Madura | 3.3 | 28.1 | 71.9 | 9.0 | 86.8 | 4.2 |
| Betawi | 3.1 | 63.6 | 36.4 | 23.1 | 76.9 | 0.0 |
| Minang | 3.0 | 54.2 | 45.8 | 4.0 | 93.5 | 2.5 |
| Bugis | 3.1 | 42.5 | 57.5 | 11.6 | 88.4 | 0.0 |
| Melayu | 2.5 | 51.0 | 49.0 | 28.8 | 67.4 | 3.8 |
| Lainnya | 24.6 | 50.8 | 49.2 | 29.4 | 61.8 | 8.8 |
| AGAMA | | | | | | |
| Islam | 88.9 | 50.6 | 49.4 | 20.4 | 74.7 | 4.9 |
| Lainnya | 11.1 | 61.8 | 38.2 | 51.4 | 43.8 | 4.8 |

Mayoritas publik kurang/tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode, di setiap kelompok sosio-demografi pemilih kecuali kelompok non muslim dan wilayah Bali Nusa.

JABATAN PRESIDEN MENJADI TIGA PERIODE MENURUT SOSIO-DEMOGRAFI (SURVEI NASIONAL)

| | Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar berita tentang usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode? | | | Seberapa setuju Ibu/Bapak jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode? | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| | BASE | Ya | Tidak | Sangat setuju+Setuju | Kurang setuju+Tidak setuju sama sekali | TT/TJ |
| PENDIDIKAN | | | | | | |
| <= SD | 27.9 | 33.7 | 66.3 | 28.5 | 60.5 | 11.0 |
| SLTP | 22.3 | 42.7 | 57.3 | 27.0 | 69.8 | 3.2 |
| SLTA | 34.8 | 61.7 | 38.3 | 22.4 | 74.4 | 3.2 |
| Kuliah | 15.0 | 76.6 | 23.4 | 14.2 | 85.8 | 0.0 |
| PEKERJAAN | | | | | | |
| Petani, buruh kasar, tidak tetap, sopir/ojek, PKL, menganggur | 40.8 | 49.4 | 50.6 | 27.8 | 65.3 | 6.9 |
| Pegawai (PNS/Swasta), wiraswasta, guru/dosen, profesional | 24.0 | 64.3 | 35.7 | 17.5 | 80.8 | 1.6 |
| Ibu Rumah Tangga | 23.9 | 42.7 | 57.3 | 23.8 | 70.3 | 5.9 |
| Lainnya | 11.3 | 53.9 | 46.1 | 23.4 | 74.2 | 2.4 |
| PENDAPATAN | | | | | | |
| < 1 juta | 20.6 | 37.4 | 62.6 | 24.8 | 64.6 | 10.6 |
| 1 - <2 juta | 35.0 | 46.9 | 53.1 | 26.2 | 68.9 | 4.9 |
| 2 - <4 juta | 27.9 | 59.5 | 40.5 | 23.4 | 73.4 | 3.1 |
| =>4 juta | 16.4 | 67.9 | 32.1 | 18.0 | 81.1 | 0.8 |

Mayoritas publik kurang/tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode, di setiap kelompok sosio-demografi pemilih kecuali kelompok non muslim dan wilayah Bali Nusa.

JABATAN PRESIDEN MENJADI TIGA PERIODE MENURUT SOSIO-DEMOGRAFI (SURVEI NASIONAL)

| | Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar berita tentang usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode? | | | Seberapa setuju Ibu/Bapak jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode? | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| | BASE | Ya | Tidak | Sangat setuju+Setuju | Kurang setuju+Tidak setuju sama sekali | TT/TJ |
| DESA/KOTA | | | | | | |
| Pedesaan | 49.6 | 41.4 | 58.6 | 24.7 | 69.9 | 5.4 |
| Perkotaan | 50.4 | 62.2 | 37.8 | 23.0 | 72.6 | 4.4 |
| WILAYAH | | | | | | |
| SUMATERA | 20.4 | 47.2 | 52.8 | 18.8 | 72.7 | 8.4 |
| BANTEN | 4.3 | 67.2 | 32.8 | 8.1 | 90.1 | 1.7 |
| DKI | 4.1 | 60.8 | 39.2 | 16.9 | 79.1 | 4.0 |
| JABAR | 17.4 | 56.0 | 44.0 | 26.2 | 70.9 | 2.9 |
| JATENG DIY | 16.1 | 52.8 | 47.2 | 24.8 | 72.6 | 2.6 |
| JATIM | 16.2 | 41.1 | 58.9 | 27.1 | 67.2 | 5.8 |
| BALI NUSA | 5.3 | 42.1 | 57.9 | 46.0 | 37.2 | 16.8 |
| KALIMANTAN | 5.9 | 50.7 | 49.3 | 31.3 | 66.9 | 1.8 |
| SULAWESI | 7.0 | 49.2 | 50.8 | 18.6 | 80.2 | 1.2 |
| MALUKU PAPUA | 3.3 | 70.8 | 29.2 | 26.2 | 65.4 | 8.4 |

Mayoritas publik kurang/tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode, di setiap kelompok sosio-demografi pemilih kecuali kelompok non muslim dan wilayah Bali Nusa.

JABATAN PRESIDEN MENJADI TIGA PERIODE MENURUT SOSIO-DEMOGRAFI (SURVEI NASIONAL)

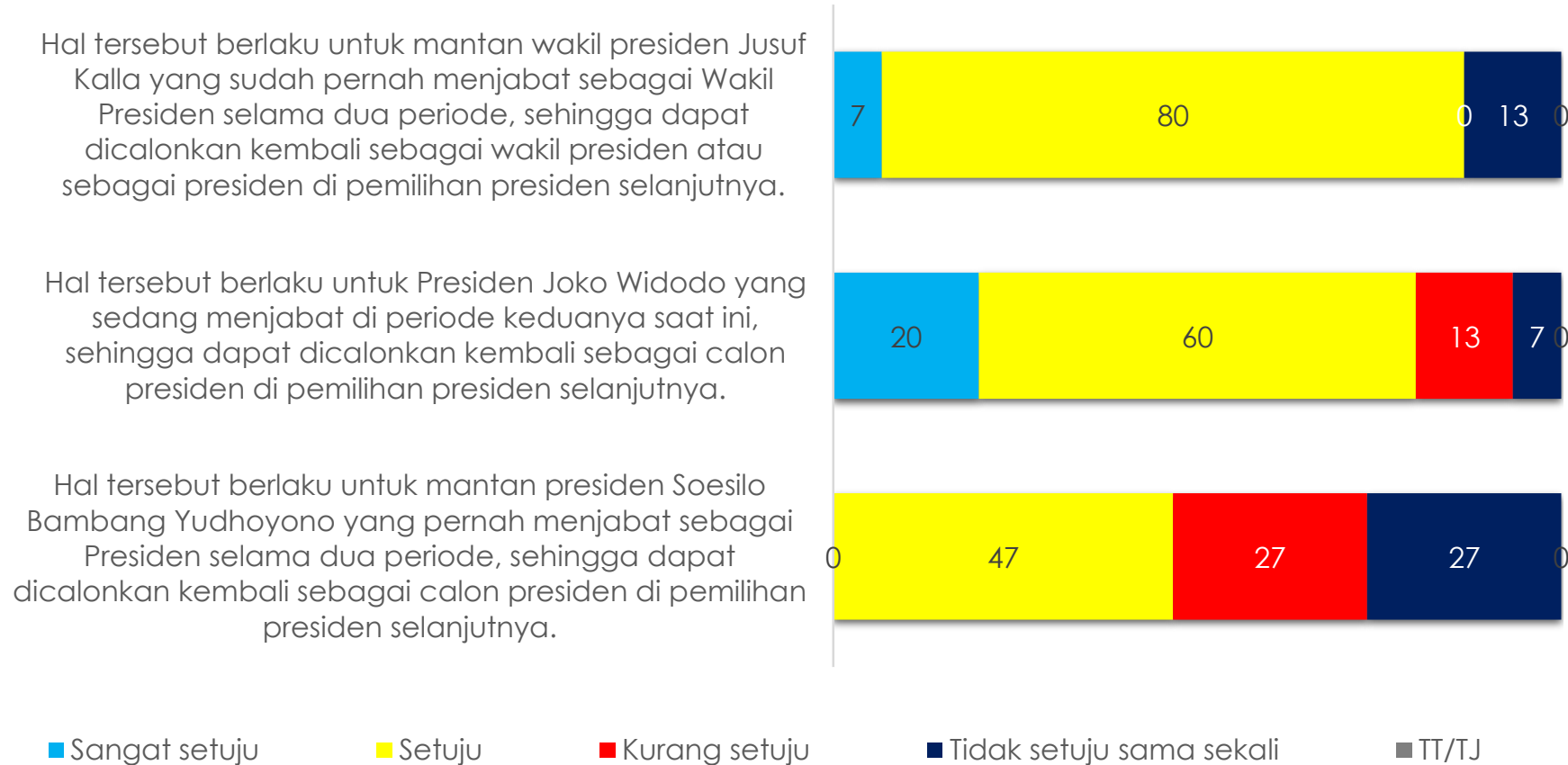
| | Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar berita tentang usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode? | | | Seberapa setuju Ibu/Bapak jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode? | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| | BASE | Ya | Tidak | Sangat setuju+Setuju | Kurang setuju+Tidak setuju sama sekali | TT/TJ |
| PILIHAN PRESIDEN 2019 | | | | | | |
| Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma'ruf Amin | 55.5 | 47.1 | 52.9 | 34.6 | 58.9 | 6.5 |
| Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno | 44.5 | 57.4 | 42.6 | 8.8 | 87.8 | 3.4 |

Mayoritas publik kurang/tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode, di setiap kelompok sosio-demografi pemilih kecuali kelompok non muslim dan wilayah Bali Nusa.

JIKA SETUJU MASA JABATAN PRESIDEN MENJADI TIGA PERIODE, SEBERAPA SETUJU DENGAN ... (SURVEI ELIT)

Jika menjawab sangat setuju/setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode, seberapa setuju Ibu/Bapak dengan beberapa pernyataan berikut... (%)

(Base: Sangat Setuju/Setuju jabatan presiden tiga periode)



JIKA SETUJU MASA JABATAN PRESIDEN MENJADI TIGA PERIODE, SEBERAPA SETUJU DENGAN ... (SURVEI PUBLIK)

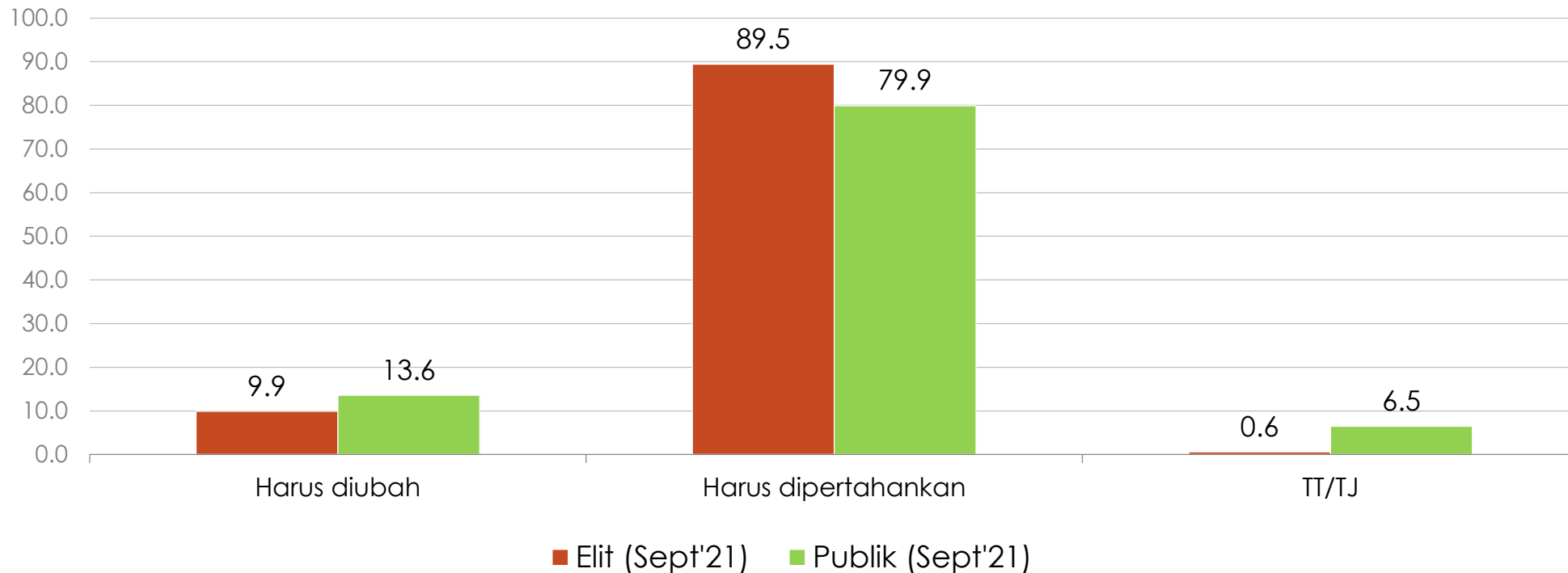
Jika menjawab sangat setuju/setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode, seberapa setuju Ibu/Bapak dengan beberapa pernyataan berikut:... (%)

(Base: Sangat Setuju/Setuju jabatan presiden tiga periode)



KETENTUAN MASA JABATAN PRESIDEN HARUS DIUBAH VS HARUS DIPERTAHANKAN

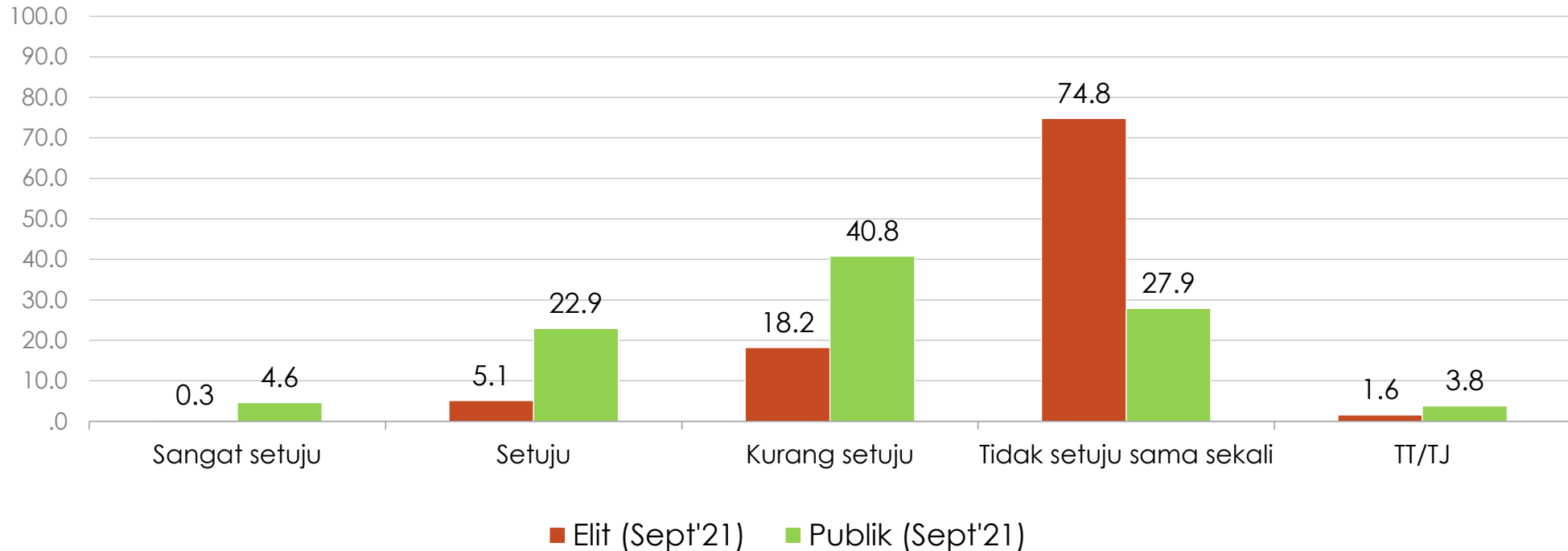
Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlaku sampai sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya DUA kali, masing-masing selama LIMA tahun. Menurut Ibu/Bapak apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?... (%)



Mayoritas, 89.5%, elit menilai harus dipertahankan. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.

JOKO WIDODO KEMBALI MENJADI CAPRES DI PEMILIHAN 2024?

Ada yang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Seberapa setuju Ibu/Bapak dengan pendapat tersebut?... (%)



Mayoritas di kalangan elit maupun kalangan publik kurang/tidak setuju sama sekali jika Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Namun penolakan di kalangan elit terlihat lebih keras dibanding publik.

JOKO WIDODO KEMBALI MENJADI CAPRES DI PEMILIHAN 2024 BERDASARKAN LATAR BELAKANG ELIT (SURVEI ELIT)

| | BASE | Sangat setuju+setuju | Kurang+Tidak setuju sama sekali | TJ |
|---------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----|
| Gender | | | | |
| Laki-laki | 89.8 | 6.0 | 92.2 | 1.8 |
| Perempuan | 10.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Usia | | | | |
| <= 40 tahun | 23.3 | 4.1 | 94.5 | 1.4 |
| > 40 tahun | 76.7 | 5.8 | 92.5 | 1.7 |
| Kepemilikan Media Sosial | | | | |
| Punya | 85.3 | 5.2 | 93.3 | 1.5 |
| Tidak | 14.7 | 6.5 | 91.3 | 2.2 |
| Latar belakang | | | | |
| AKADEMISI | 33.2 | 1.9 | 96.2 | 1.9 |
| LSM/NGO | 18.8 | 3.4 | 94.9 | 1.7 |
| MEDIA MASSA | 18.2 | 10.5 | 87.7 | 1.8 |
| THINK TANK / PUSAT STUDI | 11.2 | 8.6 | 91.4 | 0.0 |
| TOKOH | | | | |
| ORMAS/AGAMA/BUDAYA WAN | 18.5 | 6.9 | 91.4 | 1.7 |
| Jabodetabek Vs Lainnya | | | | |
| Jabodetabek | 25.2 | 3.8 | 94.9 | 1.3 |
| Lainnya | 74.8 | 6.0 | 92.3 | 1.7 |

| | BASE | Sangat setuju+setuju | Kurang+Tidak setuju sama sekali | TJ |
|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----|
| Wilayah | | | | |
| 01. KOTA MEDAN | 6.4 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 02. KOTA PADANG | 4.2 | 0.0 | 92.3 | 7.7 |
| 03. KOTA PALEMBANG | 3.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 04. WILAYAH JABODETABEK | 25.2 | 3.8 | 94.9 | 1.3 |
| 05. KOTA BANDUNG | 5.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 06. KOTA SEMARANG | 7.3 | 13.0 | 87.0 | 0.0 |
| 07. KOTA JOGJAKARTA | 7.0 | 0.0 | 95.5 | 4.5 |
| 08. KOTA MALANG | 3.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 09. KOTA SURABAYA | 9.9 | 3.2 | 93.5 | 3.2 |
| 10. KOTA DENPASAR | 3.2 | 10.0 | 90.0 | 0.0 |
| 11. KOTA KUPANG | 3.2 | 10.0 | 90.0 | 0.0 |
| 12. KOTA SAMARINDA | 3.2 | 10.0 | 90.0 | 0.0 |
| 13. KOTA BANJARMASIN | 3.2 | 20.0 | 80.0 | 0.0 |
| 14. KOTA MANADO | 3.8 | 16.7 | 75.0 | 8.3 |
| 15. KOTA MAKASSAR | 8.0 | 8.0 | 92.0 | 0.0 |
| 16. KOTA JAYAPURA | 3.2 | 10.0 | 90.0 | 0.0 |

Mayoritas elit dari setiap kelompok demografi dan latarbelakang tidak setuju jika Joko Widodo kembali menjadi capres di pemilihan 2024.

JOKO WIDODO KEMBALI MENJADI CAPRES DI PEMILIHAN 2024 MENURUT SOSIO-DEMOGRAFI (SURVEI NASIONAL)

| | BASE | Sangat setuju+Setuju | Kurang setuju+Tidak setuju sama sekali | TT/TJ |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------------------------|-------|
| GENDER | | | | |
| Laki-laki | 50.2 | 25.0 | 72.3 | 2.6 |
| Perempuan | 49.8 | 30.0 | 65.0 | 5.0 |
| USIA | | | | |
| <= 21 tahun | 12.5 | 20.3 | 78.9 | 0.8 |
| 22 - 25 tahun | 10.1 | 25.1 | 74.1 | 0.8 |
| 26 - 40 tahun | 36.9 | 26.8 | 69.4 | 3.8 |
| 41 - 55 tahun | 25.2 | 27.3 | 68.5 | 4.2 |
| > 55 tahun | 15.3 | 37.1 | 55.6 | 7.3 |
| ETNIS | | | | |
| Jawa | 41.6 | 25.8 | 71.2 | 2.9 |
| Sunda | 15.5 | 25.7 | 71.4 | 2.9 |
| Batak | 3.5 | 18.8 | 76.9 | 4.3 |
| Madura | 3.3 | 13.2 | 85.4 | 1.4 |
| Betawi | 3.1 | 29.2 | 69.1 | 1.8 |
| Minang | 3.0 | 5.6 | 84.9 | 9.5 |
| Bugis | 3.1 | 12.5 | 84.8 | 2.7 |
| Melayu | 2.5 | 29.7 | 70.3 | 0.0 |
| Lainnya | 24.6 | 38.8 | 55.1 | 6.1 |
| AGAMA | | | | |
| Islam | 88.9 | 24.0 | 72.0 | 4.0 |
| Lainnya | 11.1 | 55.9 | 42.0 | 2.1 |

| | BASE | Sangat setuju+Setuju | Kurang setuju+Tidak setuju sama sekali | TT/TJ |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------|-------|
| PENDIDIKAN | | | | |
| <= SD | 27.9 | 36.2 | 57.4 | 6.4 |
| SLTP | 22.3 | 27.1 | 70.5 | 2.4 |
| SLTA | 34.8 | 24.3 | 72.1 | 3.6 |
| Kuliah | 15.0 | 19.4 | 79.1 | 1.5 |
| PEKERJAAN | | | | |
| Petani, buruh kasar, tidak tetap, sopir/ojek, PKL, menganggur | 40.8 | 28.9 | 66.4 | 4.7 |
| Pegawai (PNS/Swasta), wiraswasta, guru/dosen, profesional | 24.0 | 24.4 | 73.2 | 2.4 |
| Ibu Rumah Tangga | 23.9 | 28.7 | 67.1 | 4.2 |
| Lainnya | 11.3 | 26.6 | 70.9 | 2.6 |
| PENDAPATAN | | | | |
| < 1 juta | 20.6 | 33.0 | 60.6 | 6.4 |
| 1 - <2 juta | 35.0 | 31.2 | 64.7 | 4.1 |
| 2 - <4 juta | 27.9 | 21.8 | 75.9 | 2.4 |
| =>4 juta | 16.4 | 22.1 | 75.5 | 2.3 |

Mayoritas publik kurang/tidak setuju presiden Joko Widodo kembali maju sebagai capres 2024 di setiap kelompok sosio-demografi pemilih kecuali kelompok non muslim dan wilayah Bali Nusa.

JOKO WIDODO KEMBALI MENJADI CAPRES DI PEMILIHAN 2024 MENURUT SOSIO-DEMOGRAFI (SURVEI NASIONAL)

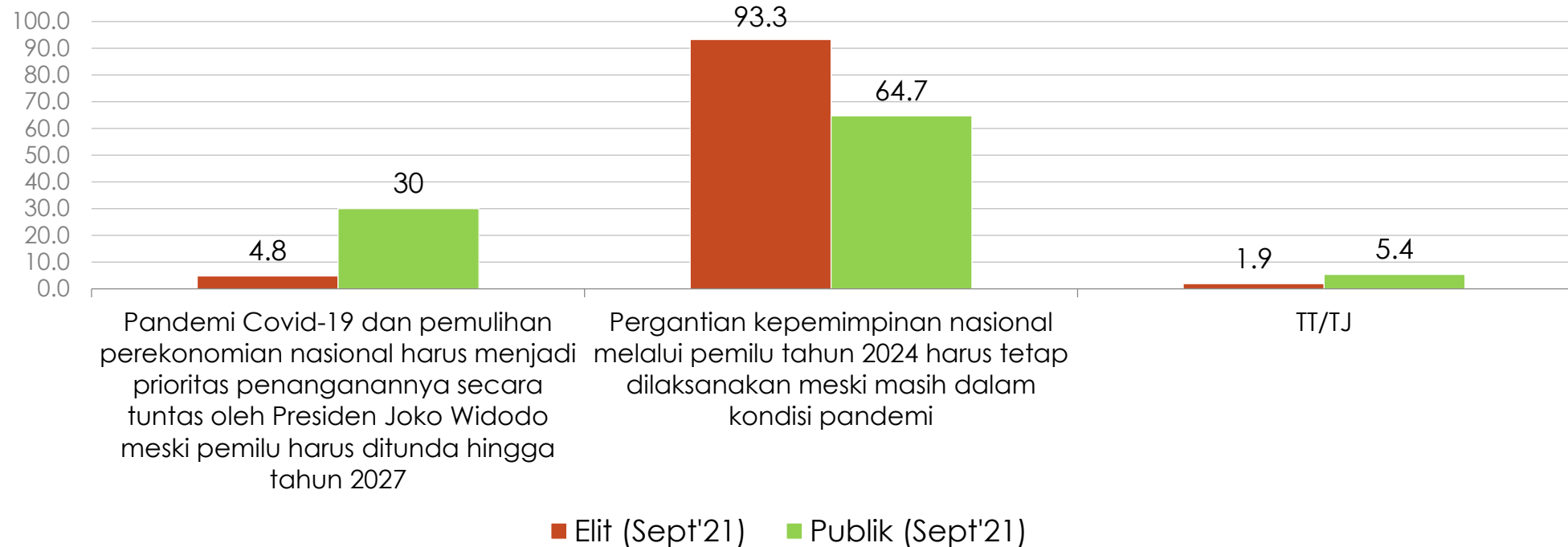
| | BASE | Sangat setuju+Setuju | Kurang setuju+Tidak setuju sama sekali | TT/TJ | | BASE | Sangat setuju+Setuju | Kurang setuju+Tidak setuju sama sekali | TT/TJ |
|------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------|-------|
| DESA/KOTA | | | | | PILIHAN PRESIDEN 2019 | | | | |
| Pedesaan | 49.6 | 30.5 | 66.0 | 3.6 | Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma'ruf Amin | 55.5 | 40.7 | 55.2 | 4.2 |
| Perkotaan | 50.4 | 24.6 | 71.4 | 4.0 | Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno | 44.5 | 11.7 | 84.9 | 3.4 |
| WILAYAH | | | | | | | | | |
| SUMATERA | 20.4 | 22.6 | 70.7 | 6.7 | | | | | |
| BANTEN | 4.3 | 12.8 | 87.2 | 0.0 | | | | | |
| DKI | 4.1 | 23.6 | 69.3 | 7.4 | | | | | |
| JABAR | 17.4 | 29.1 | 68.8 | 2.1 | | | | | |
| JATENG DIY | 16.1 | 26.9 | 70.1 | 3.0 | | | | | |
| JATIM | 16.2 | 32.1 | 62.6 | 5.3 | | | | | |
| BALI NUSA | 5.3 | 53.5 | 40.0 | 6.5 | | | | | |
| KALIMANTAN | 5.9 | 36.1 | 63.9 | 0.0 | | | | | |
| SULAWESI | 7.0 | 21.6 | 77.4 | 1.1 | | | | | |
| MALUKU PAPUA | 3.3 | 25.8 | 59.3 | 14.9 | | | | | |

Mayoritas publik kurang/tidak setuju presiden Joko Widodo kembali maju sebagai capres 2024 di setiap kelompok sosio-demografi pemilih kecuali kelompok non muslim dan wilayah Bali Nusa.



PILPRES DITUNDA HINGGA TAHUN 2027 KARENA PANDEMI DAN PEMULIHAN EKONOMI VS TETAP DILAKSANAKAN TAHUN 2024

Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas, 93.3%, elit menilai Pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu tahun 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.

TEMUAN

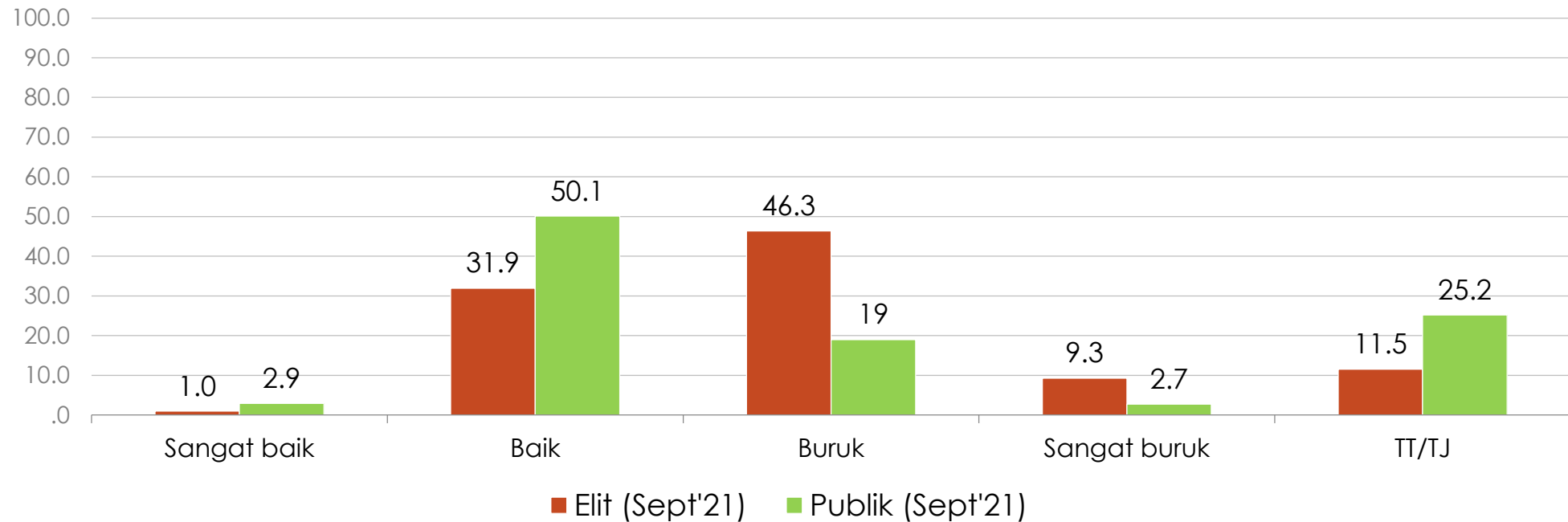
- Mayoritas di kalangan elit maupun kalangan publik kurang/tidak setuju sama sekali jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun penolakan di kalangan elit terlihat lebih keras dibanding publik.
- Mereka yang setuju dengan jabatan presiden tiga periode juga setuju bahwa hal tersebut juga berlaku untuk Presiden Joko Widodo, mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla.
- Mayoritas elit dan publik menilai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlaku sampai sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya DUA kali harus dipertahankan. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.
- Mayoritas di kalangan elit maupun kalangan publik kurang/tidak setuju sama sekali jika Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Namun penolakan di kalangan elit terlihat lebih keras dibanding publik.
- Mayoritas elit dan publik menilai Pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu tahun 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

INDIKATOR

KINERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

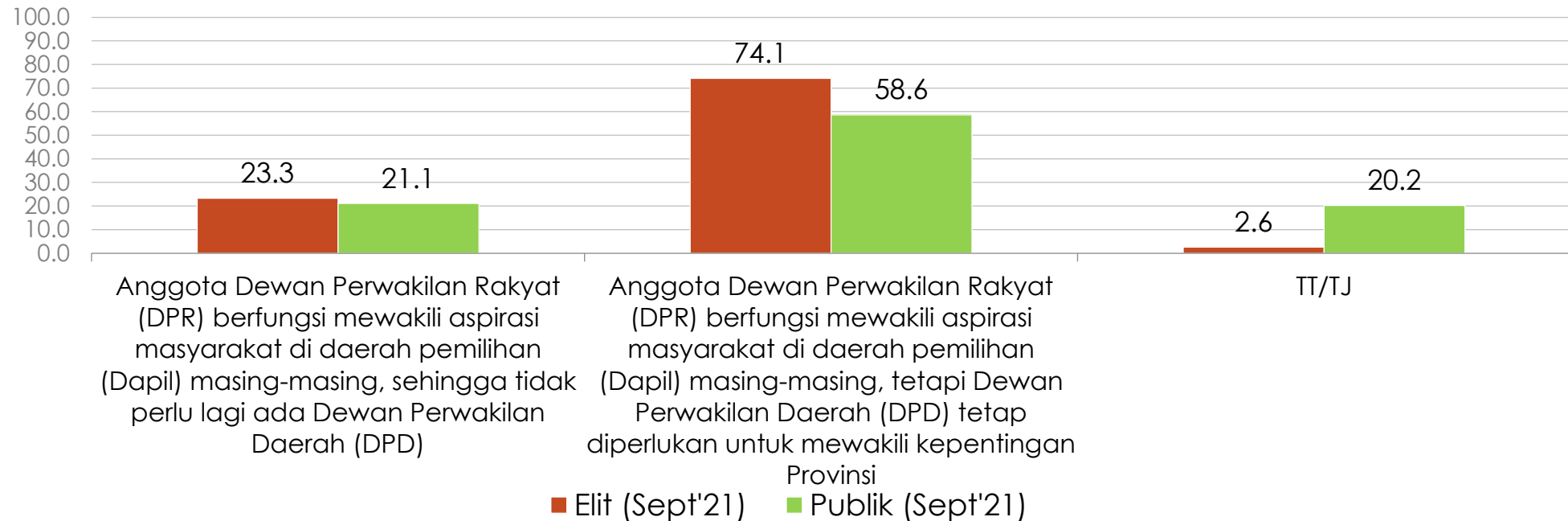
Menurut Ibu/Bapak, secara umum seberapa baik kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga saat ini?... (%)



Di kalangan elit kebanyakan menilai buruk/sangat buruk kinerja DPD, sementara di kalangan publik kebanyakan menilai baik/sangat baik.

DPD TIDAK DIPERLUKAN KARENA ADA ANGGOTA DPR VS DIPERLUKAN UNTUK MEWAKILI KEPENTINGAN PROVINSI

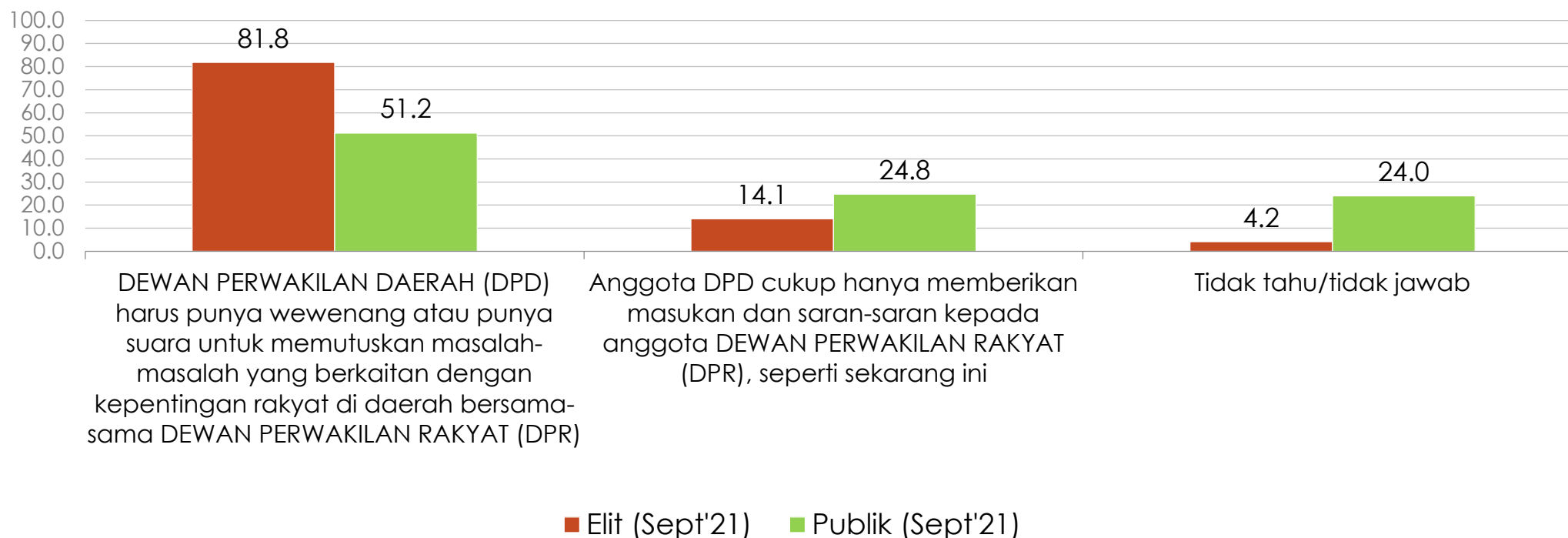
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas, 74.1%, elit menilai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi mewakili aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, tetapi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap diperlukan untuk mewakili kepentingan Provinsi. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.

WEWENANG DPD YANG LEBIH SESUAI

Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas, 81.8%, elit menilai DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) harus punya wewenang atau punya suara untuk memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat di daerah bersama-sama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR). Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.

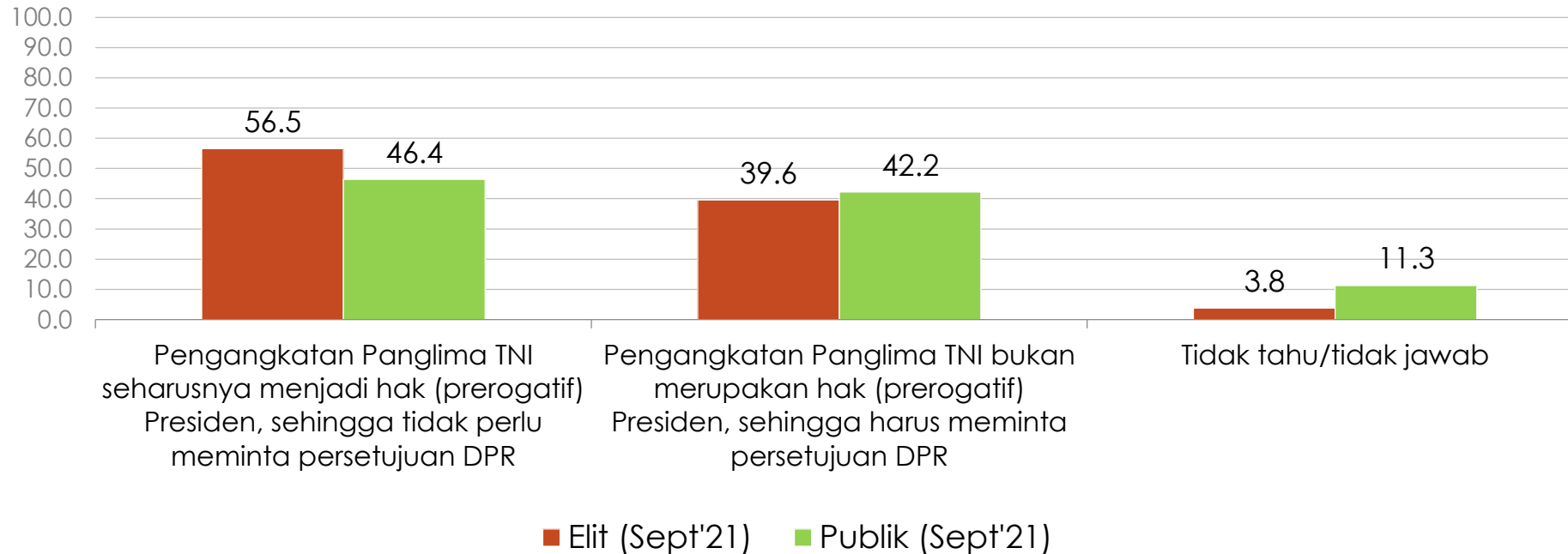
TEMUAN

- Kinerja DPD kebanyakan dinilai buruk oleh elit, sementara di kalangan publik kebanyakan menilai baik/sangat baik.
- Meski dinilai buruk, mayoritas elit menilai DPD diperlukan untuk mewakili kepentingan Provinsi.
- Terkait dengan wewenang DPD, elit maupun publik mayoritas menilai DPD harus punya wewenang atau punya suara untuk memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat di daerah bersama-sama DPR.

HAK PREROGATIF PRESIDEN

PENGANGKATAN PANGGLIMA TNI

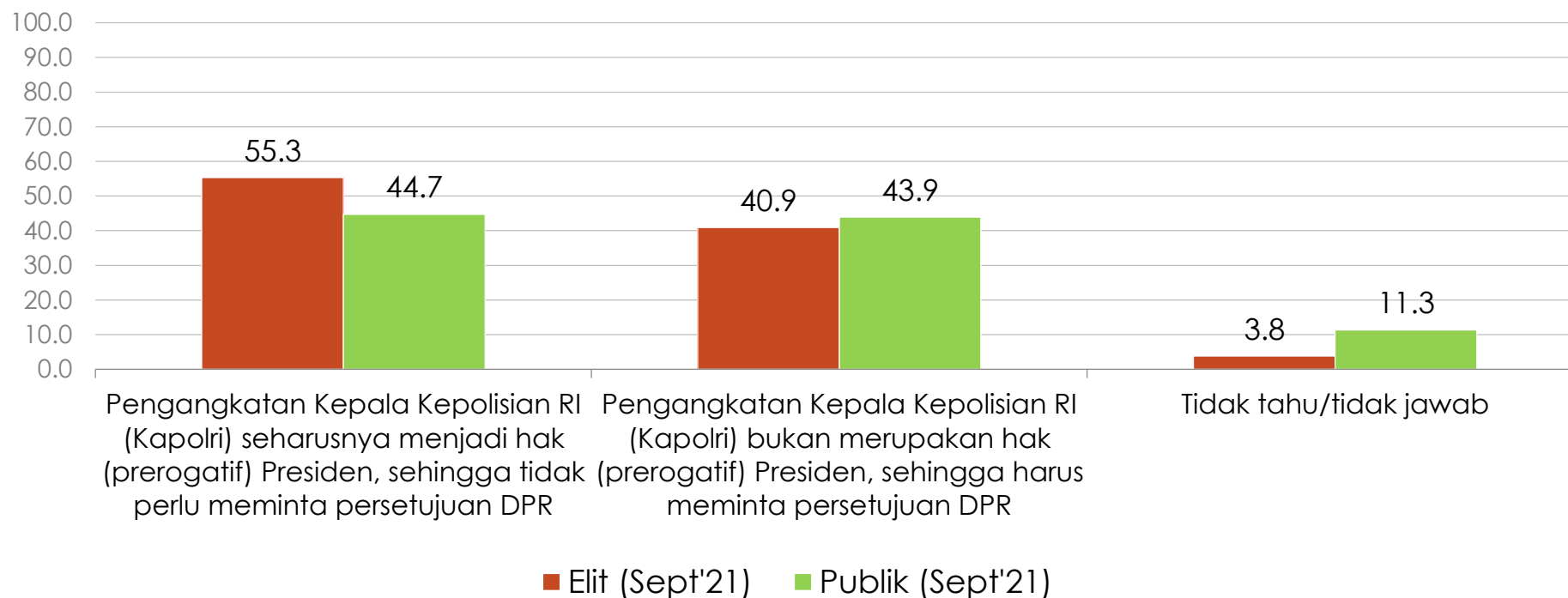
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas, 56.5%, elit menilai Pengangkatan Panglima TNI seharusnya menjadi hak (prerogatif) Presiden, sehingga tidak perlu meminta persetujuan DPR. Sementara di kalangan publik terlihat terbelah, 46.4% menilai tidak perlu meminta persetujuan DPR dan 42.2% harus meminta persetujuan DPR.

PENGANGKATAN KAPOLRI

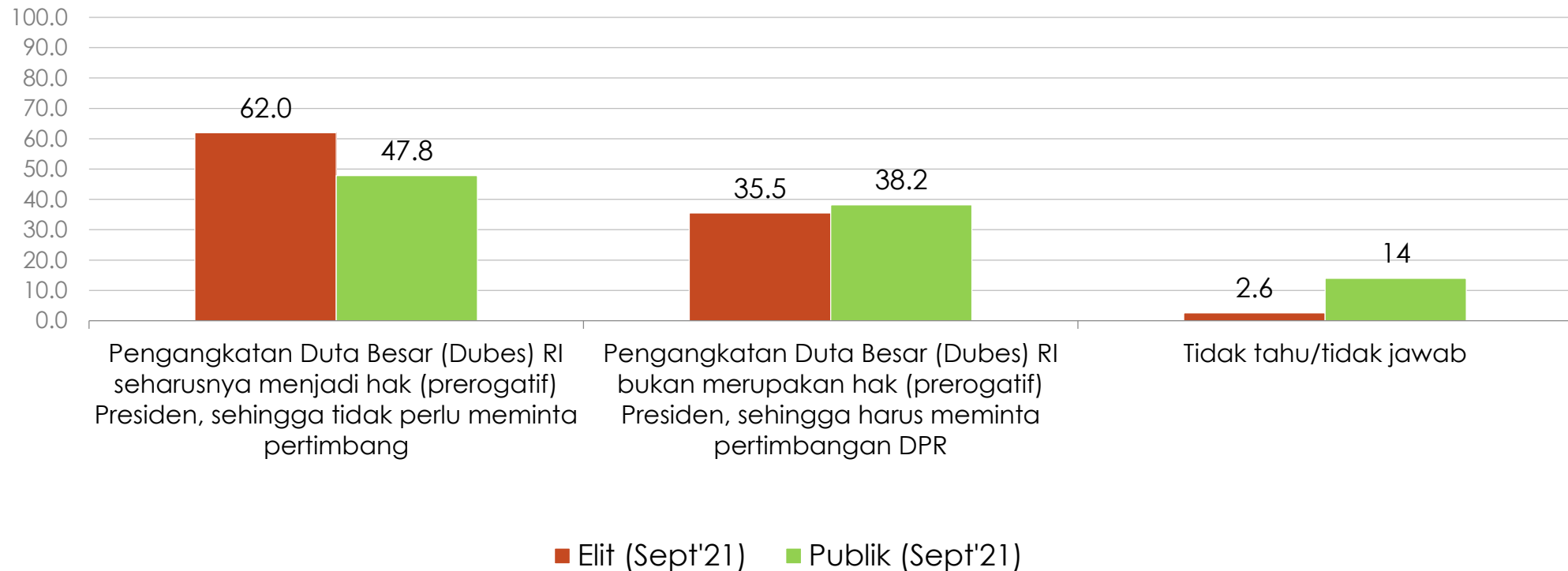
Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas, 55.3%, elit menilai Pengangkatan Kapolri seharusnya menjadi hak (prerogatif) Presiden, sehingga tidak perlu meminta persetujuan DPR. Sementara di kalangan publik terlihat terbelah, 44.7% menilai tidak perlu meminta persetujuan DPR dan 40.9% harus meminta persetujuan DPR.

PENGANGKATAN DUTA BESAR

Di antara pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Mayoritas, 62%, elit menilai Pengangkatan Duta Besar (Dubes) RI seharusnya menjadi hak (prerogatif) Presiden, sehingga tidak perlu meminta pertimbangan DPR. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.

KESIMPULAN



KESIMPULAN

- Secara umum publik saat ini masih menilai buruk kondisi ekonomi nasional juga ekonomi rumah tangganya.
- Namun evaluasi publik terhadap ekonomi nasional dan rumah tangganya terlihat membaik dibandingkan dengan beberapa temuan survei sebelumnya.
- Sementara kondisi politik saat ini cenderung dinilai sedang.

KESIMPULAN

- UUD 1945 dinilai oleh mayoritas (88%) publik sebagai dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia.
- Kebanyakan publik (49%) juga merasa bahwa UUD 1945 tidak boleh untuk diubah sama sekali karena dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan bangsa selamanya.
- Kelompok elit dan publik mayoritas menilai bahwa belum saatnya untuk melakukan amandemen UUD 1945, masing-masing 69% dan 55%.
- Jika amandemen tersebut harus dilakukan, baik elit maupun publik lebih banyak yang merasa bahwa sebaiknya amandemen tersebut dilakukan terhadap pasal tertentu sesuai kebutuhan.
- Meski tidak nampak kecenderungan yang solid terkait bagaimana UUD diamandemen, kebanyakan Publik menilai bahwa amandemen tersebut harus mendapat persetujuan rakyat (28.3%) dan membentuk tim khusus yang berisikan para ahli dan tokoh masyarakat untuk mengkaji apa yang perlu diamandemen (25.7%).

KESIMPULAN

- Mayoritas (56%) narasumber Elit menilai perlunya dibuat PPHN, namun dalam proses penetapannya baik elit maupun publik menilai tidak perlu melalui amandemen UUD 1945, namun cukup melalui UU atau TAP MPR.
- Dalam proses perumusan PPHN, mayoritas elit dan publik juga menilai harus mendengar aspirasi warga terlebih dahulu sebelum dibawa ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Mayoritas, 55.3%, elit menilai perubahan (amandemen) UUD 1945 untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak mendesak sehingga tidak perlu dilakukan.
- Sementara di kalangan Publik tidak terlihat kecenderungan yang solid terkait kapan waktu untuk memasukkan PPHN ke dalam konstitusi, namun kebanyakan juga menilai sama dengan elit.

KESIMPULAN

- Baik elit maupun publik mayoritas tidak setuju dengan pendapat yang mengusulkan pemilihan presiden dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Mayoritas publik juga lebih setuju bahwa pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat seperti sekarang ini.
- Terkait dengan peraturan pengusungan capres dan cawapres, di kelompok elit terlihat mayoritas, 68.4%, lebih sesuai dengan pendapat bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik, gabungan partai politik atau dari jalur perseorangan dalam pemilu.
- Sementara mayoritas publik, 51.3%, menilai bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu saja. Kebanyakan publik menilai bahwa capres dan cawapres akan lebih berkualitas dan mendapatkan dukungan dari partai politik yang ada di DPR jika calon tersebut diusung oleh partai politik
- Mayoritas elit (73.8%) dan publik (60.4%) juga lebih setuju jika pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh satu pasangan maka tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

KESIMPULAN

- Elit terbelah terkait aturan pemenang pilpres, sekitar 49.5% menilai pemenang pilpres harus meraih suara mayoritas sehingga pilpres bisa berlangsung dua putaran, sementara 47.9% menilai pemenang pilpres cukup dilakukan satu putaran saja.
- Sementara di kalangan publik kebanyakan menilai pemenang pilpres harus meraih suara mayoritas, sehingga bisa berlangsung dua putaran.

KESIMPULAN

- Terkait dengan masa jabatan presiden, mayoritas di kalangan elit maupun kalangan publik kurang/tidak setuju sama sekali jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun penolakan di kalangan elit terlihat lebih keras dibanding publik.
- Mereka yang setuju dengan jabatan presiden tiga periode juga setuju bahwa hal tersebut juga berlaku untuk Presiden Joko Widodo, mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla.
- Mayoritas elit dan publik menilai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlaku sampai sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya DUA kali harus dipertahankan. Di kalangan Publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah.
- Kalangan elit maupun publik mayoritas juga tidak setuju jika Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Penolakan di kalangan elit terlihat lebih keras dibanding publik.
- Elit (93.3%) dan publik (64.7%) juga menilai pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu tahun 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi.

TERIMA KASIH



Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Jakarta Pusat

Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867

Website: www.indikator.co.id